



LAPORAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI SUBSTANSI NASKAH BERITA DI TV PARLEMEN

Disusun oleh:

Nama : Elisa Gabriela Purba
NIP : 199601062020122006
Jabatan : Jurnalis
Unit Kerja : TV dan Radio Parlemen

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN V
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DPR RI
2021

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKTUALISASI

OPTIMALISASI SUBSTANSI NASKAH BERITA DI TV PARLEMEN

Disusun oleh:

Nama : Elisa Gabriela Purba, S.I.Kom
NIP : 199601062020122006
Jabatan : Jurnalis
Instansi : TV dan Radio Parlemen

Peserta Diklat,



Elisa Gabriela Purba
NIP. 199601062020122006

Mentor,



Bayu Setiadi, S.IP
NIP. 197903262005021002

Coach,



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP. 196902082003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya sehingga program aktualisasi ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Program aktualisasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat bukan hanya untuk TV Parlemen, namun juga untuk Setjen DPR RI.

Pelaksanaan program aktualisasi ini dapat selesai dengan maksimal karena adanya dukungan, bimbingan, arahan, masukan dan kerjasama dari berbagai pihak. Sebagai bentuk hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dewi Barliana selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI
2. Bapak Irfan, S.Sos. MMSI selaku Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen
3. Bapak Bayu Setiadi, S.IP selaku Kasubbag Program dan Produksi, sekaligus mentor aktualisasi
4. Bapak Agus Supriyono S.S, M.A.P selaku *coach* aktualisasi
5. Tim redaksi TV Parlemen yang memberikan dukungan dalam aktualisasi ini
6. Teman-teman CPNS TV Parlemen yang selalu mendukung
7. Serta semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari rancangan aktualisasi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Terima kasih.

Jakarta, Juni 2021



Elisa Gabriela Purba, S.I.Kom

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. TUJUAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	2
D. MANFAAT AKTUALISASI	3
BAB II	4
A. VISI DAN MISI UNIT KERJA.....	4
B. STRUKTUR ORGANISASI	6
C. TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PESERTA	7
BAB III	9
A. IDENTIFIKASI ISU	9
1. Belum Optimalnya Substansi Naskah Berita TV Parlemen.....	9
2. Belum Optimalnya Pemanfaatan <i>Website</i> TV Parlemen dalam Penayangan Program- Program TV Parlemens.....	15
3. Kurangnya Diversifikasi Program di TV Parlemen	17
B. PENETAPAN ISU PRIORITAS.....	19
1. Teknik Analisis Isu.....	19
2. Pemilihan Isu Prioritas.....	21
C. GAGASAN PEMECAHAN ISU	21
BAB IV	23
A. RANCANGAN AKTUALISASI.....	23
B. JADWAL KEGIATAN.....	27
BAB V	29
A. JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI.....	29
B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN	30
1. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1.....	31
2. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2.....	32
3. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 3.....	34
4. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4.....	38

C. <i>STAKEHOLDER</i>	41
D. KENDALA DAN STRATEGI MENGHADAPI KENDALA	41
E. ANALISIS DAMPAK.....	41
BAB VI.....	43
A. KESIMPULAN	43
B. SARAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Matrik Pemilihan Isu dengan Analisis USG21

Tabel 4.1. Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS.....23

Tabel 4.2. Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi.....27

Tabel 4.1. Matrik Jadwal Pelaksanaan Program Aktualisasi29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Plotingan Naskah untuk Editor	10
Gambar 3.2 Naskah Asli Hasil Liputan Jurnalis.....	11
Gambar 3.3. Naskah Hasil Penyuntingan	13
Gambar 3.4. Tayangan di <i>website</i> TV Parlemen tidak upade	16
Gambar 3.5. Konten Youtube DPR RI berisi <i>straight news</i>	18
Gambar 5.1 Koordinasi dengan Kasubbag dan Editor Naskah.....	32
Gambar 5.2 Sosialisasi dengan tim editor naskah dan perwakilan reporter....	33
Gambar 5.3 Plotingan naskah berita sebelum pembagian Bidang Kajian Isu..	35
Gambar 5.4 Plotingan naskah sesudah pembagian Bidang Kajian Isu	36
Gambar 5.5 Hasil monitoring : Editor naskah.....	36
Gambar 5.6 Pelaksanaan rapat redaksi secara.....	37
Gambar 5.7 Evaluasi tahap uji coba dan koordinasi dengan Kasubbag.....	37
Gambar 5.8 Hasil kuesioner.....	39
Gambar 5.9 Hasil kuesioner.....	39
Gambar 5.10 Hasil kuesioner.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 63 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disampaikan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lolos seleksi diwajibkan menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Pendidikan dan Pelatihan integrasi selama 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 65 Ayat 1, calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan, yakni lulus pendidikan dan pelatihan, serta sehat jasmani dan rohani. Pelatihan Dasar Calon PNS atau disebut Latsar CPNS dilaksanakan guna membentuk PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam sistem pembelajaran Latsar CPNS, penyusunan aktualisasi merupakan tahap akhir dari kurikulum pembelajaran. Rancangan aktualisasi merupakan dokumen kertas kerja sebagai salah satu produk pembelajaran yang dihasilkan oleh peserta Latsar CPNS. Penyusunan aktualisasi ini merupakan bentuk implementasi dari mata-mata pelatihan khususnya pada pembelajaran agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dan pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS yang telah dipelajari sebelumnya.

Pengalaman belajar dituangkan dalam bentuk kegiatan aktualisasi, guna memberikan inovasi, perbaikan, serta membentuk kemajuan di unit kerja masing-masing peserta Latsar CPNS sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan aktualisasi ini akan menjadi salah satu syarat kelulusan peserta Latsar CPNS dengan presentase bobot penilaian sebesar 50% (persen).

Oleh karena itu, diharapkan Peserta Pelatihan Dasar CPNS mampu mensintesis substansi nilai-nilai dasar PNS dan menerapkan nilai-nilai mata pelatihan melalui penyusunan rancangan, pelaksanaan aktualisasi, penyusunan

laporan, hingga presentasi laporan aktualisasi untuk membentuk PNS yang profesional dan berkarakter.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam pelaksanaan rancangan aktualisasi ini, yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- 3) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- 4) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- 5) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 6) Surat Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor PL/135/SETJEN DPR RI/PL.02/03/2021 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Setjen DPR RI Tahun 2021

C. TUJUAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Tujuan dari pelaksanaan aktualisasi pada Latsar CPNS antara lain :

- 1) Untuk menerapkan substansi dari nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI pada setiap pelayanan tugas dan jabatannya sebagai pelayan masyarakat;
- 2) Menerapkan akuntabilitas dalam setiap tugas dengan semangat nasionalisme;
- 3) Menjunjung kode etik sebagai ASN dalam tugas dan tanggungjawabnya;;

- 4) Untuk menerapkan materi - materi pokok pembelajaran ke dalam bidang unit kerja masing-masing
- 5) Mewujudkan PNS profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat;
- 6) Membentuk PNS yang memiliki komitmen mutu dan menerapkan nilai anti korupsi dalam bertugas dan melayani masyarakat;
- 7) Memahami konsepsi pembelajaran aktualisasi dan habituasi.

D. MANFAAT AKTUALISASI

Manfaat dari aktualisasi pada Latsar CPNS antara lain :

- 1) Peserta memiliki nilai-nilai dasar PNS dalam jiwa dan dirinya untuk membentuk PNS yang profesional dan berkarakter;
- 2) Membentuk kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai ANEKA dalam fungsinya sebagai pelayan publik;
- 3) Memberikan pedoman bagi peserta Latsar untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam bekerja;
- 4) Memberikan kemampuan bagi peserta Latsar untuk menjadi PNS yang dapat mengedepankan kepentingan nasional dalam melaksanakan tugas jabatannya.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. VISI DAN MISI UNIT KERJA

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020-2024, Sekretariat Jenderal DPR RI merumuskan visi **“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”**

Untuk mendukung perwujudan visi tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI membuat misi sebagai rumusan umum yang menjadi jembatan penjabaran visi ke dalam tujuannya. Misi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020-2024 antara lain :

- 1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- 2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- 3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Salah satu unsur pendukung Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mewujudkan visi misinya yakni Bagian Televisi dan Radio Parlemen yang berada dibawah Biro Pemberitaan Parlemen. Merujuk pada visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Pemberitaan Parlemen memiliki indikator sasaran kinerja berupa peningkatan dalam hal :

- 1) Peringkat pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)
- 2) Jumlah pemirsa/pendengar/penonton terhadap Program Siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- 3) Tingkat kecepatan penayangan berita di *website* DPR RI
- 4) Jumlah pengikut (viewer, follower, subscriber) akun media sosial Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

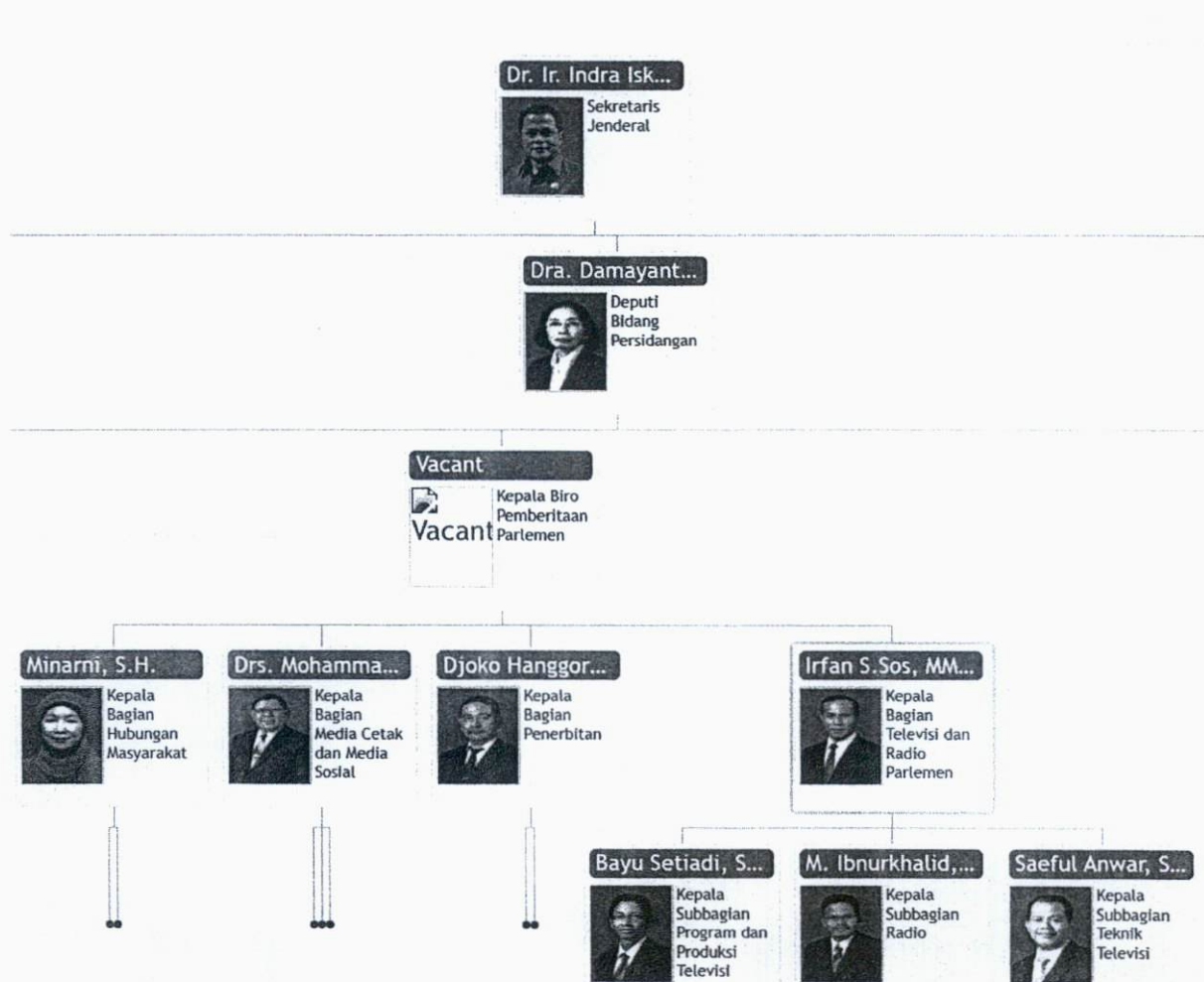
Sebagai unit kerja eselon III, Bagian Televisi dan Radio Parlemen memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pemikiran, kebijakan, kegiatan, dan keputusan-keputusan parlemen kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia luar
- 2) Menampung dan menginformasikan aspirasi, tanggapan, dan harapan masyarakat kepada parlemen
- 3) Meningkatkan pemahaman dan praktek demokrasi yang sehat dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam pendidikan politik masyarakat.

B. STRUKTUR ORGANISASI

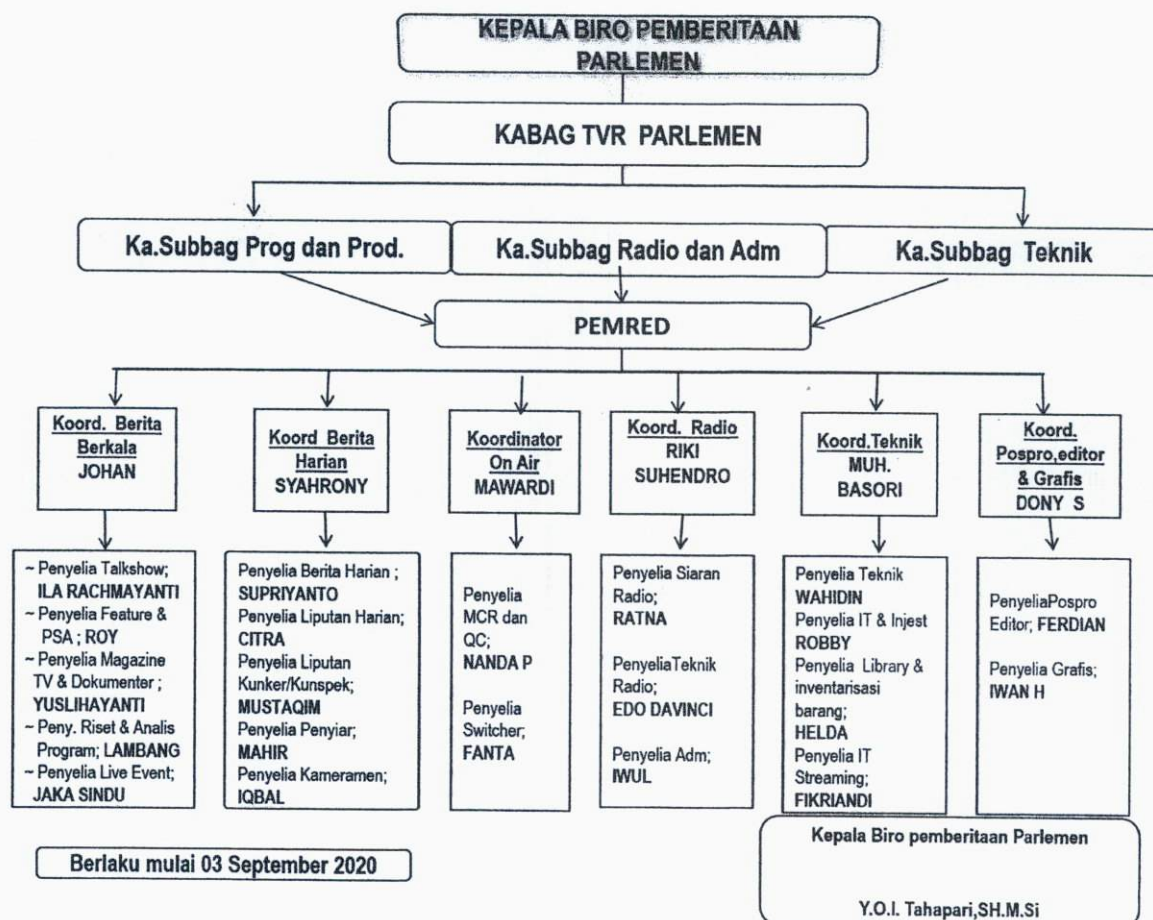
Jabatan penulis yakni di Subbagian Produksi dan Program Televisi, Bagian Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Deputi Persidangan.

Berikut bagan struktur organisasi dari Biro Pemberitaan Parlemen :



Bagan 2.1. Struktur organisasi dari Biro Pemberitaan Parlemen

Berikut bagan struktur organisasi dari unit kerja penulis, yakni di sub bagian Program dan Produksi Televisi :



Bagan 2.2. Struktur Organisasi Subbagian Program dan Produksi Televisi

C. TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PESERTA

Berdasarkan Persekjen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berikut merupakan peran jabatan, uraian tugas, dan tanggung jawab penulis selaku reporter di Televisi Parlemen.

- 1) Meliput kegiatan Dewan dan Sekretariat Jenderal untuk bahan penyusunan press release;
- 2) Menyusun dan menyampaikan konsep press release kepada atasan;
- 3) Menyampaikan press release kepada media massa untuk dipublikasikan;
- 4) Mengklarifikasi berita negative tentang kinerja dewan;

- 5) Mengumpulkan dan mengelolah data serta informasi sebagai bahan penyusunan artikel;
- 6) Menyimpan press release dan artikel sebagai bahan dokumentasi;
- 7) Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
- 8) Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu yang diperlukan.

Uraian tugas dan tanggung jawab tersebut ditetapkan dan disepakati menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Jurnalis, guna mendukung capaian organisasi.

BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. IDENTIFIKASI ISU

1. Belum Optimalnya Substansi Naskah Berita TV Parlemen

- **Kondisi Saat Ini**

Substansi adalah inti, pokok, isi, atau watak yang sebenarnya dari sesuatu. Di dalam berita, substansi terdapat dalam naskah berita. Substansi berita menentukan bobot nilai dan kualitas berita yang dihasilkan. Berita sebelum ditayangkan ke publik melalui banyak tahapan, salah satunya adalah penyuntingan naskah (*news editing*). Dalam proses ini, setiap naskah yang sudah ditulis akan disunting dari segi redaksional (bahasa) dan isi (substansi). Tidak hanya melakukan perbaikan kalimat, kata, sistematika penulisan, maupun durasi, tim editor naskah juga melakukan perbaikan pada substansi naskah, yakni dengan memastikan bahwa berita tersebut adalah berdasarkan fakta, berkesinambungan, lengkap (mengandung 5W+1H), dan akurat. Akurat dalam arti berita harus tepat, benar, dan tidak terdapat kesalahan.

Disinilah peran tim editor naskah menjadi sangat penting dalam proses produksi berita. Tim editor naskah memegang peranan sebagai *quality control* guna memastikan kualitas naskah liputan sebelum ditayangkan dan dibagikan kepada publik melalui program TV Parlemen.

Namun kondisinya saat ini, tim editor naskah di redaksi TV Parlemen belum memiliki fokus bidang kajian masing-masing dalam mengedit naskah. Seorang editor akan menerima dan mengedit naskah liputan dengan bidang kajian berbeda setiap harinya. Naskah yang akan mereka edit dipilih secara acak sehingga tidak terbentuk fokus pada suatu isu. Hal ini menyebabkan editor mengalami *overload* ketika mencoba

menguasai berbagai bidang isu dalam satu waktu, yang mengakibatkan berita yang dihasilkan menjadi tidak optimal dari segi substansinya.

Padahal, sebagai media pemberitaan parlemen yang bertugas dan bertanggung jawab meliput dan memberitakan seluruh kegiatan parlementaria kepada publik, TV Parlemen seharusnya menjadi produsen berita parlemen yang lengkap, padat isi, menghadirkan berita yang kontinu, dan bahkan menjadi kiblat dari media lainnya.

Berikut terlampir plotingan naskah ke setiap editor naskah untuk diedit per harinya. Terlihat bahwa seorang editor naskah belum fokus terhadap satu bidang isu tertentu. Contohnya, pada plotingan tanggal 14 April 2021, editor naskah atas nama Syahroni mengedit naskah dari reporter Hilman Hidayat terkait Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Komisi VII. Namun pada plotingan tanggal 15 April 2021, naskah berita dengan bidang isu yang sama, diedit oleh editor naskah atas nama Citra Ananda. Sehingga kemungkinan seperti kurang optimalnya substansi naskah hasil *editing* hingga tidak kontinunya berita, bisa saja terjadi dan tidak termonitoring.

RAPAT REDAKSI 14 APRIL TAYANG 16 APRIL 2021		
ANDRI TRIANA	ANGGARAN 2% UNTUK BENCANA DARI APBN	CITRA ANANDA
FARKHAN FAJAR	RUU PRAKTIK PSIKOLOGI BERI KEPASTIAN HUKUM	CITRA ANANDA
OKKY ZULINDRA	AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL	CITRA ANANDA
HELM DARMAWAN	FORLEG - RUU KEJAKSAAN	CITRA ANANDA
MAULANA FITYAN ADNILLAH	SATWA TN BALURAN HARUS TETAP LESTARI	FARKHAN FAJAR
ABDUL AJIB	REVISI UU NO 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DOKTER	FARKHAN FAJAR
HABIBI MAHABBAH	PEMERINTAH DIMINTA KELUARKAN PERPES SOAL BRIN	FARKHAN FAJAR
ROKHM NUGRAHA	PELEBURAN KEMENTERIAN LANGKAH TEPAT PRESIDEN	FARKHAN FAJAR
HILMAN HIDAYAT	KOMISI VII - MASUKAN RUU EBT	SYAHRONI
ANDRI TRIANA	KOMISI II APRESIASI PELAYANAN PUBLIK DI KALTENG	SYAHRONI
ANGGA PRATAMA	KOMISI X KE UNIVERSITAS BRAWIJAYA	SYAHRONI
ROKHM NUGRAHA	RUU KEJAKSAAN GUNA PERKUAT LEMBAGA KEJAKSAAN	SYAHRONI

RAPAT REDAKSI 15 APRIL TAYANG 19 APRIL 2021		
HILMAN HIDAYAT	TARGET 78 PERSEN EBT DI TAHUN 2025	CITRA ANANDA
HEF MUDA RANAYAN	WAKIL JUDISIAL	CITRA ANANDA
OPRIYATNO	KETALAN PANGKALAN	CITRA ANANDA
ABDUL SUB	PEMBENTUAN INI KASTUKUR DORONG PEMULIHAN EKONOMI	CITRA ANANDA
AMMY TA PRADITA	PENYELESAIAN NON YURIDIS KASUS HAM	FARKHAN FAJAR
HABIBI MAHABBAH	BUMN FARMASI HARUS MANFAATKAN MOMENTUM PANDEMI COVID-19	FARKHAN FAJAR
FERDIAN NUR RACHMAN	KOMISI IV DPR RI MENDORONG PENGEMBANGAN BERAS PADI INPARI NUTRI ZINC	FARKHAN FAJAR
SYAHRONI	WAKSINASI BAGI CALON JAMA'AH HAJI PERLU DIPRIORITASKAN	FARKHAN FAJAR
HABIBI MAHABBAH	ANGGOTA DEN DIMINTA KESERIUHAN	SYAHRONI
ANDRI TRIANA	RDP BANGGAR DENGAN DIRJEN K/L	SYAHRONI
BONDAN PRAMUDYA	BADAN LEGISLASI DPR RI PANTAU UU NOMER 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DI SULSEL	SYAHRONI
RIFIQI MAKDUDI	PESERTA UTBK TIDAK HARUS SWAB	SYAHRONI

Gambar 3.1 Plotingan Naskah untuk Editor

Berikut juga terlampir naskah asli dari reporter beserta naskah hasil *editing* reporter yang akan ditayangkan ke publik. Dalam gambar ini terlihat, naskah hasil penyuntingan tim editor naskah tidak memiliki perubahan substansi naskah.

JUDUL : KOMISI V MINTA KELAYAKAN PESAWAT DIKAJI ULANG

//KOMISI LIMA DPR RI MEMINTA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN/ UNTUK MENGAJIKAJI ULANG KELAYAKAN TERBANG DARI PESAWAT KOMERSIL//

//TERKAIT INDEKS KESELAMATAN TRANSPORTASI DI ASIA/ YANG HANYA TUJUH PULUH LIMA PERSEN/ ANGGOTA KOMISI LIMA SUKAMTO MEMINTA/ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENGAJIKAJI ULANG KELAYAKAN TERBANG DARI PESAWAT KOMERSIL// ANGKA INDEKS KESELAMATAN YANG RENDAH/ DINILAI SUKAMTO SANGAT MENGKHAWATIRKAN// MENURUTNYA/ INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN/ MENJADIKAN PESAWAT SEBAGAI SALAH SATU MODA TRANSPORTASI UTAMA//

SB : H. SUKAMTO / KOM V F-PKB / DAPIL DIY

TC : 00:37 – 00:58 / TVPM 030221274 – FILE 00041

"Ini sangat mengkhawatirkan. Rata-rata orang Indonesia, terutama para yang hadir pada hari ini, transportasi itu pesawat. Kalau rata-rata indeks pesawat rata-rata keselamatannya itu tujuh puluh lima persen, berarti 25% itu dinyatakan ada kemungkinan tidak selamat. ya ini sangat menakutkan."

//SELANJUTNYA SUKAMTO MENEKANKAN/ MENHUB DAPAT BERSIKAP TEGAS/ DAN MENCABUT IZIN PESAWAT YANG TIDAK LAYAK TERBANG// IA MEMINTA/ MENHUB DAPAT MELIHAT URGENSI UJI KELAYAKAN INI DAN MEMPRIORITASKAN KESELAMATAN ORANG BANYAK//

SB : H. SUKAMTO / KOM V F-PKB / DAPIL DIY

TC : 01:01 – 01:14 / TVPM 030221274 – FILE 00041

"Untuk ini perlu diadakan suatu pengawasan yang lebih ketat. Bagi pesawat-pesawat yang tidak layak terbang, hentikan. Jangan ragu-ragu. Karena ini menyangkut keselamatan manusia."

//SUKAMTO MENAMBAHKAN/ UJI KELAYAKAN PESAWAT ADALAH LANGKAH UTAMA/ UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT DIKEMUDIAN HARI//

// ELISA DAN KOKO/ TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//

Gambar 3.2 Naskah Asli Hasil Liputan Jurnalis

NEWS1

JUDUL : KOMISI V DPR MINTA KELAYAKAN PESAWAT DIKAJI ULANG

//KOMISI LIMA DPR RI MEMINTA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN/ UNTUK MENGAJI ULANG KELAYAKAN TERBANG DARI PESAWAT KOMERSIAL//

//TERKAIT INDEKS KESELAMATAN TRANSPORTASI DI ASIA/ YANG HANYA TUJUH PULUH LIMA PERSEN/ ANGGOTA KOMISI LIMA DPR RI SUKAMTO MEMINTA/ KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENGAJI ULANG KELAYAKAN TERBANG DARI PESAWAT KOMERSIAL// ANGKA INDEKS KESELAMATAN YANG RENDAH/ DINILAI SUKAMTO SANGAT MENGKHAWATIRKAN// MENURUTNYA/ INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN/ MENJADIKAN PESAWAT SEBAGAI SALAH SATU MODA TRANSPORTASI UTAMA//

SB : H. SUKAMTO

ANGGOTA KOMISI V DPR RI/ F-PKB/ D. I. YOGYAKARTA

TC : 00:37 – 00:58 / TVPM 030221274 – FILE 00041

"Ini sangat mengkhawatirkan. Rata-rata orang Indonesia, terutama para yang hadir pada hari ini, transportasi itu pesawat. Kalau rata-rata indeks pesawat rata-rata keselamatannya itu tujuh puluh lima persen, berarti 25% itu dinyatakan ada kemungkinan tidak selamat. ya ini sangat menakutkan."

//SUKAMTO MENEKANKAN/ MENTERI PERHUBUNGAN HARUS BERSIKAP TEGAS/ DAN MENCABUT IZIN MASKAPAI YANG PESAWATNYA TIDAK LAYAK TERBANG// IA MEMINTA/ MENTERI PERHUBUNGAN DAPAT MELIHAT URGensi UJI KELAYAKAN INI DAN MEMPRIORITASKAN KESELAMATAN ORANG BANYAK//

SB : H. SUKAMTO

ANGGOTA KOMISI V DPR RI/ F-PKB/ D. I. YOGYAKARTA

TC : 01:01 – 01:14 / TVPM 030221274 – FILE 00041

"Untuk ini perlu diadakan suatu pengawasan yang lebih ketat. Bagi pesawat-pesawat yang tidak layak terbang, hentikan. Jangan ragu-ragu. Karena ini menyangkut keselamatan manusia."

//SUKAMTO MENAMBAHKAN/ UJI KELAYAKAN PESAWAT ADALAH LANGKAH UTAMA/ UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT DI KEMUDIAN HARI//

//ELISA DAN KOKO/ TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//

Gambar 3.3. Naskah Hasil Penyuntingan

• Kondisi yang Diharapkan

Dari kondisi tersebut diharapkan adanya pembaruan, yakni editor naskah perlu dibagi dan diklasifikasikan untuk memegang bidang kajian tertentu secara spesifik dalam kurun waktu yang ditetapkan. Diharapkan, editor naskah dapat fokus ke bidang kajian yang sedang ia pegang, sehingga menghasilkan substansi naskah hasil penyuntingan yang lebih optimal, menciptakan kontinuitas berita, mempermudah PIC dalam memploting naskah, serta mencegah terpublikasikannya *angle* berita yang sama dengan *soundbite* berbeda.

Selain itu, berikut beberapa manfaat yang diharapkan akan diperoleh jika pengklasifikasian bidang kajian editor naskah ini diterapkan, yakni :

- 1) Editor naskah memahami isu saat ini sesuai dengan bidang kajiannya. Dengan membaca banyak referensi terkait bidang isunya, akan menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan editor naskah yang akan membantunya dalam penyuntingan naskah.
- 2) Membentuk *brand image* DPR dari berita yang terstruktur.
- 3) Membentuk kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang DPR dan kinerjanya.
- 4) Berita yang dipublikasikan secara tidak langsung akan menggiring opini masyarakat sehingga terbentuk citra positif DPR
- 5) Menjadikan TV parlemen poros dari TV dan media lain untuk berita terkait parlemen karena kelengkapan, keakuratan, dan kecepatan penayangannya (yang akan dibantu oleh tim publikasi melalui TV streaming, youtube, ataupun *website*).

- **Dampak jika Tidak Diselesaikan**

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan jika persoalan ini tidak segera diatasi antara lain menimbulkan :

- 1) Menurunnya kualitas berita TV Parlemen karena berita yang dihasilkan tidak memiliki substansi yang mendalam
- 2) Tidak terciptanya keberlanjutan isu berita, karena editor naskah yang mengedit naskah dengan topik tersebut berbeda setiap harinya
- 3) Reporter tidak menyetorkan berita hasil liputannya karena tidak adanya pemantau perkembangan isu
- 4) Terlewatnya isu penting yang sedang beredar
- 5) Berita yang dihasilkan TV Parlemen kalah bobot dibandingkan media lain

Dengan adanya dampak diatas tentunya akan menghambat peran TV parlemen sebagai media informasi parlementaria ke publik. Hal ini juga tentu menjadi penghambat Setjen DPR RI dalam mencapai visi misinya

guna mendukung visi DPR RI. Hambatan yang muncul bagi organisasi yakni :

- 1) Sulitnya mengklarifikasi isu *negative* yang beredar terkait DPR RI
- 2) Informasi terkait parlementaria tidak terpublikasikan dengan maksimal
- 3) Kurang maksimalnya peran TV parlemen untuk membantu DPR RI membentuk *brand image*-nya.

- **Dukungan Teoritik dari Mata Pelatihan**

Isu ini dapat diselesaikan dengan solusi yang mencerminkan nilai ANEKA dan nilai-nilai dasar PNS, yakni :

- 1) Diterapkannya nilai manajemen ASN karena editor menjalankan perannya sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya, dimana editor harus mampu menguasai bidang isu tertentu guna melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya untuk menghasilkan *output* kerja yang maksimal.
- 2) Penerapan nilai Pelayan Publik, yakni editor dan reporter sama-sama berupaya untuk menghasilkan naskah berita yang berbobot, padat data dan informasi, aktual, serta cepat kepada publik.
- 3) *Whole of government* tercipta dengan adanya koordinasi antara reporter dan editor dalam berkolaborasi menghasilkan naskah berita. Kolaborasi dengan tim program dalam penayangan berita juga merupakan aspek penting dalam menjalankan fungsi penyebaran informasi.
- 4) Terukurnya kinerja reporter dan editor dari jumlah naskah berita yang dihasilkan dengan tidak mengenyampingkan kualitas substansinya (setelah melewati proses pengukuran dengan *form checklist*) merupakan salah satu bentuk penerapan nilai akuntabilitas.
- 5) Mengikuti dan memahami setiap perkembangan pemerintahan Indonesia melalui peliputan agenda-agenda dan tetap bersikap

objektif dan non blok, merupakan bentuk rasa cinta kepada tanah air. Mengusahakan memberikan informasi selengkap mungkin kepada publik juga merupakan penerapan nilai Pancasila dan penerapan nilai keterbukaan informasi dengan tetap mentaati aspek kerahasiaan informasi.

- 6) Etika publik berjalan seiring dengan etika jurnalis. Menyajikan berita hasil liputan sesuai fakta merupakan bentuk etika terhadap publik dan pelaksanaan kode etik jurnalis.
- 7) Komitmen mutu merupakan aspek utama dalam penerapan perbaikan yang penulis gagas dalam aktualisasi ini. Menjaga dan menjamin kualitas dari naskah berita yang dihasilkan TV Parlemen, dengan menguatkan kualitas SDM nya (editor) melalui pengklasifikasian bidang kajiannya.
- 8) Korupsi bukan hanya terkait dengan materi. Berbuat curang juga termasuk salah satu jenis korupsi. Terkontrolnya kualitas naskah hasil suntingan editor melalui penerapan *form checklist* merupakan bentuk pengawasan agar tidak terjadi pembuatan curang.

2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Website TV Parlemen dalam Penayangan Program-Program TV Parlemens

• Kondisi Saat Ini

Televisi dan Radio Parlemen adalah unit produksi televisi dan radio siaran terbatas yang bertugas dan berfungsi untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pemikiran, kebijakan, kegiatan dan keputusan-keputusan parlemen kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia luar. Siaran TVR Parlemen dapat diakses melalui jaringan televisi di lingkungan gedung DPR dan live *streaming* melalui situs www.dpr.go.id.

Website TV Parlemen telah memberikan kemudahan bagi pengaksesnya dengan menerapkan konsep *video on demand* dengan mengkategorikan setiap program yang ada. Namun pada prakteknya belum dipergunakan dengan maksimal, terlihat dari tayangan yang

disajikan sudah tidak *update*. Ini menjadi kendala di TV parlemen dalam menghidupkan dan mengembangkan *website* TV Parlemen.

Berikut merupakan hasil *capture* dari konten *website* TV Parlemen, yakni menampilkan program warta parlemen yang dipublikasikan pada tahun 2017.



Gambar 3.4. Tayangan di *website* TV Parlemen tidak upade (berita tahun 2017)

- **Kondisi yang Diharapkan**

Diharapkan kedepannya ada divisi khusus yang bertanggung jawab terhadap *website* TV Parlemen, yang akan rutin mengunggah setiap program dan tayangan. Dengan menerapkan konsep *video on demand* juga akan memberikan kemudahan dalam mencari berita dan menjadi nilai lebih *website* dibandingkan youtube.

Selain itu, sebagai televisi yang pembiayaannya bersumber dari APBN, maka diharapkan kehadiran TV Parlemen dapat semakin dioptimalkan, salah satunya dari pengembangan *website*. Terlebih *website* TV Parlemen sudah memiliki domain tersendiri dan melekat di DPR RI.

- **Dampak Jika Tidak Diselesaikan**

Dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan ini adalah :

- 1) Ketidaktahuan masyarakat luas akan adanya *website* TV parlemen
- 2) Sedikitnya jumlah pengakses *website* DPR RI.
- 3) Hilangnya peluang bagi DPR untuk mem-*branding* dirinya
- 4) Selalu menghadapi kesulitan dalam mengimbangi isu *hoax* yang bersinggungan dengan DPR RI

Namun kondisi ini sudah tertutupi dengan adanya media sosial dan youtube DPR RI, yang membantu TV parlemen dalam mempublikasikan beritanya. Sehingga masalah ini tidak cukup mendesak untuk diselesaikan.

- **Dukungan Teoritik dari Mata Pelatihan**

Dukungan teoritik yang paling ditekankan dalam isu ini adalah pelayanan publik dan *whole of government*. Karena penyebaran informasi parlemen melalui *website* berhubungan dengan hak masyarakat dalam mendapatkan akses dan keterbukaan informasi. Selanjutnya, *whole of government* tercermin dari koordinasi dan kolaborasi TV Parlemen dengan Bidang Data Teknologi Informasi (BDTI) untuk mengunggah program-program TV parlemen di *website*.

3. Kurangnya Diversifikasi Program di TV Parlemen

- **Kondisi Saat Ini**

TV Parlemen sebagai televisi internal DPR RI memiliki perbedaan dan tantangannya sendiri dibandingkan dengan televisi swasta. Selain karena tidak memiliki salurannya sendiri di televisi analog, tayangan di televisi parlemen juga terfokus pada kegiatan parlemen sehingga tidak menayangkan program lain yang mungkin lebih dicari atau diminati oleh penonton. Namun, kekurangan tersebut dapat menjadi kelebihan dan kekuatan tv parlemen, jika dimanfaatkan dengan maksimal. Sifatnya yang

eksklusif di legislatif, memberi kekuatan bagi TV parlemen untuk meliput dan menayangkan progam-program parlemen, dengan lebih lengkap dan cepat dibandingkan televisi swasta.



Gambar 3.5. Konten Youtube DPR RI berisi *straight news*

- **Kondisi yang Diharapkan**

Dengan kelebihan dan kekuatannya sebagai media eksklusif DPR RI, diharapkan TV Parlemen dapat menyajikan program baru tentang parlementaria yang dikemas dengan lebih santai dan menarik, sehingga menarik perhatian publik. Selain itu, diharapkan TV Parlemen dapat menjadi kiblat bagi media lain untuk berita dan informasi yang berkaitan dengan parlemen.

- **Dampak Jika Tidak Diselesaikan**

Jika tidak diselesaikan maka publik akan bosan terhadap tayangan TV Parlemen yang monoton dan dikemas secara formal. Namun pada prinsipnya, berita terkait parlemen (tugas dan fungsi DPR) merupakan konten yang *longlast* (akan selalu diberitakan), tidak cepat basi, dan karena menyangkut dengan pemerintahan Indonesia, maka akan terus

diberitakan oleh media-media. Sehingga masalah ini tidak mendesak untuk segera diselesaikan.

- **Dukungan Teoritik dari Mata Pelatihan**

Menjaga komitmen mutu merupakan hal yang diterapkan dalam penyelesaian masalah ini. Memberikan gagasan program baru, menghadirkan tayangan parlementaria (*straight news*) namun dikemas dengan lebih santai dan menarik. Selalu berinovasi dan memberikan kebaruan untuk menciptakan kemajuan harus mulai digalih dan dilakukan, agar TV Parlemen tidak kalah bersaing dengan media lainnya.

B. PENETAPAN ISU PRIORITAS

1. Teknik Analisis Isu

Dari beberapa isu aktual yang teridentifikasi, selanjutnya penulis akan melakukan penapisan isu untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Teknik tapisan yang digunakan menggunakan analisis USG. Metode ini merupakan salah satu teknik penetapan urutan prioritas pemecahan masalah dengan memperhatikan urgensi, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah.

- ***Urgency***

Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.

- ***Seriousness***

Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan penyebab masalah atau akibat yang dapat menimbulkan masalah-masalah lain jika masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.

- **Growth**

Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan.

Penentuan prioritas melalui teknik USG ini dilakukan dengan penetapan skala 1 – 5, yakni dengan rincian :

- **Skala 1** : Sangat Kecil. Yakni isu tidak mendesak, tidak berpengaruh terhadap pencapaian *output* dan *outcome* kinerja, dan tidak menimbulkan masalah baru jika tidak diselesaikan segera.
- **Skala 2** : Kecil. Yakni isu kurang mendesak untuk diselesaikan, tidak berpengaruh banyak terhadap pencapaian *output* dan *outcome* kinerja, dan tidak menimbulkan masalah yang berarti jika tidak diselesaikan segera.
- **Skala 3** : Cukup. Yakni isu cukup mendesak dan diharapkan diselesaikan dalam waktu dekat, cukup berpengaruh terhadap pencapaian *output* dan *outcome* kinerja, dan dapat menimbulkan masalah baru dalam jangka panjang.
- **Skala 4** : Besar. Yakni isu mendesak dan sebaiknya diselesaikan segera, memiliki pengaruh yang besar terhadap penurunan pencapaian *output* dan *outcome* kinerja, dapat mengganggu produktivitas dan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam jangka pendek.
- **Skala 5** : Sangat Besar. Yakni isu sangat mendesak dan harus diselesaikan segera, memiliki pengaruh yang besar terhadap penurunan pencapaian *output* dan *outcome* kinerja, mengganggu produktivitas dan berpotensi besar untuk merebak dan menimbulkan masalah baru dalam jangka pendek.

2. Pemilihan Isu Prioritas

Berikut merupakan tabel tapisan isu menggunakan analisis USG :

Isu	Kriteria			Jumlah	Prioritas
	U	S	G		
Belum Optimalnya Substansi Naskah Berita TV Parlemen	5	5	5	15	1
Belum Optimalnya Pemanfaatan Website TV Parlemen dalam Penayangan Program-Program TV Parlemen	4	5	3	12	2
Kurangnya Diversifikasi Program di TV Parlemen	3	5	2	10	3

Tabel 3.1. Matrik Pemilihan Isu dengan Analisis USG

Berdasarkan Teknik USG diatas, maka terpilihilah isu prioritas untuk diselesaikan masalahnya, yakni “Belum Optimalnya Substansi Naskah Berita TV Parlemen.”

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Adapun gagasan penyelesaian isu prioritas diatas dapat dilakukan dengan langkah berikut :

1) Mengklasifikasikan editor naskah berdasarkan bidang kajiannya.

Pembagian bidang kajian ini dilakukan agar editor naskah dapat fokus pada isu aktual di bidang masing-masing.

Berikut rincian pembagian bidang kajian editor:

- **Bidang Politik dan Keamanan (Polkam)**, meliputi naskah berita dari hasil liputan di Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi.
- **Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang)**, meliputi naskah berita dari hasil liputan di Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, dan Komisi VII.

- **Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)**, meliputi naskah berita dari hasil liputan di Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Mahkamah Kehormatan Dewan.
 - **Bidang Ekonomi dan Keuangan (Ekku)**, meliputi naskah berita dari hasil liputan di Komisi XI, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
 - **Bidang Nasional**, meliputi naskah berita dari hasil liputan di Kesetjengan dan Badan Keahlian, juga isu umum yang tidak termasuk dalam keempat bidang kajian diatas.
- 2) **Memploting naskah** yang hendak di edit kepada editor naskah sesuai bidang kajiannya sehingga dapat mempertajam dan memperdalam substansi naskah final.
 - 3) **Melakukan rolling bidang kajian editor naskah** setiap satu masa sidang dan masa resesnya (sekitar 2 atau 3 bulan sekali). Rolling dilakukan dengan pertimbangan editor di tim redaksi TV Parlemen memiliki latar belakang ilmu yang seragam, yakni Ilmu Komunikasi, sehingga tidak memiliki dasar ilmu yang sesuai dengan bidang kajian tertentu. Rolling dilakukan guna menghindari kejenuhan isu, melakukan penyegaran, dan memberikan kesempatan kepada editor untuk mengkaji bidang lain secara periodik.
 - 4) **Melakukan pengukuran dan pengujian.** Pengukuran yakni untuk mengukur substansi naskah hasil penyuntingan serta menguji kebermanfaatan penerapan gagasan aktualisasi dengan membagikan kuesioner melalui *google form* kepada tim editor naskah dan tim reporter.

Berikut merupakan tampilan *google form* yang digunakan untuk mengukur substansi naskah :

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

- Unit Kerja : Bagian Televisi dan Radio Parlemen
- Identifikasi Isu : 1. Optimalisasi Substansi Naskah Berita TV Parlemen
2. Belum optimalnya pemanfaatan *website* TV Parlemen dalam penayangan Program
3. Kurangnya diversifikasi program di TV Parlemen
- Isu yang Diangkat : **Optimalisasi Substansi Naskah Berita TV Parlemen**
- Gagasan Pemecahan Isu : Pengklasifikasian bidang kajian isu untuk setiap editor naskah

Tabel 4.1. Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Perencanaan Kegiatan	1. Melakukan koordinasi dengan kasubbag mengenai perencanaan kegiatan aktualiasi 2. Melakukan <i>brainstorming</i> terkait isu yang akan diangkat dengan tim editor naskah	Laporan singkat terkait hasil rapat dan angle isu yang diangkat	Penentuan isu dan gagasan melalui <i>brainstorming</i> merupakan bentuk penerapan sila keempat, yakni musyawarah untuk mencapai mufakat. Koordinasi dan melakukan perencanaan merupakan bentuk	Perencanaan yang matang dan penerapan koordinasi yang baik akan membantu tercapainya visi Setjen DPR RI dengan memberikan dukungan	Melakukan <i>brainstorming</i> , mencari penyelesaian atas masalah secara musyawarah, merupakan

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3. Memutuskan angle isu yang akan diangkat serta mengusulkan gagasan perbaikan dan berkoordinasi dengan tim editor naskah	serta gagasan penyelesaian-nya.	kerja tim dan menghargai setiap pihak yang terlibat sesuai jabatannya. (Nasionalisme, Etika Publik, Manajemen ASN)	dan pelayanan prima terhadap fungsi dewan.	penerapan nilai religius dan membentuk profesionalisme setiap ASN.
2.	Penerapan gagasan penyelesaian isu	1. Merinci semua bidang kajian isu di DPR RI dan Setjen DPR RI 2. Mengelompokkan ragam bidang kajian isu kedalam satu rumpun isu. 3. Mendata jumlah SDM/ tim editor naskah di redaksi 4. Kasubag memploting editor naskah kedalam bidang kajian isu dan menentukan masa rolling 5. Berkoordinasi dengan Kasubag terkait hasil ploting.	Hasil plotingan tiap editor ke bidang kajian isu masing-masing oleh Kasubag.	Membagi tugas sama rata ke setiap anggota tim menerapkan prinsip keadilan. Bekerja sesuai bidang dengan profesional juga merupakan bentuk manajemen ASN. Dengan adanya plotingan juga memudahkan untuk mengukur tingkat akuntabilitas anggota tim dari tercapainya naskah bersubstansi baik.	Memberikan inovasi atau gagasan perbaikan terhadap kualitas naskah berita yang dihasilkan tim editor naskah merupakan bentuk dukungan dalam pelaksanaan tugas jurnalis, yakni "Menyusun dan menyampaikan berita terkait dewan kepada publik serta menjamin kualitas dan kebermanfaatan beritanya."	Memberikan inovasi dan perbaikan untuk organisasi akan membentuk ASN yang religius, akuntabel dan berintegritas.
3.	Sosialisasi Program yang sudah terbentuk	1. Melakukan koordinasi dengan kabag dan Kasubag terkait gagasan penyelesaian yang sudah dibentuk, yakni plotingan editor per bidang kajian isu. 2. Menyusun undangan rapat untuk sosialisasi dan mengirimkannya kepada <i>stakeholders</i> 3. Melakukan koordinasi ke tim editor naskah selaku	Surat Pemberitahuan terkait pembagian Bidang Kajian isu tiap editor tertanda tangan kasubag.	Sosialisasi dan koordinasi merupakan bentuk penerapan nilai <i>whole of government</i> dalam bekerja. Menghargai sesama rekan kerja dan memastikan informasi disampaikan dan diterima oleh setiap pihak juga menerapkan prinsip keadilan juga etika dalam bekerja.	Guna mendukung visi dan misi Setjen DPR RI, tentunya tiap sub bagian dan unitnya harus memiliki kesamaan makna terkait program yang baru dan akan berjalan.	Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi merupakan penerapan nilai religius, profesional, dan integritas, dan mendukung visi misi Setjen DPR RI

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<p><i>stakeholder</i> yang akan mendapatkan pengklasifikasian bidang dalam aktualisasi ini</p> <p>4. Melakukan sosialisasi kepada reporter terkait program yang akan mulai dijalankan di tim editor naskah.</p>	Serta terbentuk <i>awareness</i> pada tim redaksi.			untuk mencapai visi DPR RI.
4.	Program berjalan	<p>1. PIC mengakses daftar naskah hasil liputan reporter yang telah di <i>listing</i></p> <p>2. PIC memilih naskah berita yang akan ditayangkan berdasarkan tingkat urgensi dan pertimbangan lainnya</p> <p>3. Naskah terpilih akan diploting oleh PIC ke setiap editor untuk di edit. Proses plotingan akan sesuai dengan bidang kajian isu masing-masing editor.</p> <p>4. Daftar naskah yang harus diedit beserta nama editor naskahnya akan di <i>share</i> melalui email</p> <p>5. Editor naskah mengedit naskah sesuai bidang kajiannya masing-masing</p> <p>6. Editor naskah melakukan <i>Quality control</i> terhadap naskah final</p>	Email yang berisi plotingan naskah sesuai bidang kajian editor, Email terkait naskah yang telah diedit oleh tim editor naskah sesuai bidang kajiannya.	<i>Editing</i> naskah merupakan bentuk <i>quality control</i> sebelum berita final tayang ke publik. Dengan penetapan bidang kajian isu dan memastikan berita telah diedit oleh editor sesuai bidang kajiannya merupakan bentuk <i>double control</i> untuk menghasilkan berita yang layak, aktual, faktual, kepada publik. Hal ini merupakan penerapan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme, anti korupsi, dan pelayanan publik.	Penetapan bidang kajian isu per editor dan memastikan berita telah diedit oleh editor sesuai bidang kajiannya merupakan bentuk komitmen TV Parlemen untuk menyajikan berita yang faktual dan aktual. Proses <i>editing</i> naskah juga membentuk kesamaan standar terkait berita yang akan dipublikasikan. Hal ini membantu DPR dalam membranding dirinya dan juga mendukung visi Setjen DPR RI.	Menguatkan nilai profesionalisme dan akuntabilitas dengan menciptakan tanggung jawab atas pekerjaannya.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	Evaluasi Program	1. Melakukan monitoring terhadap keberlangsungan plottingan naskah 2. Melakukan rapat evaluasi setiap 2 minggu sekali untuk membahas kendala serta perbaikan yang sekiranya diperlukan. 3. Mengukur dan menguji kebermanfaatan dengan membagikan kuesioner kepada editor naskah melalui <i>google form</i> .	Catatan hasil rapat, beserta hasil kuesioner di <i>google form</i> .	Evaluasi berguna untuk mencari kekurangan yang perlu dibenahi dan kelebihan yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Hal ini merupakan substansi dari penerapan nilai komitmen mutu dan akuntabilitas.	Mengevaluasi kegiatan merupakan bentuk monitoring untuk memastikan kesesuaian <i>output</i> dan manfaat pekerjaan yang dihasilkan telah sesuai dan mendukung visi dan misi Setjen DPR RI.	Proses evaluasi memperlihatkan telah diterapkannya nilai religius, akuntabilitas, profesional, dan integritas.

B. JADWAL KEGIATAN

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 4.2. Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Perencanaan Kegiatan												
	• Melakukan koordinasi dengan mentor terkait pengangkatan isu												
	• Melakukan brainstorming dengan tim editor selaku <i>stakeholder</i>												
	• Menetapkan angle isu yang akan diangkat												
	• Mengusulkan gagasan penyelesaian yang akan diangkat												
2.	Penerapan Gagasan / Ploting Bidang Kajian Isu per Editor												
	• Merinci semua bidang kajian isu di DPR RI dan Setjen DPR RI												
	• Mengelompokkan ragam bidang kajian isu kedalam satu rumpun isu												
	• Mendata jumlah tim editor												
	• Kasubag memploting tiap bidang kajian isu ke setiap editor dan menentukan masa rollingnya												
	• Berkoordinasi dengan Kasubag terkait hasil ploting												
3.	Sosialisasi program yang sudah terbentuk												
	• Membuat surat undangan sosialisasi dan membagikannya ke <i>stakeholders</i>												
	• Sosialisasi hasil ploting dengan Kabag dan Kasubag (mentor)												
	• Sosialisasi hasil ploting ke tim editor												
	• Sosialisasi hasil ploting ke tim reporter												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
4.	Program Berjalan												
	• PIC mengakses daftar naskah hasil liputan reporter yang telah di <i>listing</i>												
	• PIC memilih naskah berita yang akan ditayangkan berdasarkan tingkat urgensi dan pertimbangan lainnya												
	• Ploting naskah ke setiap editor sesuai bidang kajiannya												
	• Distribusi hasil ploting melalui email ke tim redaksi												
	• Editor mengedit naskah sesuai plotingannya												
5.	Evaluasi Pelaksanaan Program												
	• Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program												
	• Melakukan rapat evaluasi setiap 2 minggu sekali untuk membahas kendala serta perbaikan yang sekiranya dilakukan												
	• Membuat kuesioner												
	• Membagikan kuesioner kepada editor melalui <i>google form</i> untuk mengetahui penilaian setiap editor terkait kebermanfaatan gagasan yang telah berjalan												

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Dalam melaksanakan program Aktualisasi ini, penulis telah menetapkan jadwal kegiatan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Namun pada prakteknya, pelaksanaan program aktualisasi ini mengalami pengunduran waktu pada tahap awal atau memulai, yakni mundur sekitar 3 hari kerja. Pada tahap rancangan aktualisasi, penulis menjadwalkan tahap pertama, yakni Perencanaan Kegiatan dapat dimulai pada akhir April 2021. Pada prakteknya, pelaksanaan tahap Perencanaan Kegiatan tersebut mundur menjadi minggu pertama Mei 2021. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan keseluruhan pelaksanaan. Pada pelaksanaan aktualisasi ini juga, penulis menambahkan tahap uji coba (*trial and error*) dan beberapa rincian tahapan lainnya yang dirangkum dalam matriks dibawah ini:

Tabel 5.1. Matrik Jadwal Pelaksanaan Program Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Perencanaan Kegiatan												
	• Melakukan koordinasi dengan mentors terkait pengangkatan isu												
	• Melakukan brainstorming dengan tim editor naskah selaku <i>stakeholder</i>												
	• Menetapkan angle isu yang akan diangkat												
	• Mengusulkan gagasan penyelesaian yang akan diangkat												
2.	Ploting Bidang Kajian Isu Editor Naskah												
	• Merinci semua bidang kajian isu di DPR RI dan Setjen DPR RI												
	• Mengelompokkan ragam bidang kajian isu kedalam satu rumpun isu												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	• Mendata jumlah tim editor naskah												
	• Kasubag memploting tiap bidang kajian isu ke setiap editor dan menentukan masa rollingnya												
	• Berkoordinasi dengan Kasubag terkait hasil ploting												
3.	Sosialisasi hasil Ploting												
	• Membuat surat undangan sosialisasi dan membagikannya ke <i>stakeholders</i>												
	• Sosialisasi hasil ploting dengan Kabag dan Kasubag (mentor)												
	• Sosialisasi hasil ploting ke tim editor naskah dan perwakilan tim reporter												
	• Sosialisasi lanjutan kepada tim reporter												
4.	Program Berjalan												
	• Melaksanakan tahap uji coba (<i>trial and error</i>)												
	• Program berjalan setelah adanya perbaikan dari evaluasi tahapan <i>trial and error</i>												
5.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program												
	• Monitoring berjalannya program												
	• Evaluasi tahap uji coba												
	• Membuat dan membagikan kuesioner untuk evaluasi akhir												
	• Mengolah data hasil evaluasi												

B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

Program aktualisasi ini terbagi menjadi lima tahapan, yakni perencanaan, penerapan gagasan (membagi bidang kajian isu), sosialisasi, berjalannya program, serta tahap monitoring dan evaluasi yang pada pelaksanaannya

diterapkan dalam 4 tahap laporan mingguan. Berikut merupakan penjelasan tahapan kegiatannya.

1. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1

Koordinasi dengan Kasubbag dan Stakeholders

1.1. Rincian Kegiatan

Pada tahap ini penulis melakukan **koordinasi dengan Kasubbag** dan membahas mengenai isu yang akan diangkat dalam aktualisasi ini beserta gagasan penyelesaiannya. Setelah kasubbag menyetujui isu serta gagasan yang diangkat, penulis melakukan **koordinasi dengan tim editor naskah** selaku *stakeholder* dari gagasan aktualisasi ini. Sebelumnya, penulis membuat surat undangan rapat koordinasi dan membagikannya. Rapat koordinasi dilaksanakan pada 07 Mei 2021 secara fisik dan virtual, berhubung ada editor naskah yang sedang mendapatkan jadwal WFH (*Work From Home*). Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan sepengetahuan Kasubbag. Dalam pelaksanaan tahapan ini, penulis menerapkan nilai etika publik dan nasionalisme khususnya penerapan sila ke empat, yakni melakukan musyawarah, diskusi, dan koordinasi.

1.2. Hasil Kegiatan

Dari hasil koordinasi dengan Kasubbag dan tim editor naskah, diperoleh kesepakatan bahwa mengoptimalkan substansi naskah dan membagikan editor naskah kedalam desk atau bidang kajian isu dirasakan perlu dan akan memberikan manfaat baik bagi tim redaksi, TV Parlemen, hingga ke instansi Setjen DPR RI. Sehingga seluruh *stakeholder* sepakat untuk turut membantu penulis dalam menjalankan program aktualisasi ini.



Gambar 5.1 Koordinasi dengan Kasubbag dan Editor Naskah (Evidence selengkapnya dari tahap perencanaan ini terdapat pada lampiran.)

2. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2

Ploting Bidang Kajian Isu per Editor Naskah dan Sosialisasi Hasil Ploting

2.1. Rincian Kegiatan

Pada tahap ini, **penulis merinci semua bidang kajian isu** yang ada di tim redaksi. Setelahnya, penulis mengkategorikan bidang kajian isu tersebut ke dalam rumpun yang sama. Bidang-bidang kajian isu tersebut penulis serahkan kepada Kasubbag untuk kemudian di plotting atau dibagikan kepada setiap editor naskah. Penulis berkoordinasi dengan Kasubbag pada 11 Mei 2021 dan hasil plotting ditetapkan oleh Kasubbag pada 17 Mei 2021.

Setelah mendapatkan hasil plotting bidang kajian isu editor naskah, maka tahap selanjutnya penulis melakukan **sosialisasi hasil plotting kepada stakeholder (tim editor naskah)** dan perwakilan tim reporter. Sebelum melaksanakan rapat sosialisasi, penulis membuat undangan, membagikannya, dan melaksanakan sosialisasi secara fisik. Sosialisasi dilaksanakan pada Kamis, 20 Mei 2021 di Ruang Meeting TVR Parlemen.

Pada tahapan ini, penulis menerapkan nilai etika publik, nasionalisme, dan *whole of government*.

2.2. Hasil Kegiatan

Dari kegiatan plotting, **terbitlah surat pemberitahuan tertanda tangan Kasubbag** bahwa telah dilakukan pembagian bidang kajian isu editor naskah di tim redaksi TV Parlemen, guna mendukung optimalisasi substansi naskah berita di TV Parlemen. Beserta lampirannya berupa hasil plottingan bidang kajian isu per editor naskah beserta masa rolling dan ketentuan lainnya, sesuai dengan arahan dari Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Siaran Televisi di TV dan Radio Parlemen.

Dari kegiatan sosialisasi hasil, yakni editor naskah TV Parlemen menerima hasil plotting per bidang kajiannya dan **bersedia melaksanakan program aktualisasi** sesuai surat pemberitahuan dari Kasubbag guna mendukung terciptanya optimalisasi substansi naskah berita di TV Parlemen. Juga tim editor naskah memberikan masukan terkait hal-hal teknis dalam pelaksanaan gagasan ini. Seperti, untuk meningkatkan koordinasi antara reporter dengan editor naskah terkait ketersediaan berita di tim redaksi. Melalui sosialisasi ini juga perwakilan tim reporter mengetahui adanya pembagian desk editor naskah.



Gambar 5.2 Sosialisasi dengan tim editor naskah dan perwakilan reporter (Evidence selengkapanya dari tahapan ini terdapat pada lampiran.)

3. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 3

Program Berjalan (Tahap Uji Coba / *Trial and error*), Monitoring, Evaluasi Tahap Uji Coba, dan Koordinasi Hasil Evaluasi dengan Kasubbag

3.1. Rincian Kegiatan

Penerapan gagasan aktualisasi ini dimulai sejak 21 Mei 2021. Pada 2 (dua) minggu pertama, dilakukan **tahap uji coba (*trial and error*)**. Tahap uji coba diperlukan guna melihat proses berjalannya gagasan serta kendala yang mungkin muncul. Dalam pelaksanaannya, PIC plotting memploting naskah berita yang akan diedit dan membagikan hasilnya melalui email ke seluruh tim redaksi. Plotingan naskah berita yang akan diedit oleh editor naskah sudah disesuaikan dengan bidang kajian isunya. Selanjutnya, editor naskah mengedit naskah tersebut.

Selama tahap uji coba, penulis melakukan **monitoring**. Seperti, memonitoring kesesuaian email hasil plotingan dengan bidang kajian isu dan berkoordinasi dengan tim editor naskah terkait substansi naskah berita hasil *editing*. Peran monitoring substansi naskah lebih banyak dipegang oleh editor naskah sebagai *quality control* dan bersinggungan langsung dengan naskah. Setiap kekurangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dari naskah asli diupayakan untuk dimaksimalkan oleh tim editor naskah. Beberapa naskah yang tidak memenuhi standar tayang, diinfokan kepada tim reporter baik secara personal, melalui rapat redaksi, ataupun melalui email, untuk menjadi perbaikan bersama kedepan. Penulis juga memonitor kontinuitas berita yang tercipta dari penerapan gagasan ini.

Sembari berlangsungnya tahap uji coba dan proses monitoring, dilakukan juga **evaluasi yang pertama (evaluasi tahap uji coba)**, yang dimulai sejak 4 Juni 2021. Pada evaluasi ini, penulis membuat undangan, membagikannya, serta melaksanakan evaluasi dengan tim editor naskah secara fisik. Namun pelaksanaannya tidak secara bersamaan dengan seluruh tim editor naskah, karena adanya kendala seperti editor naskah yang dinas luar atau WFH (*Work From Home*). Selanjutnya, penulis berkoordinasi

dengan Kasubbag terkait hasil dari evaluasi tahap uji coba ini. Pada tahap ini diterapkan nilai akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu.

3.2. Hasil Kegiatan

Hasil dari kegiatan *trial and error* adalah berita yang akan disunting oleh editor **naskah telah diploting dan telah diedit sesuai bidang kajiannya**. Naskah hasil editing sudah mulai menunjukkan optimalisasi substansi, ditandai dengan adanya **penambahan data dan informasi** pada naskah. Editor naskah tidak hanya mengedit secara redaksional namun juga secara substansial. Dari hasil monitoring juga telah diperoleh **kontinuitas berita di TV Parlemen** (evidence terlampir di bagian lampiran).

Dari hasil evaluasi tahap uji coba diperoleh masukan dari tim editor naskah untuk dilakukan sosialisasi kembali kepada tim reporter TV Parlemen. Karena pada tahap uji coba, masih ditemukan kendala teknis yang berkaitan dengan kinerja tim reporter, sehingga tim reporter dirasa perlu untuk diberi penjelasan atau sosialisasi ulang terkait pembagian bidang kajian isu editor naskah. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut penulis sampaikan kepada Kasubbag sebagai laporan keberlanjutan program aktualisasi.

Berikut terlampir beberapa evidence pada tahapan ini. Evidence selengkapnya terdapat pada lampiran.

RAPAT REDAKSI 14 APRIL TAYANG 16 APRIL 2021		
ANDRI TRIANA	ANGGARAN 2% UNTUK BENCANA DARI APBN	CITRA ANANDA
FARKHAN FAJAR	RUU PRAKTIK PSIKOLOGI BERI KEPASTIAN HUKUM	CITRA ANANDA
OKKY ZULINDRA	AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL	CITRA ANANDA
HELMI DARMAWAN	FORLEG- RUU KEJAKSAAN	CITRA ANANDA
MAULANA FITYAN AUNILLAH	SATWA TN BALURAN HARUS TETAP LESTARI	FARKHAN FAJAR
ABDUL AJIB	REVISI UU NO 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DOKTER	FARKHAN FAJAR
HABIBI MAHABBAH	PEMERINTAH DIMINTA KELUARKAN PERPES SOAL BRIN	FARKHAN FAJAR
ROKHIM NUGRAHA	PELEBURAN KEMENTERIAN LANGKAH TEPAT PRESIDEN	FARKHAN FAJAR
HILMAN HIDAYAT	KOMISI VII - MASUKAN RUU EBT	SYAHRONI
ANDRI TRIANA	KOMISI II APRESIASI PELAYANAN PUBLIK DI KALTENG	SYAHRONI
ANGGA PRATAMA	KOMISI X KE UNIVERSITAS BRAWIJAYA	SYAHRONI
ROKHIM NUGRAHA	RUU KEJAKSAAN GUNA PERKUAT LEMBAGA KEJAKSAAN	SYAHRONI

Gambar 5.3 Plotingan naskah berita sebelum pembagian Bidang Kajian Isu

Redaksi TVR Parlemen <redaksitvrparlemen@gmail.com>

Min, 23 Mei 1

Kepada Abdul, Alfata, andri, avi, Bayu, Bondan, Citra, Dwi, Dwi, saya, Farkhan, Ferdian, Fityan, Habibi, Helmi, Helmi, Hendra, Hery, Hilman, Ila, Indah, Mahir, Mario

RAPAT REDAKSI 21 MEI TAYANG 25 MEI 2021		
HILMAN HIDAYAT	ASUMSI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL 1	CITRA ANANDA
MAHIR PRATAMA	KETUA DPR - ANTISIPASI KETIDAKPASTIAN EKONOMI	CITRA ANANDA
Theresia Octaviana Butar	LANGKAH MENKEU TERKAIT TAX AMNESTY DIAPRESIASI	CITRA ANANDA
RIAN IDRAYANA	BURT JAJAKI RSUD BERKAH PANDEGLANG SEBAGAI RS PROVIDER	FARKHAN FAJAR
Indah Ekawati	EVALUASI KASUS PELAJAR HINA PALESTINA	FARKHAN FAJAR
Elisa Gabriela Purba	MUHAJIMIN DUKUNG PERFILMAN INDONESIA	FARKHAN FAJAR
DODY MUHARAM	IMIGRASI AWASI TURIS ASING DI BALI	SUPRIYANTO
AVIAH AL JUERI	DUKUNGAN INDONESIA UNTUK PALESTINA ADALAH AMANAH UUD 1945	SUPRIYANTO
HELMI DARMAWAN	FIT AND PROPER TEST DEWAS LPP RRI	SUPRIYANTO

Gambar 5.4 Plotingan naskah berita sesudah pembagian Bidang Kajian Isu

WARTA PARLEMEN TAYANG 10 JUNI 2021 Kotak Masuk x

Nukie Tampubolon <nukietampu@gmail.com>

Rab, 9 Jun 13.29 (6 hari yang lalu)



Kepada Ajib, Alfata, Andri, Avi, Bayu, Bondan, Citra, Draga, Dwi, Dwi, Editing, saya, Fajar, Ferdian, Fityan, Habibi, Helmi, Hendra, Hilman, Ila, Indah

Dear all,

Untuk News 2 PROGRAM INDONESIA TERANG (INDAH) diganti dengan PROYEK 35 RIBU MW (ELISA)

Terima kasih

be blessed,

Nukie Tampubolon
+62813 8494 3992

ANDRI TRIANA	KOMISI III DENGAN KEJAKSAAN, KAPOLRI, MENKUMHAM	SUPRIYANTO	TV PARLEMEN
ABDUL AJIB	RUU DATA PRIBADI	SUPRIYANTO	TV PARLEMEN
Elisa Gabriela Purba	DPR RI JALIN HUBUNGAN BILATERAL DENGAN RUMANIA	SUPRIYANTO	TV PARLEMEN
DOMINGGUS TITIHERU	BALEG SOSIALISASI PROLEGNAS PRIORITAS 2021	SUPRIYANTO	TV PARLE

WARTA PARLEMEN TAYANG 11 JUNI 2021

BERITA ANDRI: KOMISI III DGN KEJAKSAAN DIGANTI BERITA RIZKY: KOM II APRESIASI MALL

JUDUL : KOMISI II DPR APRESIASI MALL PELAYANAN PUBLIK DI SURAKARTA SEBAGAI PERCONTOHAN

// KOMISI II DPR RI / MEREKOMENDASIKAN KEPADA SEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA /
AGAR MENCONTOH KINERJA MPP SURAKARTA / YANG DINILAINYA BERHASIL //

Gambar 5.5 Hasil monitoring : Editor naskah menginfokan naskah berita yang tidak dapat tayang sebagai upaya peningkatan substansi naskah berita



Gambar 5.6 Pelaksanaan rapat redaksi secara fisik setiap pagi sebagai bagian dari monitoring pengoptimalisasian substansi naskah berita di TV Parlemen



Gambar 5.7 Evaluasi tahap uji coba dengan editor naskah dan koordinasi hasil trial and error dengan Kasubbag (Evidence selengkapnya dari tahapan ini terdapat pada lampiran.)

4. Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4

Sosialisasi Lanjutan kepada tim Reporter, Berjalannya Program Setelah Tahap Uji Coba, Monitoring dan Evaluasi Akhir

4.1. Rincian Kegiatan

Sehubungan dengan hasil evaluasi pada tahap *trial and error*, maka dilakukanlah **sosialisasi lanjutan** kepada tim reporter. Pada sosialisasi ini, lebih ditekankan teknis pelaksanaan koordinasi yang dibutuhkan oleh tim editor naskah dan tim reporter, guna menciptakan ritme kerja yang sesuai sehubungan dengan adanya pembagian bidang kajian isu dan membantu terbentuknya optimalisasi substansi naskah berita.

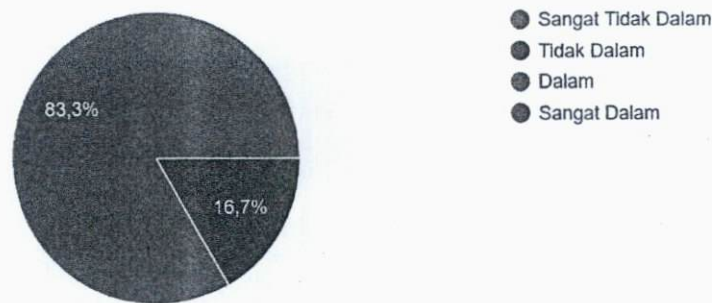
Setelah tahap sosialisasi, **program aktualisasi kembali berjalan dengan penerapan saran dan beberapa poin perbaikan**. Selanjutnya adalah tahap **monitoring dan evaluasi akhir**. Pada tahap ini penulis berfokus untuk mengukur substansi naskah dan menguji kebermanfaatan dari diterapkannya pembagian bidang kajian isu editor naskah. Evaluasi ini dilakukan dengan menghimpun penilaian *stakeholders* terkait program yang berjalan. Respon dan saran tersebut ditampung melalui kuesioner *google form* yang telah penulis bagikan kepada *stakeholders*. Pada tahapan ini tercermin nilai komitmen mutu dan akuntabilitas.

4.2. Hasil Kegiatan

Berdasarkan kuesioner yang penulis bagikan, diperoleh hasil bahwa pembagian bidang kajian isu editor **naskah sudah efektif** untuk **mengoptimalisasi substansi naskah** berita di TV Parlemen. Hal ini terlihat dari hasil kuesioner yang diisi oleh editor naskah, dimana 5 dari 6 responden (sebanyak **83.3%**) menilai bahwa pembagian bidang kajian isu berhasil membentuk **substansi berita yang dalam**. Responden menilai substansi naskah yang optimal terbentuk karena didukung oleh penguasaan isu oleh editor naskah.

Seberapa dalam substansi isu yang dihasilkan oleh editor setelah adanya pembagian desk editor naskah?

6 jawaban

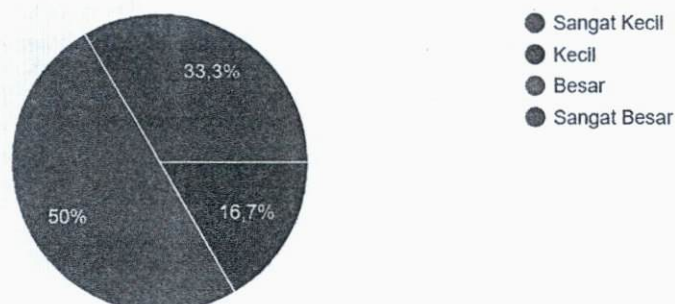


Gambar 5.8 Hasil kuesioner mengenai pengaruh pembagian bidang kajian isu terhadap optimalisasi substansi naskah

Hal ini sejalan dengan hasil kuesioner yang memperlihatkan 3 dari 6 responden (sebanyak **50%**) menilai bahwa kemampuan editor naskah dalam **menguasai isu menjadi besar** setelah adanya pembagian bidang kajian isu. Selanjutnya, 2 dari 6 responden (sebanyak 33.3%) menilai kemampuan editor naskah dalam **menguasai isu menjadi sangat besar** setelah adanya pembagian bidang kajian isu. Responden menilai pembagian desk memberikan fokus kepada editor naskah dalam mengedit berita yang berdampak pada penguasaan isu yang lebih mendalam, seperti memahami kronologis dan mengikuti keberlanjutan isu.

Seberapa besar penguasaan isu desk terkait oleh editor setelah adanya pembagian desk editor naskah?

6 jawaban



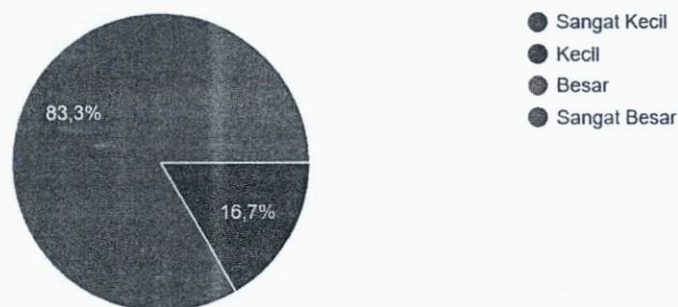
Gambar 5.9 Hasil kuesioner mengenai penguasaan isu oleh editor naskah setelah adanya pembagian bidang kajian isu

Substansi naskah yang optimal juga dapat dilihat dari terbentuknya kontinuitas berita. Karena dalam berita TV dengan durasi yang minim (maksimal 2 menit) sulit untuk memberikan naskah bersubstansi lengkap, oleh sebab itu harus diciptakan kontinuitas berita.

Setelah diberlakukannya pembagian bidang kajian isu editor naskah di TV Parlemen, naskah berita yang dihasilkan telah membentuk kontinuitas. Hal tersebut juga terbukti dari hasil kuesioner sebagai berikut. 5 dari 6 responden (83.3%) menilai bahwa pembagian desk memberikan pengaruh yang **besar** terhadap kontinuitas berita di TV Parlemen. Responden menilai pembagian desk memberikan ruang untuk monitoring terhadap keberlanjutan berita yang sudah diproduksi dari satu bidang kajian isu. Sedangkan 16.7% (1 orang responden) berpendapat pengaruhnya masih **kecil**, karena menurut responden masih diperlukan waktu yang lebih lama untuk membentuk kontinuitas berita.

Seberapa besar pengaruh pembagian desk editor naskah terhadap pembentukan kontinuitas berita di TV Parlemen?

6 jawaban



Gambar 5.10 Hasil kuesioner mengenai pembentukan kontinuitas berita setelah adanya pembagian bidang kajian isu

Hasil dari penerapan gagasan aktualisasi ini terlampir pada bagian akhir laporan, yakni naskah berita yang telah memiliki substansi (setelah diterapkannya pembagian bidang kajian isu) dibandingkan dengan naskah berita sebelum diterapkan pembagian bidang kajian isu.

Hasil lain yang diperoleh dengan adanya pembagian bidang kajian isu editor naskah ini adalah terciptanya kontinuitas berita, kemudahan PIC dalam

memploting naskah, hingga kemudahan dalam proses penyuntingan naskah. Evidence lengkap dari tahapan ini terdapat pada lampiran.

C. STAKEHOLDER

Pihak yang secara langsung dilibatkan dalam proses aktualisasi ini adalah tim editor naskah di TV Parlemen. Karena gagasan yang penulis usung merupakan penambahan bidang kajian isu bagi tim editor naskah dan diterapkan mulai masa sidang kelima DPR RI (Mei 2021).

D. KENDALA DAN STRATEGI MENGHADAPI KENDALA

Kendala yang ditemui dalam membentuk substansi naskah yang optimal adalah kendala pada koordinasi antara editor naskah dengan reporter. Karena pembagian bidang kajian isu merupakan hal baru di tim redaksi, masih terdapat beberapa *miss* komunikasi sebagai kendala teknis di dalamnya. Selain itu, kendala lainnya adalah beberapa reporter yang cenderung mengejar kuantitas berita dibandingkan kualitasnya, sehingga naskah berita reporter yang diterima tim editor naskah masih ada yang minim data, terlalu pendek, atau tidak sesuai dengan standar naskah berita yang seharusnya. Sehingga menyulitkan editor naskah dalam mengelolah naskah yang ada.

Oleh sebab itu untuk kendala ini diperlukan sosialisasi kembali kepada tim reporter, terkait penyampaian format serta standar naskah berita yang seharusnya di tim redaksi. Juga pentingnya peran editor naskah sebagai *quality control* naskah untuk memonitor dan menyunting naskah berita agar tercipta naskah dengan substansi yang optimal.

E. ANALISIS DAMPAK

Dampak yang diperoleh dari pelaksanaan aktualisasi ini tentunya positif dan berupaya membawa perubahan yang lebih baik untuk tim redaksi TV Parlemen, Setjen DPR RI, DPR RI, dan juga masyarakat, seperti :

- 1) Meningkatkan nilai substansi naskah berita TV Parlemen. Editor naskah akan semakin memahami isu yang sesuai dengan bidang kajiannya sehingga naskah berita yang telah melalui proses *editing* menjadi lebih fokus dan padat data.
- 2) Terciptanya kontinuitas berita di TV Parlemen karena setiap berita dengan bidang kajian yang sama melewati proses *editing* di satu orang yang sama
- 3) Dengan adanya pengklasifikasian bidang kajian isu akan mempermudah PIC (*Person in Charge*) dalam memploting naskah berita di rapat redaksi
- 4) Gagasan ini juga memberikan dampak positif terhadap pembentukan citra TV Parlemen. Dengan tersajinya berita yang aktual, faktual, dan padat data, dapat menjadikan TV Parlemen menjadi kiblat dari media lain terkait berita mengenai tugas dan fungsi DPR.
- 5) Membaiknya kinerja TV Parlemen tentunya mendukung Setjen DPR RI untuk mencapai visi dan misinya dalam memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi DPR RI.
- 6) Berita berkualitas yang dihasilkan TV Parlemen juga pada akhirnya akan membantu DPR untuk membentuk *brand image* yang baik dan membantu DPR RI untuk menangkal ataupun mengklarifikasi isu negatif yang beredar.
- 7) Berita yang dihasilkan TV Parlemen secara tidak langsung akan menggiring opini publik menjadi lebih positif tentang DPR RI.
- 8) Masyarakat juga mendapat dampak positif dari gagasan ini, yakni menerima keterbukaan dan kelengkapan informasi terkait parlemen, serta menumbuhkan pengetahuan atau pemahaman yang tepat tentang DPR RI dan kinerjanya.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Program aktualiasi dilaksanakan guna menyelesaikan isu belum optimalnya substansi naskah berita di TV Parlemen. Melalui program aktualisasi, isu dapat dipetakan akar masalahnya dan dicari solusinya. Upaya pemecahan isu dilakukan melalui tahapan kegiatan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Penerapan gagasan pembagian bidang kajian isu editor naskah dinilai telah mengoptimalkan substansi naskah berita di TV Parlemen. Dengan pembagian bidang kajian isu tersebut, editor naskah semakin memiliki penguasaan isu sehingga semakin memudahkan proses penyuntingan naskah.
- b) Manfaat lain yang diperoleh dari penerapan gagasan ini adalah terbentuknya kontinuitas berita, kemudahan plotting, serta kemudahan proses *editing*.
- c) Upaya untuk mengoptimalkan substansi naskah berita di TV Parlemen merupakan bentuk penerapan menjaga komitmen mutu. Tim redaksi TV Parlemen berupaya agar berita yang dihasilkan dan dipublikasikan kepada publik merupakan berita yang padat data, aktual, faktual, dan dapat dipercaya.
- d) Dalam menjalankan gagasan aktualiasi ini, diperlukan sosialisasi serta koordinasi, yang merupakan bentuk penerapan nilai *Whole of Government*. Sosialisasi serta koordinasi dengan pimpinan unit kerja, tim editor naskah, tim reporter, merupakan salah satu kunci untuk tercapainya substansi naskah yang optimal. Karena untuk menghasilkan suatu berita, dibutuhkan kerja sama antar bagian dan tim.
- e) Dalam pelaksanaan aktualisasi ini diterapkan nilai mata pelatihan komitmen mutu, akuntabilitas, etika publik, dan nasionalisme.

B. SARAN

Berdasarkan proses penerapan program aktualisasi ini, peserta memberikan masukan sebagai berikut :

- a) Kepada Pimpinan Unit Kerja, peserta memberi masukan agar pimpinan dapat menindaklanjuti rekomendasi gagasan penyelesaian yang peserta usulkan, yakni dengan membagi bidang kajian isu atau desk editor naskah di TV Parlemen, agar tetap terjaga kualitas substansi naskah, pemahaman isu, serta menciptakan kontinuitas berita di TV Parlemen. Peserta juga memberi saran agar pimpinan dapat menekankan kembali kepada tim reporter untuk membuat naskah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, untuk mendukung kelancaran penerapan gagasan aktualisasi ini kedepannya.
- b) Kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, peserta memberi saran agar memberikan arahan kepada seluruh unit kerja di Setjen DPR RI untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan hasil kerja atau tayangan Biro Pemberitaan Parlemen khususnya TV Parlemen, baik dengan menonton tayangan di TV Parlemen, di kanal Youtube, memberikan like, *subscribe*, maupun membagikannya ke orang lain. Hal ini juga akan membantu terbentuknya citra baik DPR RI, dan tersosialisasikannya berita terkait DPR kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Jakarta : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.

LAMPIRAN HASIL AKTUALISASI :

NASKAH SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAGIAN BIDANG KAJIAN ISU EDITOR NASKAH

DESK / EDITOR NASKAH : KORINBANG / M. MARLINA TAMPUBOLON

Keterangan / Bagian	Naskah Asli	Naskah Hasil Editing	Perubahan
<i>Judul</i>	KOMISI EMPAT MINTA KEMENTAN SEGERA LAKUKAN PELAPORAN DAN EVALUASI FOOD ESTATE	FOOD ESTATE PERLU DIEVALUASI	Diringkas (lebih singkat, padat, dan jelas)
<i>Lead</i>	// KOMISI EMPAT DPR RI MENYOROTI/ KEMENTERIAN PERTANIAN TERKAIT PENERAPAN FOOD ESTATE UNTUK SEGERA DILAKUKAN PERLAPORAN DAN EVALUASI MENGENAI TINGKAT KEBERHASILANNYA//	//ANGGOTA KOMISI EMPAT DPR RI MENGIMBAU/ KEMENTERIAN PERTANIAN MELAKUKAN EVALUASI DAN SEGERA MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM FOOD ESTATE/ UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KEBERHASILANNYA//	Penyesuaian struktur kalimat sesuai EYD dan bahasa berita (straight word)
<i>Badan / isi berita 1</i>	// DITEMUI DI GEDUNG DPR RI JAKARTA/ ANGGOTA KOMISI EMPAT DPR RI/ RIEZKY APRILIA MENYOROTI IMPLEMENTASI FOOD ESTATE YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KETAHAHAN PANGAN// RIEZKY MENGATAKAN/ PENERAPAN FOOD ESTATE INI HARUS BERDASARKAN NOMENKLATUR DAN PAYUNG HUKUM YANG BERLAKU// RIEZKY BERHARAP/ PENERAPAN FOOD ESTATE HARUS SESUAI DENGAN AMANAH UNDANG-UNDANG//	//DI GEDUNG NUSANTARA DPR RI JAKARTA/ RIEZKY APRILIA MENGATAKAN/ BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PANGAN/ PROGRAM FOOD ESTATE SEHARUSNYA MENGGUNAKAN NOMENKLATUR KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN ATAU KSPP// PASALNYA, PROGRAM FOOD ESTATE MERUPAKAN AMANAH UU/ UNTUK MEWUJUDKAN KETERSEDIAN PANGAN DI DALAM NEGERI// EVALUASI JUGA MENJADI CATATAN YANG SANGAT PENTING/ UNTUK MENGETAHUI RELEVANSI TERHADAP TURUNNYA	Pemberian informasi dan data tambahan

	PERINGKAT INDONESIA/ PADA INDEKS KETAHANAN PANGAN GLOBAL//		
SB/TC 1	<p>SB: RIEZKY APRILIA ANGGOTA KOMISI IV DPR RI / F-PDIP/ SUMSEL I TC: 00:07 – 00:46 / TVPM-240521182-VINITA-KOMISI IV-FILE00050</p> <p>“ sebenarnya hampir mayoritas komisi 4 dari awal mempertanyakan masalah food estate. nomenklatur food Estate ini bukan kita tidak setuju Tetapi apakah itu sudah diamanahkan dalam bentuk undang-undang atau payung hukumnya apa. makanya kami berharap Mitra kami di komisi 4 terutama Menteri Pertanian Kementerian Pertanian untuk menyampaikan pakailah istilah yang memang sudah diamanahkan undang-undang itu tadi saya Sebutkan undang-undang 18 tahun 2012 tentang pangan bahwa di situ ada kawasan sentra produksi pangan. di dalam pasalnya ada bahwa memang kewajiban pemerintah untuk melakukan pengembangan terhadap KSPP tersebut.”</p>	<p>SB: RIEZKY APRILIA ANGGOTA KOMISI IV DPR RI/ F-PDIP/ SUMSEL I TC: 00:07 – 00:46 / TVPM-240521182-VINITA-KOMISI IV-FILE00050</p> <p><i>“ sebenarnya hampir mayoritas komisi 4 dari awal mempertanyakan masalah food estate. nomenklatur food Estate ini bukan kita tidak setuju Tetapi apakah itu sudah diamanahkan dalam bentuk undang-undang atau payung hukumnya apa. makanya kami berharap Mitra kami di komisi 4 terutama Menteri Pertanian Kementerian Pertanian untuk menyampaikan pakailah istilah yang memang sudah diamanahkan undang-undang itu tadi saya Sebutkan undang-undang 18 tahun 2012 tentang pangan bahwa di situ ada kawasan sentra produksi pangan. di dalam pasalnya ada bahwa memang kewajiban pemerintah untuk melakukan pengembangan terhadap KSPP tersebut.”</i></p>	Peringkasan <i>soundbite</i> (menghapus informasi yang kurang perlu, pemenuhan kaidah durasi naskah berita TV)
Badan / isi berita 2	<p>// SEMENTARA ITU/ RIEZKY MENDORONG KEMENTERIAN PERTANIAN/ UNTUK MELAKUKAN PLAPORAN DAN EVALUASI TERHADAP PENERAPAN FOOD ESTATE DI INDONESIA// DALAM HAL INI RIEZKY MENYOROTI/ ANGGARAN YANG SUDAH DIKELUARKAN PEMERINTAH UNTUK FOOD ESTATE/ HARUS MEMILIKI CAPAIAN</p>	<p>//ANGGOTA KOMISI EMPAT DPR RI RIEZKY APRILIA JUGA MENYOROTI ANGGARAN YANG SUDAH DIKELUARKAN PEMERINTAH TERHADAP PROGRAM FOOD ESTATE/ TERHADAP TINGKAT KEBERHASILANNYA//</p>	Peringkasan isi berita tanpa mengurangi informasi

	BERUPA OUTPUT KEBERHASILAN PENGEMBANGAN PANGAN//		
SB/TC 2	<p>SB: RIEZKY APRILIA ANGGOTA KOMISI IV DPR RI / F-PDIP/ SUMSEL I TC: 01:10 – 01:48 / TVPM-240521182-VINITA- KOMISI IV-FILE00050</p> <p>"bisa terlihat lah gitu lah terlihat dan sudah banyak juga di berita bahwa dan beberapa kali juga komisi 4 juga sudah melakukan kunjungan ke sana ya (kawasan food estate), mungkin Apakah dari anggaran yang dikeluarkan itu worth it dengan yang sudah sudah ter aplikasi ya mungkin pihak Kementerian harus menyampaikan dan melaporkan sejujurnya kepada bapak presiden saya mohon minta ini untuk melakukan pelaporan yang sejujur-jujurnya apakah ini tingkat keberhasilannya di atas 50% atau tidak kan begitu"</p>	<p>SB: RIEZKY APRILIA ANGGOTA KOMISI IV DPR RI / F-PDIP/ SUMSEL I TC: 01:10 – 01:48 / TVPM-240521182- VINITA-KOMISI IV-FILE00050</p> <p><i>"bisa terlihat lah gitulah terlihat dan sudah banyak juga di berita bahwa dan beberapa kali juga komisi 4 juga sudah melakukan kunjungan ke sana ya (kawasan food estate), mungkin Apakah dari anggaran yang dikeluarkan itu worth it dengan yang sudah sudah ter aplikasi ya mungkin pihak Kementerian harus menyampaikan dan melaporkan sejujurnya kepada bapak presiden saya mohon minta ini untuk melakukan pelaporan yang sejujur-jujurnya apakah ini tingkat keberhasilannya di atas 50% atau tidak kan begitu"</i></p>	Tidak ada perubahan
Ekor Berita	[TIDAK ADA]	//LOKASI AWAL PENGEMBANGAN KSPP DIARAHKAN DI LIMA LOKASI/ YAITU KALIMANTAN TNEGAH/ SUMATERA UTARA/ SUMATERA SELATAN/ NUSA TENGGARA TIMUR/ DAN PAPUA//	Pemberian informasi dan data tambahan
Rep/Cam	//VINITA DAN EDO TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//	//VINITA DAN EDO TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//	Tidak ada perubahan

DESK / EDITOR NASKAH : NASIONAL / SYAHRONI

Keterangan / Bagian	Naskah Asli	Naskah Hasil Editing	Perubahan
<i>Judul</i>	JANGAN ADA CELAH BISNIS PADA DISTRIBUSI VAKSIN GOTONG ROYONG	DISTRIBUSI VAKSIN GOTONG ROYONG JANGAN DIBISNISKAN	Penyesuaian struktur dan bahasa berita (straight word)
<i>Lead</i>	// KOMISI ENAM DPR RI MENEGASKAN/ KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN UNTUK TIDAK MENCARI CELAH BISNIS DALAM PENGADAAN VAKSIN GOTONG ROYONG//	//ANGGOTA KOMISI ENAM DPR RI MENEGASKAN/ PERUSAHAAN BUMN FARMASI TIDAK MEMANFAATKAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN GOTONG ROYONG MENJADI BISNIS PERUSAHAAN//	Penyesuaian struktur kalimat sesuai EYD dan bahasa berita (straight word)
<i>Badan / isi berita 1</i>	// DITEMUI DI GEDUNG NUSANTARA SATU DPR RI/ ANGGOTA KOMISI ENAM DPR RI MUKHTARUDIN MENGATAKAN/ PEMBIAYAAN VAKSIN GOTONG ROYONG HARUS DILAKUKAN PERUSAHAAN DAN TIDAK MEMBEBAKANKAN PEKERJA// MUKHTARUDIN MENEGASKAN KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN/ UNTUK TIDAK MENCARI KEUNTUNGAN PADA PROSES VAKSINASI// DALAM HAL INI/ KOMISI ENAM DPR RI AKAN TERUS MENGAWASI DAN MENGONTROL BUMN HOLDING FARMASI/ AGAR PROSES VAKSINASI BERJALAN BAIK DAN TARGET BISA TERPENUHI//	//DITEMUI DI GEDUNG NUSANTARA I DPR RI JAKARTA/ LAMHOT SINAGA MEMINTA/ DISTRIBUSI VAKSIN GOTONG ROYONG HARUS MENERAPKAN SISTIM PROPORSIONAL/ ANTARA KUOTA PERUSAHAAN BUMN DENGAN KUOTA PERUSAHAAN SWASTA// PERUSAHAAN BUMN DIIMBAU TIDAK MENDAPAT KUOTA YANG LEBIH BESAR DARI PERUSAHAAN SWASTA/ HAL INI UNTUK MENCEGAH ADANYA CELAH PERMAINAN OLEH BUMN/ DENGAN MEMPERJUALBELIKAN VAKSIN GOTONG ROYONG//	Badan berita 2 dipindah ke badan berita 1 guna membentuk berita yang komprehensif
<i>SB/TC 1</i>	SB: MUKHTARUDIN ANGGOTA KOMISI VI DPR RI / F-PG/ KALTENG TC: 04:05 – 04:48/ TVPM-250521248-VINITA-KOMISI VI-FILE00034 “Ya memang ini kan Soal pembiayaan ya jadi dengan kalau pemerintah khusus masyarakat ya kemudian yang gotong royong industri karyawan. karyawannya	SB : LAMHOT SINAGA ANGGOTA KOMISI VI DPR RI/ F-PG/ KALTENG TC: 01:03 – 01:38/ TVPM-250521248-VINITA-KOMISI VI-FILE00036 “ya itu tadi yang saya tekan kan, supaya dalam pelaksanaannya itu harus proporsionalitas.	Sound bite 2 dipindah ke sound bite 1 Peringkasan soundbite tanpa mengubah substansi (menghapus

	<p>jangan dibebanin tapi yang bayarkan perusahaan. harganya tentu ini terus terang karena masalah masalah bencana masalah covid dan pandemi tidak boleh berbisnis. kita harapkan tidak ada bisnis dalam proses vaksin ini. Betul-betul ya kalau harganya segitu potong biaya-biaya lain ya itulah yang dilakukan oleh yang harus dibayar oleh perusahaan dan perusahaan jangan membebani lagi kepada pekerja jangan sampai potong gaji. kita berharap mereka divaksin dibeli oleh perusahaan tapi jangan dipotong gajinya."</p>	<p>tadi Biofarma mengkonfirmasi bahwa 25% itu adalah BUMN sedangkan 75% adalah swasta. menurut saya sebenarnya 25% itu apakah itu proporsional apakah itu jumlah itu nggak terlalu besar. nah itu yang saya ingin katakan kepada mereka bahwa jangan sampai ada celah atau ruang bisnis yang dibuka sehingga ada praktik baru yang bisa menghasilkan bisnis tertentu di vaksin gotong royong itu, itu yang harus kita hindari. karena target ini akan sangat besar pemerintah menargetkan untuk vaksin gotong royong itu 30 juta sementara yang terlaksana sampai hari ini itu baru 77.000 yang sudah dilaksanakan. nah Kenapa kok melambat, apakah melambat itu apakah karena ada celah celah bisnis yang di situ yang mempengaruhi mereka itu yang kita perlu cek terhadap Bio Farma Group."</p>	<p>informasi yang kurang perlu)</p>
Badan / isi berita 2	<p>// SEMENTARA ITU/ PT.BIOFARMA TELAH MENGONFIRMASI DISTRIBUSI VAKSIN GOTONG ROYONG DENGAN PEMBAGIAN/ 25 PERSEN UNTUK PERUSAHAAN BUMN DAN 75 PERSEN UNTUK PERUSAHAAN SWASTA// ANGGOTA KOMISI ENAM DPR RI LAMHOT SINAGA MENGATAKAN/ DISTRIBUSI VAKSIN GOTONG ROYONG HARUS MENGGUNAKAN ASAS PROPORSIONAL/ UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA RUANG BISNIS DAN VAKSIN YANG DIJUALPERBELIKAN//</p>	<p>//ANGGOTA KOMISI ENAM DPR RI MUKHTARUDIN JUGA MENGINGATKAN/ PERUSAHAAN BUMN TIDAK Mencari KEUNTUNGAN DARI DISTRIBUSI VAKSIN GOTONG ROYONG// KOMISI ENAM DPR RI AKAN TERUS MENGAWASI BUMN FARMASI YANG DITUNJUK MENDISTRIBUSIKAN VAKSIN GOTONG ROYONG/ AGAR DISTRIBUSI VAKSIN BERJALAN BAIK/ DAN TARGET BISA TERPENUHI//</p>	<p>Badan berita 1 dipindah ke badan berita 2 guna membentuk berita yang komprehensif</p>
SB/TC 2	<p>SB: LAMHOT SINAGA ANGGOTA KOMISI VI DPR RI / F-PG/ KALTENG TC: 01:03 – 01:38/ TVPM-250521248-VINITA-KOMISI VI-FILE00036</p>	<p>SB: MUKHTARUDIN ANGGOTA KOMISI VI DPR RI/ F-PG/ KALTENG</p>	<p>Soundbite 1 dipindah ke soundbite 2 Peringkasan soundbite tanpa</p>

	<p>"ya itu tadi yang saya tekan kan, supaya dalam pelaksanaannya itu harus proporsionalitas. tadi Biofarma mengkonfirmasi bahwa 25% itu adalah BUMN sedangkan 75% adalah swasta. menurut saya sebenarnya 25% itu apakah itu proporsional apakah itu jumlah itu nggak terlalu besar. nah itu yang saya ingin katakan kepada mereka bahwa jangan sampai ada celah atau ruang bisnis yang dibuka sehingga ada praktik baru yang bisa menghasilkan bisnis tertentu di vaksin gotong royong itu, itu yang harus kita hindari. karena target ini akan sangat besar pemerintah menargetkan untuk vaksin gotong royong itu 30 juta sementara yang terlaksana sampai hari ini itu baru 77.000 yang sudah dilaksanakan. nah Kenapa kok melambat, apakah melambat itu apakah karena ada celah-celah bisnis yang di situ yang mempengaruhi mereka itu yang kita perlu cek terhadap Bio Farma Group."</p>	<p>TC: 04:05 – 04:48/ TVPM-250521248-VINITA-KOMISI VI-FILE00034</p> <p>"Ya memang ini kan Soal pembiayaan ya jadi dengan kalau pemerintah khusus masyarakat ya kemudian yang gotong royong industri karyawan. karyawannya jangan dibebanin tapi yang bayarkan perusahaan. harganya tentu ini terus terang karena masalah masalah bencana masalah covid dan pandemi tidak boleh berbisnis. kita harapkan tidak ada bisnis dalam proses vaksin ini. Betul-betul ya kalau harganya segitu potong biaya-biaya lain ya itulah yang dilakukan oleh yang harus dibayar oleh perusahaan dan perusahaan jangan membebani lagi kepada pekerja jangan sampai potong gaji. kita berharap mereka divaksin dibeli oleh perusahaan tapi jangan dipotong gajinya."</p>	<p>mengubah substansi (menghapus informasi yang kurang perlu)</p>
Ekor Berita		<p>//UNTUK DISTRIBUSI VAKSIN GOTONG ROYONG DILAKUKAN OLEH BUMN FARMASI/ YAITU KIMIA FARMA DAN BIO FARMA// UNTUK TAHAP PERTAMA/ AKAN DIDISTRIBUSIKAN 500 RIBU DOSIS/ DIMANA 75 PERSEN DIDISTRIBUSIKAN UNTUK PERUSAHAAN SWASTA/ SISANYA UNTUK PERUSAHAAN BUMN//</p>	<p>Penambahan data dan informasi di ekor berita</p>
Rep/Cam	//VINITA DAN AANG TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//	//VINITA DAN AANG TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//	<p>Tidak ada perubahan</p>

DESK / EDITOR NASKAH : KOREKKU / CITRA ANANDA

Keterangan / Bagian	Naskah Asli	Naskah Hasil Editing	Perubahan
<i>Judul</i>	WAKIL KETUA KOMISI XI APRESIASI LANGKAH MENKEU TERKAIT TAX AMNESTY	WAKIL KETUA KOMISI XI APRESIASI LANGKAH MENKEU TERKAIT TAX AMNESTY	Tidak ada perubahan
<i>Lead</i>	PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DIRENCANAKAN AKAN KEMBALI MENGADAKAN/ KEBIJAKAN TAX AMNESTY JILID DUA// WAKIL KETUA KOMISI SEBELAS DPR RI/ ACHMAD HATARI MENGAPRESIASI LANGKAH PEMERINTAH MELALUI KEMENTERIAN KEUANGAN/ TERKAIT KEBIJAKAN TAX AMNESTY JILID DUA//	// PEMERINTAHAN JOKO WIDODO MERENCANAKAN AKAN KEMBALI MENGADAKAN/ KEBIJAKAN TAX AMNESTY JILID DUA// WAKIL KETUA KOMISI SEBELAS DPR RI/ ACHMAD HATARI MENGAPRESIASI LANGKAH PEMERINTAH MELALUI KEMENTERIAN KEUANGAN/ TERKAIT KEBIJAKAN TAX AMNESTY JILID DUA//	Penyesuaian struktur kalimat sesuai EYD
<i>Badan / isi berita 1</i>	<p>DITEMUI USAI RAPAT PARIPURNA/ DI GEDUNG NUSANTARA DPR RI/ ACHMAD HATARI MENYEBUT RANCANGAN UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN/ ATAU RUU KUP MASIH DIBAHAS DI KOMISI SEBELAS// LEBIH LANJUT/ ACHMAD HATARI MENDUKUNG DAN MENGAPRESIASI SALAH SATU SUBSTANSINYA/ YAITU TAX AMNESTY//</p> <p>NAMUN/ ACHMAD HATARI MENYEBUT PADA JILID KEDUA KEBIJAKAN INI/ HARUS MEMPERHATIKAN HAL HAL TEKNIS/ YANG MENYEBABKAN JILID PERTAMANYA PADA TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS LALU KURANG MEMUASKAN//</p> <p>BERDASARKAN DATA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ATAU DJP KEMENTERIAN KEUANGAN/ REPATRIASI PAJAK HANYA SEBESAR 147</p>	<p>// DITEMUI USAI RAPAT PARIPURNA/ DI GEDUNG NUSANTARA DPR RI/ ACHMAD HATARI MENYEBUT RANCANGAN UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN/ ATAU RUU KUP MASIH DIBAHAS DI KOMISI SEBELAS// LEBIH LANJUT/ ACHMAD HATARI MENDUKUNG DAN MENGAPRESIASI SALAH SATU SUBSTANSINYA/ YAITU TAX AMNESTY//</p> <p>NAMUN/ ACHMAD HATARI MENYEBUT PADA JILID KEDUA KEBIJAKAN INI/ HARUS MEMPERHATIKAN HAL HAL TEKNIS/ YANG MENYEBABKAN JILID PERTAMANYA PADA TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS LALU KURANG MEMUASKAN//</p>	Peringkasan isi berita tanpa mengubah substansi

	TRILIUN/ ATAU SEKITAR LIMA BELAS PERSEN DARI TARGET SEBESAR SERIBU TRILIUN// SERTA DICATAT/ NEGARA MENERIMA UANG TEBUSAN SEBESAR 114 TRILIUN/ ATAU SEKITAR TUJUH PULUH PERSEN DARI TARGET 165 TRILIUN/ PADA TAX AMNESTY JILID PERTAMA//		
SB/TC 1	<p>SB: ACHMAD HATARI/ WAKIL KETUA KOMISI XI / F-PNASDEM / MALUKU UTARA</p> <p>TVPM 200521213 - TERE - PARPUR KOMISI XI / CLIP 00000 TC: 00:13 - 00:56</p> <p>"Terkait dengan agenda itu, di periode yang lalu kita sudah membahas itu, KUP itu. dan kita juga sudah minta masukan dari berbagai perguruan tinggi. itu kita sudah lakukan itu. ini kalau amnesty jilid 2 ini akan harus ditempuh, maka itu akan dilihat lagi kembali karena ini perkembangan 5 tahun yang lalu dengan sekarang tidak mungkin sama. itu jadi itu basic-nya sudah ada tinggal dikembangkan sesuai dengan perkembangan terkini."</p>	<p>SB: ACHMAD HATARI WAKIL KETUA KOMISI XI / F-PNASDEM / MALUKU UTARA</p> <p>TVPM 200521213 - TERE - PARPUR KOMISI XI</p> <p>CLIP 00000 TC: 00:13 - 00:56</p> <p>"Terkait dengan agenda itu, di periode yang lalu kita sudah membahas itu, KUP itu. dan kita juga sudah minta masukan dari berbagai perguruan tinggi. itu kita sudah lakukan itu. ini kalau amnesty jilid 2 ini akan harus ditempuh, maka itu akan dilihat lagi kembali karena ini perkembangan 5 tahun yang lalu dengan sekarang tidak mungkin sama. itu jadi itu basic-nya sudah ada tinggal dikembangkan sesuai dengan perkembangan terkini."</p>	Tidak ada perubahan
Badan / isi berita 2	<p>LEBIH LANJUT/ ACHMAD HATARI MENYEBUT/ TAX AMNESTY PERLU DILAKUKAN UNTUK MENDORONG PENERIMAAN PAJAK TAHUN INI// PASALNYA/ ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA NEGARA ATAU APBN/ SUDAH BANYAK DIALOKASIKAN UNTUK PENANGANAN COVID SEMBILAN BELAS// SEMENTARA/ PANDEMI MASIH BELUM MEREDA/ SEHINGGA MASIH</p>	<p>// ACHMAD HATARI MENYEBUT/ TAX AMNESTY PERLU DILAKUKAN UNTUK MENDORONG PENERIMAAN PAJAK TAHUN INI// PASALNYA/ ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA NEGARA ATAU APBN/ SUDAH BANYAK DIALOKASIKAN UNTUK PENANGANAN COVID SEMBILAN BELAS// HATARI MENGATAKAN/ DEFISIT DAN UTANG</p>	Peringkasan isi berita tanpa mengurangi informasi

	<p>MEMBUTUHKAN DANA UNTUK PENANGANANNYA//</p> <p>SERTA/ DEFISIT DAN UTANG NEGARA JUGA DIUPAYAKAN BISA DITEKAN/ DENGAN PENERIMAAN DARI TAX AMNESTY JILID DUA INI// UNTUK ITU/ ACHMAD HATARI MENGAPRESIASI LANGKAH BERANI PEMERINTAH/ MELALUI KEMENTERIAN KEUANGAN KARENA MENGAMBIL KEBIJAKAN INI//</p>	<p>NEGARA DIUPAYAKAN BISA DITEKAN/ DENGAN PENERIMAAN DARI TAX AMNESTY JILID DUA INI//</p>	
SB/TC 2	<p>SB: ACHMAD HATARI/ WAKIL KETUA KOMISI XI / F-PNASDEM / MALUKU UTARA</p> <p>TVPM 200521213 - TERE - PARPUR KOMISI XI/ CLIP 00000 TC: 02:02 - 02:16</p> <p>"Covid saja sudah mengurus apbn kita, defisitnya, utangnya, bagaimana? Jadi memang, ibu menteri punya langkah-langkah yang sangat-sangat berani, itu harus diapresiasi."</p>	<p>SB: ACHMAD HATARI WAKIL KETUA KOMISI XI / F-PNASDEM / MALUKU UTARA</p> <p>TVPM 200521213 - TERE - PARPUR KOMISI XI</p> <p>CLIP 00000 TC: 02:02 - 02:16</p> <p>"Covid saja sudah mengurus apbn kita, defisitnya, utangnya, bagaimana? Jadi memang, ibu menteri punya langkah-langkah yang sangat-sangat berani, itu harus diapresiasi."</p>	Tidak ada perubahan
Ekor Berita	<p>PRESIDEN JOKO WIDODO TELAH BERSURAT KEPADA DPR/ MEMINTA RANCANGAN UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN/ ATAU RUU KUP/ UNTUK SEGERA DIBAHAS DI PARLEMEN// BEBERAPA</p>	[DIHAPUS]	Dihapus guna memenuhi syarat durasi naskah berita TV
Rep/Cam	<p>// THERESIA DAN DODI/ TVR PARLEMEN MELAPORKAN///</p>	<p>// THERESIA DAN DODI/ TVR PARLEMEN MELAPORKAN///</p>	Tidak ada perubahan

DESK / EDITOR NASKAH : KORKESTRA / FARKHAN FAJAR

Keterangan / Bagian	Naskah Asli	Naskah Hasil Editing	Perubahan
<i>Judul</i>	BURT PASTIKAN LAYANAN JAMKESTAMA BALI BERJALAN BAIK	BURT PASTIKAN LAYANAN JAMKESTAMA DI BALI BERJALAN BAIK	Penyesuaian dengan struktur EYD
<i>Lead</i>	// BURT DPR RI MENINJAU KESIAPAN RUMAH SAKIT SURYA HUSADA BALI/ DALAM MENYEDIKAKAN PELAYANAN KESEHATAN ANGGOTA DPR// BURT DPR RI MENDORONG PEMBARUAN DATA ANGGOTA DEWAN/ DAN MEKANISME PENDAFTARAN DIGITAL BISA DIMANFAATKAN LEBIH BAIK//	// BURT DPR RI MENINJAU KESIAPAN RUMAH SAKIT SURYA HUSADA BALI/ DALAM MENYEDIKAKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DPR DAN PENGGUNA LAYANAN JAMINAN KESEHATAN UTAMA/ ATAU JAMKESTAMA//	Penyesuaian dengan struktur kalimat berita yang lebih ringkas
<i>Badan / isi berita 1</i>	//DITEMUI USAI RAPAT KERJA DENGAN PERWAKILAN JASINDO BALI/ DAN RUMAH SAKIT SURYA HUSADA / DI KUTA/ BALI/ BARU – BARU INI/ WAKIL KETUA BURT DPR RI/ NOVITA WIJAYANTI MENILAI/ RUMAH SAKIT SURYA HUSADA SEBAGAI LOKASI KARANTINA DAN PERAWATAN PASIEN COVID-19/ MENJAGA AREA PELAYANAN UMUM TETAP STERIL/ DAN PELAYANAN PADA PASIEN UMUM DAPAT BERJALAN DENGAN MAKSIMAL// SETELAH DISKUSI/ NOVITA WIJAYANTI MENILAI/ RUMAH SAKIT SURYA HUSADA DAPAT MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN BAGI ANGGOTA DPR/ DAN PEJABAT NEGARA LAINNYA// NOVITA WIJAYANTI BERHARAP/ RUMAH SAKIT SURYA HUSADA BISA MERESPON CEPAT DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KESEHATAN PADA ANGGOTA DEWAN//	//DITEMUI USAI MENGGELAR PERTEMUAN DENGAN PERWAKILAN JASINDO BALI/ DAN DIREKSI RUMAH SAKIT SURYA HUSADA / DI KUTA/ BALI/ BARU – BARU INI/ WAKIL KETUA BURT DPR/ NOVITA WIJAYANTI MEMINTA PIHAK JASINDO MENJALIN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI LEBIH BAIK DENGAN RUMAH SAKIT PROVIDER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DPR DAN KELUARGANYA// NOVITA JUGA MEMINTA JASINDO DAPAT MEMINIMALISIR MASALAH YANG SERING TERJADI DI LAPANGAN/ KHUSUSNYA TERKAIT UPDATE DAN PROSES REGISTRASI YANG KERAP MEMAKAN WAKTU LAMA//	Peringkasan isi berita tanpa mengurangi informasi
<i>SB/TC 1</i>	SB: NOVITA WIJAYANTI	SB: NOVITA WIJAYANTI	Tidak ada perubahan

Badan / isi berita 2	<p>WAKIL KETUA BURT DPR RI/ FP-GERINDRA/ JATENG VIII TC: 00.14 – 00.53 FILE: TVPM 200521266 - MYTA - BURT BALI – 00052</p> <p>// kita harapkan kepada jasindo/ bisa memberikan sosialisasi juga// biasanya jasindo sosialisasi kepada kita/ kita juga sebagai perwakilan2 dari anggota/ dari 575 yang ada di burt juga/ biasanya menyampaikan juga/ sosialisasi pada teman2 yang ada di fraksinya/ jadi kalau perjalanannya ada lah ya/ yang mengalami kendala/ tetapi biasanya akan segera langsung dikomunikasikan denga pihak jasindo/ dengan rumah sakit/ sehingga kalau ada permasalahan bisa segera diambilkan solusinya/ supaya bisa tertangani dengan baik//</p>	<p>WAKIL KETUA BURT DPR RI/ F-GERINDRA/ JATENG VIII TC: 00.14 – 00.53 FILE: TVPM 200521266 - MYTA - BURT BALI – 00052</p> <p>// kita harapkan kepada jasindo/ bisa memberikan sosialisasi juga// biasanya jasindo sosialisasi kepada kita/ kita juga sebagai perwakilan dari anggota/ dari 575 yang ada di burt juga/ biasanya menyampaikan juga/ sosialisasi pada teman2 yang ada di fraksinya/ jadi kalau perjalanannya ada lah ya/ yang mengalami kendala/ tetapi biasanya akan segera langsung dikomunikasikan denga pihak jasindo/ dengan rumah sakit/ sehingga kalau ada permasalahan bisa segera diambilkan solusinya/ supaya bisa tertangani dengan baik//</p>	
	<p>// NOVITA WIJAYANTI MEMASTIKAN/ BURT SELALU MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN JASINDO/ UNTUK MEMBERIKAN MASUKAN DAN MELAKUKAN PEMBARUAN DATA / AGAR LAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA MEKANISMENYA BERJALAN DENGAN EFEKTIF DAN EFISIEN// NOVITA MENYADARI/ DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KESEHATAN HARUS SIGAP DAN CEPAT/ UNTUK MEMINIMALISIR RASA PANIK DAN SAKIT DI PIHAK PASIEN//</p>	<p>// NOVITA WIJAYANTI MEMASTIKAN/ BURT SELALU MENJALIN KOMUNIKASI DAN EVALUASI DENGAN PIHAK JASINDO/ UNTUK MEMBERIKAN MASUKAN DAN MELAKUKAN PEMBARUAN DATA ANGGOTA/ AGAR LAYANAN KESEHATAN JAMKESTAMA BERJALAN OPTIMAL// BURT DPR RI SECARA BERKALA MENINJAU FASILITAS DAN LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PROVIDER DI BERBAGAI DAERAH/ UNTUK MEMASTIKAN LAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DPR BERJALAN DENGAN EFEKTIF DAN EFISIEN//</p>	<p>Penghapusan informasi yang kurang perlu dan pemindahan ekor berita ke badan berita</p>

SB/TC 2	<p>SB: NOVITA WIJAYANTI WAKIL KETUA BURT DPR RI/ FP-GERINDRA/ JATENG VIII TC: 00.00 – 00.40 FILE: TVPM 200521266 - MYTA - BURT BALI – 00054 // sejauh ini sih secara keseluruhan sih udah ya sepanjang ini sudah lumayan/ walaupun ada aja yang kurang/ ada aja yang itu/ maka ini pentingnya kita selalu melaksanakan koordinasi dengan rapat2 langusng/ kemudian turun ke rumah sakit2 untuk melihat dan ada temuan2 apa/ sehingga saat ada temuan2 tersebut/ kita bisa bahas/ kalau memang tidak selesai di lapangan/ kita bahas poin2 tersebut di jakarta/ sehingga kita bisa panggil pihak2 yang terkait untuk bisa dicarikan / dikomunikasikan/ dicarikan solusinya yang terbaik//</p>	<p>SB: NOVITA WIJAYANTI WAKIL KETUA BURT DPR RI/ F-GERINDRA/ JATENG VIII TC: 00.00 – 00.40 FILE: TVPM 200521266 - MYTA - BURT BALI – 00054 // sejauh ini sih secara keseluruhan sih udah ya sepanjang ini sudah lumayan/ walaupun ada aja yang kurang/ ada aja yang itu/ maka ini pentingnya kita selalu melaksanakan koordinasi dengan rapat2 langusng/ kemudian turun ke rumah sakit2 untuk melihat dan ada temuan2 apa/ sehingga saat ada temuan2 tersebut/ kita bisa bahas/ kalau memang tidak selesai di lapangan/ kita bahas poin2 tersebut di jakarta/ sehingga kita bisa panggil pihak2 yang terkait untuk bisa dicarikan / dikomunikasikan/ dicarikan solusinya yang terbaik//</p>	Tidak ada perubahan
Ekor Berita	<p>// DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN / BURT DPR RI SECARA BERKALA MENINJAU FASILITAS DAN LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PROVIDER DI DAERAH/ UNTUK MEMASTIKAN LAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA DPR BERJALAN DENGAN EFEKTIF DAN EFISIEN//</p>	[DIHAPUS]	Dipindahkan ke badan berita
Rep/Cam	<p>// DARI KUTA/ BALI/ AMMYTA PRADITA/ TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//</p>	<p>// DARI BALI/ AMMYTA PRADITA/ TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//</p>	Peringkasan isi berita tanpa mengurangi informasi

DESK / EDITOR NASKAH : NASIONAL / DWI AYU LESTARI

Keterangan / Bagian	Naskah Asli	Naskah Hasil Editing	Perubahan
<i>Judul</i>	TIMWAS PMI DORONG PEMERINTAH BERKOORDINASI PULANGKAN PMI DARI MALAYSIA	TIMWAS PMI DORONG PEMERINTAH KOORDINASI PULANGKAN PMI DARI MALAYSIA	Tidak ada perubahan
<i>Lead</i>	//TIM PENGAWAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA ATAU TIMWAS PPMI MENDORONG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN ATAU KEMENKO PMK DAN 8 KEMENTERIAN SERTA 3 LEMBAGA TERKAIT UNTUK MENGUATKAN KOLABORASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERKAIT RENCANA PEMULANGAN 7.300 PMI DARI MALAYSIA YANG DILAKUKAN SECARA BERTAHAP PADA JUNI HINGGA JULI TAHUN 2021//	// TERKAIT RENCANA PEMULANGAN 7.300 PMI DARI MALAYSIA/ SECARA BERTAHAP PADA JUNI HINGGA JULI TAHUN 2021// TIM PENGAWAS TERHADAP PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ ATAU TIMWAS PPMI DPR RI/ MENDORONG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN ATAU KEMENKO PMK/ BERSERTA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT/ SEGERA MENGUATKAN KOLABORASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTORNYA //	Penyesuaian struktur kalimat sesuai EYD dan bahasa berita (straight word)
<i>Badan / isi berita 1</i>	//DITEMUI USAI MEMIMPIN RAPAT TIMWAS PMI DENGAN 8 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA TERKAIT PEMULANGAN PMI DARI MALAYSIA/ DI GEDUNG NUSANTARA DUA SENAYAN JAKARTA/ WAKIL KETUA KOMISI SEMBILAN DPR RI/ NIHAYATUL WAFIROH MENDORONG AGAR PEMULANGAN PMI HARUS SEGERA DILAKSANAKAN WALAUPUN MALAYSIA SEDANG LOCKDOWN// NIHAYATUL MEMINTA PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN SINERGI DAN KOORDINASI UNTUK MELAKUKAN HAL TERSEBUT/ DIANTARANYA KELENGKAPAN DATA PMI/ KESEHATANNYA HINGGA PEKERJAAN PMI PASCA TIBA DI INDONESIA//	// DITEMUI USAI MEMIMPIN RAPAT TIMWAS PPMI/ DI GEDUNG NUSANTARA DUA DPR RI/ WAKIL KETUA KOMISI SEMBILAN DPR RI/ NIHAYATUL WAFIROH MENGATAKAN/ PEMULANGAN PMI HARUS SEGERA DILAKSANAKAN/ MESKI MALAYSIA SEDANG MENJALANI LOCKDOWN // NIHAYATUL MENDESAK PEMERINTAH BERSINERGI DAN BERKOORDINASI DALAM PELAKSANAANNYA/ DIANTARANYA SOAL KELENGKAPAN DATA DAN KESEHATAN PMI/ HINGGA PEKERJAAN PMI PASCA TIBA DI INDONESIA//	Penyesuaian struktur kalimat sesuai EYD dan bahasa berita (straight word) dan Penghapusan informasi yang kurang perlu

SB/TC 1	<p>SB: NIHAYATUL WAFIROH WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI/ F-PKB/ JATIM III TC: 01:26 - 02:18 / 0067 /06. JUNI\2\TVPM 020621247 - MAHIR - PANWAS PPMI</p> <p>01:26 YANG PENTING LAGI SETELAH 7300 INI PULANG INI NEXTNYA DI INDO MAU SEPERI APA KRNA KITA SENDIRI TAU EKONOMI DI DUNIA JATUH BUKAN SAJA DI INDO KITA TAU TINGKAT PENGANGURAN DI INDO SEDANG TINGGI NANTI ADA TAMBAHAN LAGI PURNA PMI INI YG PULANG DARI MALAYSIA INI HARUS SEPerti APA BETUL2 PEKERJAAN YG LUAR BIASA INI DARI SELURUH SEKTOR UTK MEMASTIKAN MULAI DARI KEPULANGANNYA, DATANYA, SISI KESEHATANNYA PASCANYA KEHIDUPAN MREKA DISINI SEPerti APA PENTING JUGA BPJS KETENAGAKERJAAN TADI UTK BISA MENGCover PEKERJAANNYA ATAU HAK2 MREKA YG BISA DIBERIKAN TAPI SALAHNYA KITA MASIH ADA PMI YG DOKUMENTED DAN UNDOCUMENTED 02:18</p>	<p>NIHAYATUL WAFIROH ANGGOTA TIMWAS PPMI DPR RI / F-PKB/ JATIM III TC: 01:26 - 02:18 / 0067 /06. JUNI\2\TVPM 020621247 - MAHIR - PANWAS PPMI Yang penting lagi setelah 7300 ini pulang ini nextnya di indo mau seperi apa krna kita sendiri tau ekonomi di dunia jatuh bukan saja di indo kita tau tingkat penganguran di indo sedang tinggi nanti ada tambahan lagi purna pmi ini yg pulang dari malaysia ini harus seperti apa betul2 pekerjaan yg luar biasa ini dari seluruh sektor utk memastikan mulai dari kepulangannya, datanya, sisi kesehatannya pascanya kehidupan mreka disini seperti apa penting juga bpjs ketenagakerjaan tadi utk bisa mengcover pekerjaannya atau hak2 mreka yg bisa diberikan tapi salahnya kita masih ada pmi yg dokumented dan undocumented</p>	Tidak ada perubahan
Badan / isi berita 2	<p>//SEMENTARA ITU ANGGOTA TIMWAS PMI/ EDY WURYANTO MEMINTA PEMERINTAH UNTUK HADIR DALAM PEMULANGAN PMI DARI MALAYSIA// EDY JUGA MEMINTA PEMERINTAH MELAKUKAN LOBI DIPLOMATIK DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA UNTUK MENINDAKLANJUTI LAPORAN BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ATAU BP2MI TERKAIT KEKERASAN YANG DIALAMI PMI DI MALAYSIA//</p>	<p>// SEMENTARA ITU ANGGOTA TIMWAS PMI/ EDY WURYANTO MEMINTA PEMERINTAH UNTUK HADIR DALAM PEMULANGAN PMI DARI MALAYSIA// PEMERINTAH HARUS MELAKUKAN LOBI DIPLOMATIK DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA/ GUNA MENINDAKLANJUTI LAPORAN BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ATAU BP2MI TERKAIT</p>	Tidak ada perubahan

		KEKERASAN YANG DIALAMI PMI DI MALAYSIA //	
SB/TC 2	<p>SB: EDY WURYANTO ANGGOTA TIMWAS DPR RI/ F-PDIP/ JATENG III TC: 00:40 - 01:36 / 0065 /06. JUNI\2\TVPM 020621247 - MAHIR - PANWAS PPMI</p> <p>00:40 KITA MELIHAT MASALAH INI PENTING DAN URGENT MAKA NEGARA HARUS HADIR, HARI INI KITA KETEMU DAN SECARA UMUM MENKO PMK TELAH BERKOORDINASI DENGAN 8 KEMENTERIAN DAN 3 LEMBAGA ITU, TAPI TENTU KITA MELIHAT INI PERSOALAN KOMPLEK, UNTUK ITU PRESIDEN HRUS BERKOORDINASI DG PERDANA MENTERI, MENKO HRUS AKTIF MENLU HRUS MELAKUKAN LOBBY2 DIPLOMATIK KPDA MALAYSIA/ LAPORAN DARI BM2PMI BANYAK KEKERASAN, BANYAK PERAMPASAN, BAHKAN SUDAH MENYANGKUT PELECEHAN NEGARA INI YG SAYA KHAWATIRKAN, TIDAK BOLEH TERJADI KRNA BAGAIMANAPUN JUGA 7300 ITU MENYANGKUT RAKYAT KITA YG BNYAK DAN MREKA MEMBUTUHKAN KITA HADIR DAN HARI INI KITA KOORDINASIKAN SEMUA 01:36</p>	<p>EDY WURYANTO ANGGOTA TIMWAS PPMI DPR RI/ F-PDIP/ JATENG III TC: 00:40 - 01:36 / 0065 /06. JUNI\2\TVPM 020621247 - MAHIR - PANWAS PPMI Kita melihat masalah ini penting dan urgent maka negara harus hadir, hari ini kita ketemu dan secara umum menko pmk telah berkoordinasi dengan 8 kementerian dan 3 lembaga itu, tapi tentu kita melihat ini persoalan komplek, untuk itu presiden hrus berkoordinasi dg perdana menteri, menko hrus aktif menlu hrus melakukan lobby2 diplomatik kpda malaysia/ laporan dari bm2pmi banyak kekerasan, banyak perampasan, bahkan sudah menyangkut pelecehan negara ini yg saya khawatirkan, tidak boleh terjadi krna bagaimanapun juga 7300 itu menyangkut rakyat kita yg bnyak dan mreka membutuhkan kita hadir dan hari ini kita koordinasikan semua</p>	Tidak ada perubahan
Ekor Berita	//TERKAIT JUMLAH PMI SEBANYAK 7.300 YANG AKAN PULANG SAAT INI MASIH DALAM PROSES PENDATAAN DI SELURUH TAHANAN IMIGRASI DI MALAYSIA// PENDATAAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA ANTARA DISNAKER/ DINKES DAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BP2MI//	//SEJUMLAH 7.300 PMI YANG AKAN PULANG/ SAAT INI MASIH DALAM PROSES PENDATAAN DI SELURUH TAHANAN IMIGRASI MALAYSIA// PENDATAAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA ANTARA DISNAKER/ DINKES DAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BP2MI //	Penyesuaian dengan struktur kalimat berita yang lebih ringkas
Rep/Cam	//MAHIR DAN RIFKI/ TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//	//MAHIR DAN RIFKI/ TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//	Tidak ada perubahan

DESK / EDITOR NASKAH : KORPOLKAM / SUPRIYANTO DONI

Keterangan / Bagian	Naskah Asli	Naskah Hasil Editing	Perubahan
<i>Judul</i>	PEMERATAAN JARINGAN DI WILAYAH NON 3T	PEMERATAAN JARINGAN DI WILAYAH NON 3T	Tidak ada perubahan
<i>Lead</i>	//MASIH MEMILIKI BANYAK DAERAH BLANK SPOT/ KOMISI SATU DPR RI DORONG PEMERINTAH UNTUK MEMPERHATIKAN PENGEMBANGAN JARINGAN DI WILAYAH 3T DAN WILAYAH NON 3T DI SELURUH INDONESIA//	// TERKAIT MASIH BANYAK DAERAH BLANK SPOT/ KOMISI SATU DPR RI DORONG PEMERINTAH UNTUK MEMPERHATIKAN PENGEMBANGAN JARINGAN DI WILAYAH 3T / DAN WILAYAH NON 3T DI SELURUH INDONESIA//	Penyesuaian struktur kalimat sesuai bahasa berita (straight word)
<i>Badan / isi berita 1</i>	//KOMISI SATU DPR RI MENGGELAR RAPAT KERJA BERSAMA KOMINFO/ DENGAN PEMBAHASAN TERKAIT PERCEPATAN PEMERATAAN JARINGAN DI WILAYAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL ATAU 3T// DALAM RAPAT TERSEBUT KOMISI SATU MENEGASKAN/ PEMERINTAH HARUS MENYUSUN KEBIJAKAN STRATEGIS UNTUK PENANGANAN DAN PEMERATAAN JARINGAN// PASALNYA/ UNTUK MENJALANKAN PROGRAM INI/ KOMINFO MEMINTA PENAMBAHAN ANGGARAN HINGGA DUA PULUH TRILIUN RUPIAH// ANGGOTA KOMISI SATU KRESNA DEWANATA PHROSAKH MENYAMPAIKAN/ KOMISI SATU AKAN MENDUKUNG HAL TERSEBUT/ ASAL TARGET MERDEKA SINYAL DI 2022 DAPAT DIPENUHI PEMERINTAH//	// DALAM RAPAT ANTARA KOMISI SATU DPR RI / DENGAN KOMINFO / KOMISI SATU MENEGASKAN/ PEMERINTAH HARUS MENYUSUN KEBIJAKAN STRATEGIS UNTUK PENANGANAN DAN PEMERATAAN JARINGAN// PASALNYA/ UNTUK MENJALANKAN PROGRAM INI/ KOMINFO MEMINTA PENAMBAHAN ANGGARAN HINGGA DUA PULUH TRILIUN RUPIAH// // ANGGOTA KOMISI SATU / KRESNA DEWANATA PHROSAKH MENYAMPAIKAN/ KOMISI SATU AKAN MENDUKUNG HAL TERSEBUT/ ASAL TARGET MERDEKA SINYAL DI 2022 DAPAT DIPENUHI PEMERINTAH//	Peringkasan isi berita tanpa mengurangi informasi
<i>SB/TC 1</i>	SB : KRESNA DEWANATA PHROSAKH/ ANGGOTA KOMISI I/ F-PNASDEM/ JATIM V TC : 00:00:04 - 00:00:18 / TVPM 080621254 - FILE 00039	SB : KRESNA DEWANATA PHROSAKH ANGGOTA KOMISI I/ F-PNASDEM/ JATIM V TC : 00:00:04 - 00:00:18 / TVPM 080621254 - FILE 00039	Tidak ada perubahan

	<p><i>"komisi 1 akan mendukung terkait dengan program-program kominfo untuk menyelesaikan sinyal sinyal yang lemah di seluruh jaringan di wilayah 3T. pastinya dengan penambahan anggaran yang sangat luar biasa kita berharap bahwa itu segera diselesaikan."</i></p>	<p><i>"komisi 1 akan mendukung terkait dengan program-program kominfo untuk menyelesaikan sinyal sinyal yang lemah di seluruh jaringan di wilayah 3T. pastinya dengan penambahan anggaran yang sangat luar biasa kita berharap bahwa itu segera diselesaikan."</i></p>	
Badan / isi berita 2	<p>//ANGGOTA KOMISI SATU YAN PERMENAS MANDENAS MENEGASKAN/ PEMERINTAH JUGA HARUS MEMPERHATIKAN WILAYAH NON 3T YANG TERNYATA MASIH MEMILIKI BANYAK DAERAH BLANK SPOT// YAN MENEGASKAN/ RENCANA PEMERINTAH UNTUK MELUNCURKAN JARINGAN 5G DALAM BEBERAPA WAKTU KEDEPAN AKAN SIA-SIA/ JIKA PERSOALAN MENDASAR SEPERTI PEMBENAHAN DAN PEMERATAAN JARINGAN 4G MASIH BELUM DAPAT TERATASI// YAN MENGHIMBAU/ PEMERINTAH MELAKUKAN MAPPING DAN EVALUASI/ GUNA PERCEPATAN PENYEDIAAN AKSES LAYANAN INTERNET DAN TELEKOMUNIKASI YANG MEMADAI//</p>	<p>// SEMENTARA ITU / ANGGOTA KOMISI SATU YAN PERMENAS MANDENAS MENEGASKAN/ PEMERINTAH JUGA HARUS MEMPERHATIKAN WILAYAH NON 3T YANG TERNYATA MASIH MEMILIKI BANYAK DAERAH BLANK SPOT//</p>	<p>Peringkasan isi berita tanpa mengubah substansi berita</p>
SB/TC 2	<p>SB : YAN PERMENAS MANDENAS/ ANGGOTA KOMISI I/ F-PGERINDRA/ PAPUA TC : 00:01:01 - 00:01:16 / TVPM 080621254 - FILE 00040 dan 00:01:59 - 00:02:11 / TVPM 080621254 - FILE 00040</p> <p><i>"harapan kita dari hasil evaluasi dan monitoring yang sudah dilakukan oleh komisi 1 ke daerah-daerah di non 3t dan daerah-daerah 3 t, maka kita minta untuk menteri kominfo dan jajarannya melakukan mapping"</i></p>	<p>SB : YAN PERMENAS MANDENAS ANGGOTA KOMISI I/ F-PGERINDRA/ PAPUA TC : 00:01:01 - 00:01:16 / TVPM 080621254 - FILE 00040 dan 00:01:59 - 00:02:11 / TVPM 080621254 - FILE 00040</p> <p><i>"harapan kita dari hasil evaluasi dan monitoring yang sudah dilakukan oleh komisi 1 ke daerah-daerah di non 3t dan daerah-daerah 3 t, maka kita minta untuk menteri kominfo dan jajarannya melakukan mapping"</i></p>	<p>Tidak ada perubahan</p>

	<i>"kemudian lakukan evaluasi secara bertahap, sebelum kita masuk dalam proyek nasional, yaitu pemasangan jaringan 5G."</i>	<i>"kemudian lakukan evaluasi secara bertahap, sebelum kita masuk dalam proyek nasional, yaitu pemasangan jaringan 5G."</i>	
<i>Ekor Berita</i>	//KOMISI SATU DPR RI BERHARAP/ PEMERINTAH DAPAT SEGERA MEREALISASIKAN PERCEPATAN PEMERATAAN JARINGAN DI SELURUH INDONESIA/ GUNA MENDUKUNG AKTIVITAS EKONOMI MAUPUN PARIWISATA DAERAH//	//KOMISI SATU DPR RI BERHARAP/ PEMERINTAH DAPAT SEGERA MEREALISASIKAN PERCEPATAN PEMERATAAN JARINGAN DI SELURUH INDONESIA/ GUNA MENDUKUNG AKTIVITAS EKONOMI MAUPUN PARIWISATA DAERAH//	Tidak ada perubahan
<i>Rep/Cam</i>	//ELISA DAN TEGUH/ TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//	//ELISA DAN TEGUH/ TVR PARLEMEN/ MELAPORKAN//	Tidak ada perubahan

DESK / EDITOR NASKAH : KORINBANG / M. MARLINA TAMPUBOLON

Keterangan / Bagian	Naskah Asli	Naskah Hasil Editing	Perubahan
<i>Judul</i>	PROGRAM BANPRES USAHA MIKRO HARUS DILANJUTKAN	PROGRAM BANPRES USAHA MIKRO HARUS DILANJUTKAN	Tidak ada perubahan
<i>Lead</i>	// UNTUK MENGATASI BANYAKNYA RITEL BESAR YANG TUTUP / YANG BERPOTENSI BERDAMPAK KEPADA MELAMBATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PENGANGGURAN / KOMISI VI DPR RI MENDORONG PROGRAM BANTUAN PRESIDEN BAGI USAHA ULTRA MIKRO SERTA INDUSTRI PADA TAHUN ANGGARAN 2022 TETAP DILANJUTKAN BAHKAN PERLU DITINGKATKAN //	//UNTUK MENGATASI DAMPAK BANYAKNYA RITEL BESAR YANG SUDAH TUTUP TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI// KOMISI ENAM DPR RI MENDORONG/ PROGRAM BANTUAN PRESIDEN BAGI USAHA ULTRAMIKRO DAN INDUSTRI TETAP DILANJUTKAN DI TAHUN 2022/ BAHKAN PERLU DITINGKATKAN //	Penyesuaian struktur kalimat sesuai EYD dan bahasa berita (straight word)
<i>Badan / isi berita 1</i>	// DITEMUI DI SELA-SELA RAPAT KERJA KOMISI VI DENGAN KEMENTERIAN UMKM / WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI / MARTIN Y MANURUNG MENYATAKAN PREDIKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DI TAHUN 2021 PERLU DIEVALUASI DAN DILIHAT SESUAI DENGAN FAKTA YANG TERJADI // MENURUTNYA DATA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG ADA BERBANDING TERBALIK DENGAN BANYAKNYA RITEL-RITEL BESAR YANG TUTUP / HAL INI MENANDAKAN TEKANAN EKONOMI MASIH SANGAT TINGGI DAN BELANJA MASYARAKAT BELUM BERJALAN DENGAN BAIK //	//DI GEDUNG NUSANTARA I DPR RI JAKARTA/ WAKIL KETUA KOMISI ENAM DPR RI MARTIN MANURUNG MENILAI/ DATA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG ADA BERBANDING TERBALIK DENGAN BANYAKNYA RITEL-RITEL BESAR YANG TUTUP// HAL INI MENUNJUKAN TEKANAN EKONOMI MASIH SANGAT TINGGI/ DAN TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT BELUM BERJALAN BAIK// PEMERINTAH DIMINTA MELANJUTKAN PROGRAM STIMULUS TERHADAP DUNIA USAHA//	Penyesuaian struktur kalimat sesuai EYD dan bahasa berita (straight word) dan Penghapusan informasi yang kurang perlu

	ANGGARAN 2022 / BANTUAN KEPADA UMKM PERLU DITINGKATKAN //		
SB/TC 1	<p>SB : MARTIN Y MANURUNG WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI / F-NASDEM / DAPIL SUMUT II TC : 0:00:50 – 0:01:59. CLIP 00058 “ PADA SAAT YANG SAMA KETIKA KITA MEMPREDIKSI PERTUMBUHAN EKONOMI POSITIF BANYAK JUGA RETAIL YANG TUTUP, INI AGAK ANEH, DATA MENUNJUKAN PERTUMBUHAN POSITIF TAPI RETAIL TUTUP, MENURUT SAYA MENDUKUNG PROGRAM BANPRES UNTUK USAHA MIKRO TETAP DILANJUTKAN KARENA MELIHAT FENOMENA TUTUP RETAIL BERARTI TEKANAN EKONOMI CUKUP KUAT, PROGRAM BPUM ADA DI ANGGARAN 2022 ”</p>	<p>SB : MARTIN MANURUNG WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI/ F-PNASDEM / SUMUT II TC : 0:00:50 – 0:01:59. CLIP 00058 TVPM 310521274 “pada saat yang sama ketika kita memprediksi pertumbuhan ekonomi positif banyak juga retail yang tutup, ini agak aneh, data menunjukkan pertumbuhan positif tapi retail tutup, menurut saya mendukung program banpres untuk usaha mikro tetap dilanjutkan karena melihat fenomena tutup retail berarti tekanan ekonomi cukup kuat, program bpum ada di anggaran 2022 ”</p>	Revisi SB dan TC
Badan / isi berita 2	// SEMENTARA ITU / ANGGOTA KOMISI VI DPR RI / MUKHTARUDIN MENDORONG PEMERINTAH MEMBERIKAN STIMULUS TERHADAP INDUSTRI RITEL / PENGURANGAN PAJAK DAN LISTRIK AKAN MEMBANTU INDUSTRI UNTUK TETAP BERTAHAN HIDUP / MENURUTNYA HAL INI JUGA UNTUK MENCEGAH ADANYA PHK MASSAL //	//ANGGOTA KOMISI ENAM DPR RI MUKHTARUDIN MENDORONG PEMERINTAH MEMBERIKAN STIMULUS TERHADAP INDUSTRI RITEL/ DENGAN PENGURANGAN PAJAK DAN LISTRIK/ SEHINGGA MEMBANTU RITEL BERTAHAN// DI SISI LAIN/ KEGIATAN RETAIL SANGAT BERGANTUNG PADA TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT// BANSOS BAGI MASYARAKAT DIMINTA TIDAK DIHENTIKAN/ AGAR MENDORONG DAYA BELI DAN KONSUMSI MASYARAKAT//	Penyesuaian struktur kalimat sesuai EYD dan bahasa berita (straight word) dan Penghapusan informasi yang kurang perlu
SB/TC 2	<p>SB : MUKHTARUDIN ANGGOTA KOMISI VI DPR RI / F-PG / DAPIL KALTENG TC : 0:01:19 – 0:02:07, CLIP 00001</p>	<p>SB : MUKHTARUDIN ANGGOTA KOMISI VI DPR RI/ F-PG/ KALTENG TC : 0:01:19 – 0:02:07, CLIP 00001</p>	Tidak ada perubahan

	<p>“ PEMERINTAH TENTU KEMBALI DALAM ANGGARAN 2022 TENTU AKAN MENJADI, MENEKANKAN PENTINGNYA INSENTIF KEMBALI KEPADA INUDSTRI DAN RETAIL, PEMERINTAH MENYIAPKAN INSENTIF KALAU TIDAK MAU TERJADI PHK, STIMULUS KEPADA INDUSTRI RETAIL, TOH JIKA TERJADI PEMERINTAH HARUS MENYIAPKAN BELANJA SOSIAL, PEMERINTAH HARUS TURUN TANGAN, KALAU TIDAK MEMBUAT GEJOLAK SOSIAL YANG TIDAK BAIK BAGI KONDISI STABILITAS NASIONAL KITA ”</p>	<p>“pemerintah tentu kembali dalam anggaran 2022 tentu akan menjadi, menekankan pentingnya insentif kembali kepada inudstri dan retail, pemerintah menyiapkan insentif kalau tidak mau terjadi phk, stimulus kepada industri retail, toh jika terjadi pemerintah harus menyiapkan belanja sosial, pemerintah harus turun tangan, kalau tidak membuat gejolak sosial yang tidak baik bagi kondisi stabilitas nasional kita ”</p>	
<i>Ekor Berita</i>	<p>// MENURUT ANGKA INDIKATOR DI TAHUN 2020 DALAM SEMBILAN BULAN SEKITAR 1200 TOKO TUTUP. SEMETARA PERIODE JANUARI SAMPAI MARET TERCATAT SEKITAR 90 TOKO RITEL TUTUP. JADI SAMPAI SAAT INI SUDAH HAMPIR 1300 TOKO RITEL TUTUP DI SELURUH INDONESIA DAN SUDAH MENCAKUP RITEL BESAR SEPERTI GIANT, MATAHARI DAN CENTRO //</p>	<p>//DI TAHUN 2020/ SEKITAR 1200 TOKO TUTUP// SEMENTARA SEJAK JANUARI 2021/ TERCATAT SEKITAR 90 TOKO RITEL TUTUP DI SELURUH INDONESIA/ MENCAKUP RITEL BESAR SEPERTI GIANT/ MATAHARI/ DAN CENTRO//</p>	<p>Penyesuaian dengan struktur kalimat berita yang lebih ringkas</p>
<i>Rep/Cam</i>	<p>// HILMAN DAN RIZKY / TVR PARLEMEN MELAPORKAN //</p>	<p>// HILMAN DAN RIZKY / TVR PARLEMEN MELAPORKAN //</p>	<p>Tidak ada perubahan</p>

KONTINUITAS BERITA SETELAH PELAKSANAAN AKTUALISASI

Tanggal Berita	Isu	Naskah Berita	Kontinuitas yang Terbangun
25/05/2021	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	<p>// DPR RI MENDORONG PEMERINTAH LEBIH BERHATI-HATI/ DALAM MENENTUKAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI/ DAN MENENTUKAN KEBIJAKAN KERANGKA EKONOMI MAKRO/ SERTA KEBIJAKAN FISKAL PADA RAPBN TAHUN 2022//</p> <p>// DITEMUI PADA RAPAT PARIPURNA/ PENYAMPAIAN PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI ATAS PENYAMPAIAN PEMERINTAH/ TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN TAHUN ANGGARAN 2022/ DI GEDUNG NUSANTARA II DPR RI/ SENAYAN/ JAKARTA/ ANGGOTA KOMISI XI / ECKY AWAL MUCHARAM MENYAMPAIKAN/ CAPAIAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DI KWARTAL PERTAMA TAHUN 2021 BELUM MEMENUHI TARGET RAPBN TAHUN 2021/ DAN MASIH NEGATIF// ECKY MENGINGATKAN PEMERINTAH/ LEBIH BERHATI-HATI DALAM MENENTUKAN TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI/ SEHINGGA DAPAT MENENTUKAN KEBIJAKAN YANG LEBIH EFISIEN DAN MASUK AKAL/ SESUAI DENGAN KEADAAN NEGARA SAAT INI//</p> <p>// ECKY MENAMBAHKAN/ TAHUN 2022 DISEBUT DAPAT MENJADI MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA KEDEPANNYA// OLEH KARENA ITU PEMERINTAH DIHARAPKAN DAPAT SEGERA MENEMUKAN/ DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL YANG BARU/ SEHINGGA DAPAT SEGERA MEMECAHKAN MASALAH PEREKONOMIAN/ DAN MENCAPAI TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DI TAHUN 2022//</p>	<p>Berikut merupakan berita awal yang menginformasikan bahwa pada rapat paripurna 25 Mei 2021 sedang fokus pada pembahasan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p>

31/05/2021	Konsumsi Domestik dan Pertumbuhan Ekonomi	<p>//DPR RI OPTIMIS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DI TAHUN 2022//</p> <p>//DITEMUI USAI RAPAT PARIPURNA DENGAN MENTERI EKONOMI TERKAIT PEMBAHASAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK KEBIJAKAN FISKAL RAPBN/ KETUA BADAN ANGGARAN DPR RI MENGATAKAN/ KONSUMSI RUMAH TANGGA, INVESTASI, SERTA EKSPOR/ MENJADI KUNCI DALAM PEMBENTUKAN PERTUMBUHAN EKONOMI// IA OPTIMIS/ KETIGA FAKTOR TERSEBUT AKAN MENGALAMI PENINGKATAN DI 2022// MENURUTNYA KONSUMSI RUMAH TANGGA HARUS BERTUMBUH HINGGA 5.2 PERSEN/ AGAR TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DIATAS 5.2 PERSEN BISA TERCAPAI//</p> <p>// SAID MENGATAKAN/ KONDISI DI KUARTAL SATU 2021/ PEN SUDAH MENUNJUKKAN PERTUMBUHANNYA DENGAN TERKONTRAKSI 0,74 PERSEN// SAID MENILAI/ PADA KUARTAL KEDUA ANGKA TERSEBUT BISA BERTUMBUH HINGGA 6.5 PERSEN// SAID MENEKANKAN/ TIDAK ADA ALASAN UNTUK TIDAK OPTIMIS TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI TAHUN DEPAN//</p>	<p>Berita selanjutnya memperlihatkan bahwa DPR RI optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan memberi usul kepada pemerintah untuk memfokuskan peningkatan konsumsi domestik.</p>
03/06/2021	Pertumbuhan ekonomi di Masa Pandemi	<p>//PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA YANG MASIH MENGALAMI KONTRAKSI SEBESAR 0,74 PERSEN//</p> <p>// WAKIL KETUA KOMISI SEBELAS/ FATHAN MENGATAKAN/ KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL/ YANG SEBAGIAN BESAR DIGUNAKAN UNTUK MENDORONG KONSUMSI DAN DAYA BELI MASYARAKAT/ DINILAI MASIH PERLU DITINGKATKAN EFEKTIVITAS NYA/ NAMUN BEGITU/ FATHAN TETAP OPTIMISTIS TARGET TERSEBUT BISA TERCAPAI//</p> <p>// WAKIL KETUA KOMISI SEBELAS/ AMIR USKARA MENGATAKAN/ TARGET PEMERINTAH SOAL PERTUMBUHAN EKONOMI KUARTAL DUA SEBESAR TUJUH PERSEN/ MASIH DIRASA SULIT TERCAPAI// AMIR MEMINTA PEMERINTAH/ MENGAJAI KEMBALI TARGET TERSEBUT/</p>	<p>Berita selanjutnya menjelaskan bahwa anggota DPR RI (dari fraksi dan komisi berbeda dengan berita sebelumnya) sepakat bahwa perlu didorong konsumsi domestik, meskipun ada tantangan ditengah pandemi.</p>

MELIHAT SAAT INI SITUASI PANDEMI YANG MASIH TERUS
MEMBAYANGI//

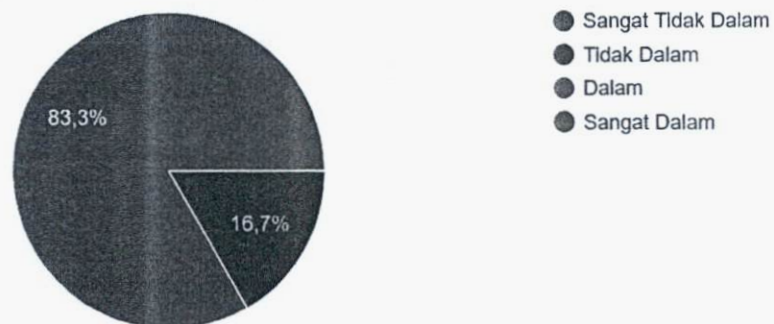
07/06/2021	Fasilitas Kredit untuk Pertumbuhan Ekonomi	<p>//TREN EKONOMI MULAI MENINGKAT/ KOMISI SEBELAS DPR RI MINTA PERBANKAN TINGKATKAN FASILITAS KREDIT//</p> <p>//DITEMUI DI GEDUNG DPR RI/ SENAYAN JAKARTA/ WAKIL KETUA KOMISI SEBELAS DPR RI/ DOLFIE O-F-P MENYAMPAIKAN/ SUDAH ADA KECENDERUNGAN PEMBALIKAN KONDISI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA// KONDISI PERTUMBUHAN EKONOMI KUARTAL PERTAMA 2021 BERADA DI ANGKA MINUS NOL KOMA TUJUH PERSEN/ DINILAI SUDAH MEMBAIK/ DIBANDINGKAN DENGAN KONDISI KUARTAL TIGA DAN EMPAT TAHUN LALU/ DI ANGKA MINUS TIGA LALU DILANJUT MINUS DUA PERSEN//</p> <p>//ANGGOTA KOMISI SEBELAS ANDREAS EDDY SUSETYO MENILAI/ RESTRUKTURISASI SUDAH BANYAK MEMBANTU PERPUTARAN ARUS KAS DI DUNIA USAHA// PEMERINTAH JUGA MEMILIKI PERAN PENTING DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN MONETER/ GUNA MENINGKATKAN PERMINTAAN KREDIT OLEH MASYARAKAT//</p>	<p>Berita selanjutnya menjelaskan anggota DPR RI optimis akan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memberikan saran kepada pemerintah untuk memfokuskan peningkatan fasilitas kredit.</p>
------------	---	---	--

Hasil Kuesioner

Dalam mengevaluasi pelaksanaan penerapan gagasan “pembagian bidang kajian isu tim editor naskah” guna mengoptimalkan substansi naskah berita di TV Parlemen, penulis membuat kuesioner penilaian yang dibagikan kepada tim editor naskah selaku *stakeholders*. Berikut merupakan hasil dari kuesioner tersebut :

Seberapa dalam substansi isu yang dihasilkan oleh editor setelah adanya pembagian desk editor naskah?

6 jawaban



Substansi naskah : 5 dari 6 responden (83.3%) menilai bahwa pembagian bidang kajian isu telah membentuk substansi naskah berita yang **dalam**. Responden menilai pembagian bidang kajian isu memberikan manfaat seperti fokus penguasaan isu yang membantu editor naskah dalam menghasilkan substansi naskah yang dalam.

Namun 1 responden (16.7%) menilai substansi naskah masih belum mendalam meskipun sudah ada pembagian bidang kajian isu. Responden menilai reporter lebih memiliki peranan dalam membentuk substansi naskah yang baik dibandingkan editor naskah.

Seberapa besar penguasaan isu desk terkait oleh editor setelah adanya pembagian desk editor naskah?

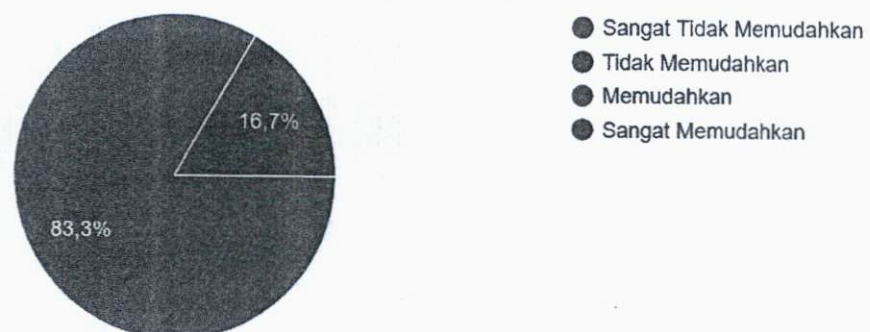
6 jawaban



Penguasaan Isu : Substansi naskah yang dalam didukung oleh terbentuknya penguasaan isu pada tim editor naskah. Berdasarkan survey, 3 dari 6 responden (50%) menilai bahwa pembagian desk membentuk penguasaan isu yang **besar** bagi editor naskah, karena editor naskah dapat fokus dalam mengedit isu. 2 dari 6 responden (33.3%) menilai pembagian desk memberikan penguasaan isu yang **sangat besar**. Responden menilai hal tersebut membentuk penguasaan isu yang lebih luas kepada editor naskah dan mengetahui perkembangan isu. Sementara 1 responden (16.7%) menilai peran pembagian desk dalam membentuk penguasaan isu masih kecil karena berjalannya program ini masih dalam kurun waktu yang singkat, sehingga belum membentuk penguasaan isu yang optimal.

Seberapa mudah proses penyuntingan naskah setelah adanya pembagian desk editor naskah?

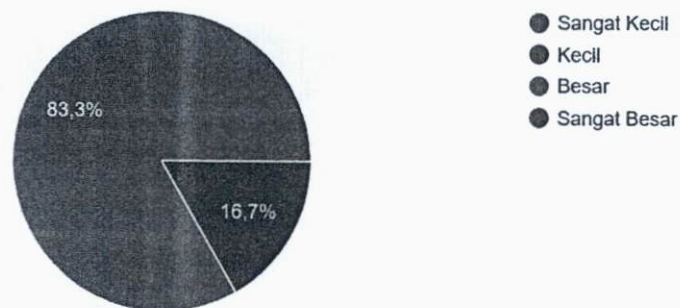
6 jawaban



Proses Penyuntingan Naskah : 5 dari 6 responden (83.3%) menilai bahwa pembagian desk memberikan kemudahan dalam proses penyuntingan naskah. 1 responden (16.7%) menilai **sangat memudahkan**. Menurut responden, kemudahan diperoleh karena editor naskah menjadi fokus dalam menguasai isu dalam satu bidang kajian.

Seberapa besar pengaruh pembagian desk editor naskah terhadap pembentukan kontinuitas berita di TV Parlemen?

6 jawaban



Kontinuitas Berita : Manfaat lain yang diperoleh dari pembagian bidang kajian isu editor naskah adalah terbentuknya kontinuitas berita. 5 dari 6 responden (83.3%) menilai bahwa pembagian desk memberikan pengaruh yang **besar** terhadap kontinuitas berita di TV Parlemen. Responden menilai pembagian desk memberikan ruang untuk monitoring terhadap keberlanjutan berita yang sudah diproduksi dari satu bidang kajian isu. Sedangkan 16.7% (1 orang responden) berpendapat pengaruhnya masih **kecil**, karena menurut responden masih diperlukan waktu yang lebih lama untuk membentuk kontinuitas berita.

Seberapa mudah pelaksanaan plotting setelah adanya pembagian desk editor naskah? (diisi oleh PIC plotting)

4 jawaban



Kemudahan Ploting : Manfaat selanjutnya adalah kemudahan plotting. 3 dari 6 responden (75%) menilai bahwa pembagian desk **memudahkan** PIC saat plotting berita. 1 responden (25%) menilai **sangat memudahkan**, dan 2 orang responden tidak menjawab karena bukan PIC plotting berita. Kemudahan terbentuk karena saat PIC memiliki pedoman atau *guide* dalam menentukan bidang kajian naskah untuk setiap editor naskah.S

Hasil Kuesioner

Dalam mengevaluasi pelaksanaan penerapan gagasan “pembagian bidang kajian isu tim editor naskah” guna mengoptimalisasi substansi naskah berita di TV Parlemen, penulis membuat kuesioner penilaian yang dibagikan kepada tim editor naskah selaku *stakeholders*. Berikut merupakan hasil dari kuesioner tersebut :

Seberapa dalam substansi isu yang dihasilkan oleh editor setelah adanya pembagian desk editor naskah?

6 jawaban



Substansi naskah : 5 dari 6 responden (83.3%) menilai bahwa pembagian bidang kajian isu telah membentuk substansi naskah berita yang **dalam**. Responden menilai pembagian bidang kajian isu memberikan manfaat seperti fokus penguasaan isu yang membantu editor naskah dalam menghasilkan substansi naskah yang dalam.

Namun 1 responden (16.7%) menilai substansi naskah masih belum mendalam meskipun sudah ada pembagian bidang kajian isu. Responden menilai reporter lebih memiliki peranan dalam membentuk substansi naskah yang baik dibandingkan editor naskah.

Seberapa besar penguasaan isu desk terkait oleh editor setelah adanya pembagian desk editor naskah?

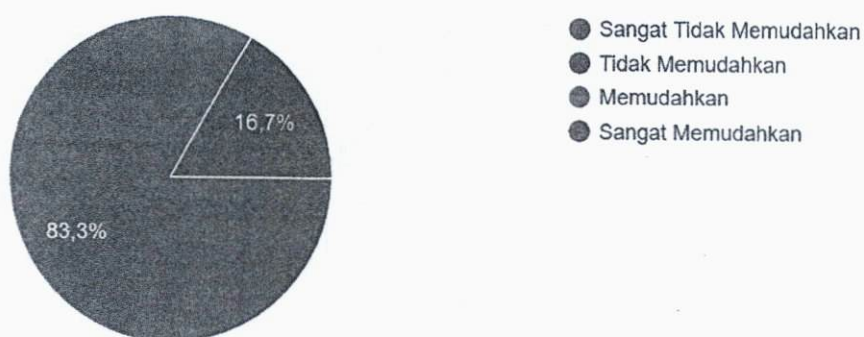
6 jawaban



Penguasaan Isu : Substansi naskah yang dalam didukung oleh terbentuknya penguasaan isu pada tim editor naskah. Berdasarkan survey, 3 dari 6 responden (50%) menilai bahwa pembagian desk membentuk penguasaan isu yang **besar** bagi editor naskah, karena editor naskah dapat fokus dalam mengedit isu. 2 dari 6 responden (33.3%) menilai pembagian desk memberikan penguasaan isu yang **sangat besar**. Responden menilai hal tersebut membentuk penguasaan isu yang lebih luas kepada editor naskah dan mengetahui perkembangan isu. Sementara 1 responden (16.7%) menilai peran pembagian desk dalam membentuk penguasaan isu masih kecil karena berjalannya program ini masih dalam kurun waktu yang singkat, sehingga belum membentuk penguasaan isu yang optimal.

Seberapa mudah proses penyuntingan naskah setelah adanya pembagian desk editor naskah?

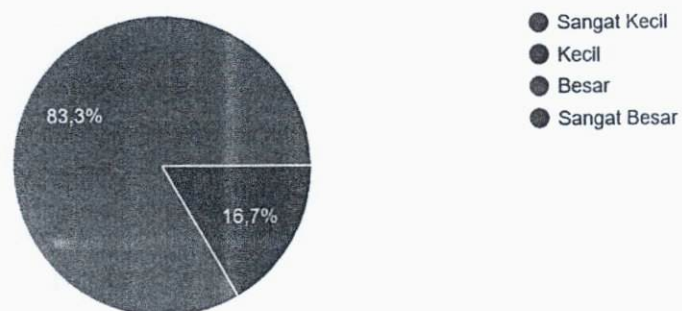
6 jawaban



Proses Penyuntingan Naskah : 5 dari 6 responden (83.3%) menilai bahwa pembagian desk memberikan kemudahan dalam proses penyuntingan naskah. 1 responden (16.7%) menilai **sangat memudahkan**. Menurut responden, kemudahan diperoleh karena editor naskah menjadi fokus dalam menguasai isu dalam satu bidang kajian.

Seberapa besar pengaruh pembagian desk editor naskah terhadap pembentukan kontinuitas berita di TV Parlemen?

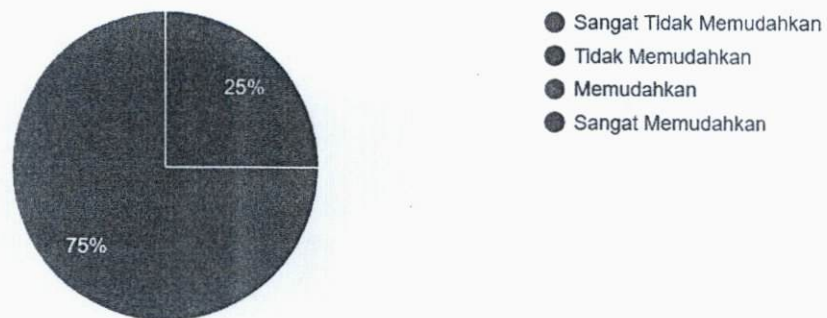
6 jawaban



Kontinuitas Berita : Manfaat lain yang diperoleh dari pembagian bidang kajian isu editor naskah adalah terbentuknya kontinuitas berita. 5 dari 6 responden (83.3%) menilai bahwa pembagian desk memberikan pengaruh yang **besar** terhadap kontinuitas berita di TV Parlemen. Responden menilai pembagian desk memberikan ruang untuk monitoring terhadap keberlanjutan berita yang sudah diproduksi dari satu bidang kajian isu. Sedangkan 16.7% (1 orang responden) berpendapat pengaruhnya masih **kecil**, karena menurut responden masih diperlukan waktu yang lebih lama untuk membentuk kontinuitas berita.

Seberapa mudah pelaksanaan plotting setelah adanya pembagian desk editor naskah? (diisi oleh PIC plotting)

4 jawaban



Kemudahan Ploting : Manfaat selanjutnya adalah kemudahan plotting. 3 dari 6 responden (75%) menilai bahwa pembagian desk **memudahkan** PIC saat plotting berita. 1 responden (25%) menilai **sangat memudahkan**, dan 2 orang responden tidak menjawab karena bukan PIC plotting berita. Kemudahan terbentuk karena saat PIC memiliki pedoman atau *guide* dalam menentukan bidang kajian naskah untuk setiap editor naskah.S

Hasil Kuesioner

Dalam mengevaluasi pelaksanaan penerapan gagasan “pembagian bidang kajian isu tim editor naskah” guna mengoptimalkan substansi naskah berita di TV Parlemen, penulis membuat kuesioner penilaian yang dibagikan kepada tim editor naskah selaku *stakeholders*. Berikut merupakan hasil dari kuesioner tersebut :

Seberapa dalam substansi isu yang dihasilkan oleh editor setelah adanya pembagian desk editor naskah?

6 jawaban

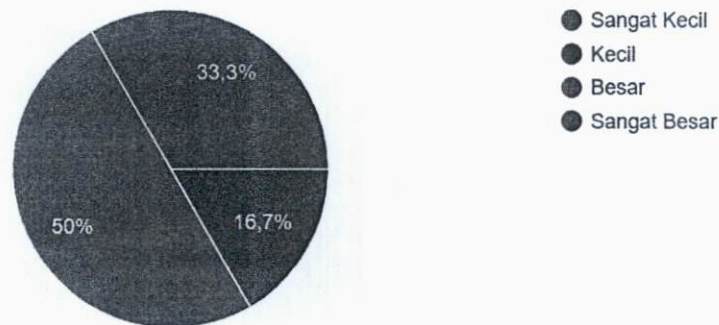


Substansi naskah : 5 dari 6 responden (83.3%) menilai bahwa pembagian bidang kajian isu telah membentuk substansi naskah berita yang **dalam**. Responden menilai pembagian bidang kajian isu memberikan manfaat seperti fokus penguasaan isu yang membantu editor naskah dalam menghasilkan substansi naskah yang dalam.

Namun 1 responden (16.7%) menilai substansi naskah masih belum mendalam meskipun sudah ada pembagian bidang kajian isu. Responden menilai reporter lebih memiliki peranan dalam membentuk substansi naskah yang baik dibandingkan editor naskah.

Seberapa besar penguasaan isu desk terkait oleh editor setelah adanya pembagian desk editor naskah?

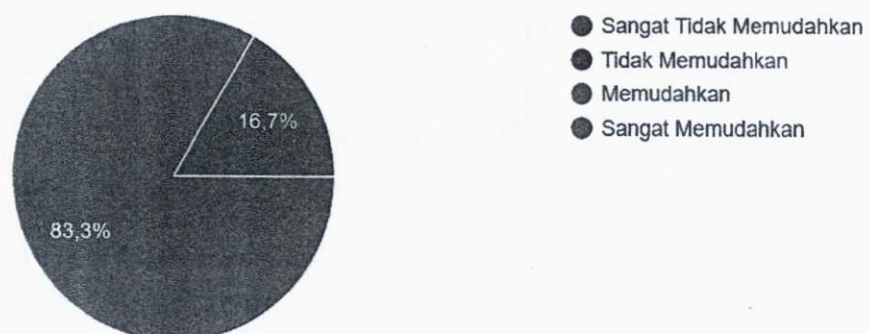
6 jawaban



Penguasaan Isu : Substansi naskah yang dalam didukung oleh terbentuknya penguasaan isu pada tim editor naskah. Berdasarkan survey, 3 dari 6 responden (50%) menilai bahwa pembagian desk membentuk penguasaan isu yang **besar** bagi editor naskah, karena editor naskah dapat fokus dalam mengedit isu. 2 dari 6 responden (33.3%) menilai pembagian desk memberikan penguasaan isu yang **sangat besar**. Responden menilai hal tersebut membentuk penguasaan isu yang lebih luas kepada editor naskah dan mengetahui perkembangan isu. Sementara 1 responden (16.7%) menilai peran pembagian desk dalam membentuk penguasaan isu masih kecil karena berjalannya program ini masih dalam kurun waktu yang singkat, sehingga belum membentuk penguasaan isu yang optimal.

Seberapa mudah proses penyuntingan naskah setelah adanya pembagian desk editor naskah?

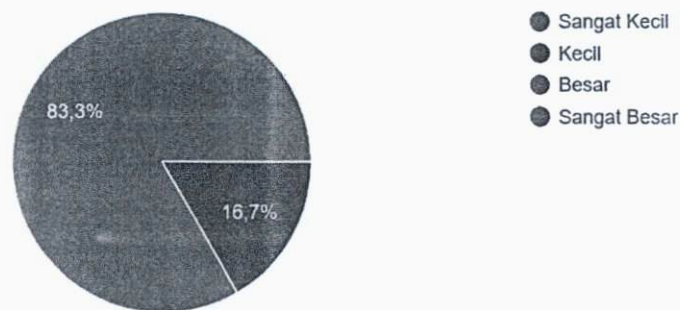
6 jawaban



Proses Penyuntingan Naskah : 5 dari 6 responden (83.3%) menilai bahwa pembagian desk memberikan kemudahan dalam proses penyuntingan naskah. 1 responden (16.7%) menilai **sangat memudahkan**. Menurut responden, kemudahan diperoleh karena editor naskah menjadi fokus dalam menguasai isu dalam satu bidang kajian.

Seberapa besar pengaruh pembagian desk editor naskah terhadap pembentukan kontinuitas berita di TV Parlemen?

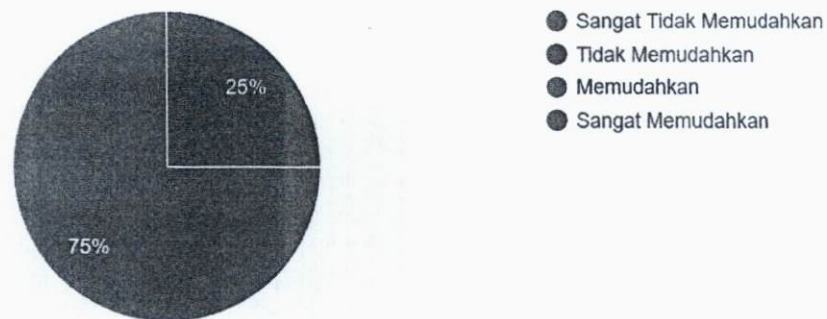
6 jawaban



Kontinuitas Berita : Manfaat lain yang diperoleh dari pembagian bidang kajian isu editor naskah adalah terbentuknya kontinuitas berita. 5 dari 6 responden (83.3%) menilai bahwa pembagian desk memberikan pengaruh yang **besar** terhadap kontinuitas berita di TV Parlemen. Responden menilai pembagian desk memberikan ruang untuk monitoring terhadap keberlanjutan berita yang sudah diproduksi dari satu bidang kajian isu. Sedangkan 16.7% (1 orang responden) berpendapat pengaruhnya masih **kecil**, karena menurut responden masih diperlukan waktu yang lebih lama untuk membentuk kontinuitas berita.

Seberapa mudah pelaksanaan plotting setelah adanya pembagian desk editor naskah? (diisi oleh PIC plotting)

4 jawaban



Kemudahan Plotting : Manfaat selanjutnya adalah kemudahan plotting. 3 dari 6 responden (75%) menilai bahwa pembagian desk **memudahkan** PIC saat plotting berita. 1 responden (25%) menilai **sangat memudahkan**, dan 2 orang responden tidak menjawab karena bukan PIC plotting berita. Kemudahan terbentuk karena saat PIC memiliki pedoman atau *guide* dalam menentukan bidang kajian naskah untuk setiap editor naskah.S





**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-1

Nama : ELISA GABRIELA PURBA
NIP : 199601062020122006
Unit Kerja : Subbagian Program dan Produksi Televisi
Isu : Optimalisasi Substansi Naskah Berita TV Parlemen
Gagasan : Membagi Bidang Kajian Isu Editor Naskah

No.	Kegiatan	Evidence
1.	Melakukan koordinasi dengan Kasubbag terkait isu dan gagasan penyelesaian rancangan aktualisasi	
2.	Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Editor selaku stakeholder terkait isu dan gagasan penyelesaian rancangan aktualisasi	

Jakarta, 17 Mei 2021

Coach



Agus Supriyono, S.S, M.A.P.
NIP. 196902082003121003

Mengetahui,

Mentor



Bayu Setiadi, S.IP
NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Jakarta, 5 Mei 2021

Sifat : Dinas
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Optimalisasi Substansi Naskah Berita TV Parlemen

Yth :

- 1. Koordinator Berita Harian**
- 2. Penyelia Berita Harian**
- 3. Penyelia Liputan Harian**
- 4. Tim Editor Naskah**
- 5. Tim Reporter TV Parlemen**

Di Jakarta

Berkenaan dengan rancangan gagasan untuk meningkatkan Optimalisasi Substansi Naskah Berita di TV Parlemen, guna mendukung Sasaran Kinerja Pegawai yakni mengumpulkan dan mengelolah data serta informasi sebagai bahan penyusunan artikel sebagaimana tertulis dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 10 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, maka kami mengundang saudara untuk menghadiri rapat koordinasi pada:

Hari : Jumat, 07 Mei 2021
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat TVR Parlemen, Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta

Sehubungan dengan itu, diharapkan kehadiran saudara dalam Rapat Koordinasi tersebut. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

Hari/Tanggal : Jum'at, 5 Mei 2021

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Kasubbag TVR Parlemen, Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara :

Rapat Koordinasi Pengajuan Gagasan Pembagian Bidang Kajian Isu Editor Naskah

I. Pendahuluan

Berkenaan dengan pelaksanaan aktualisasi dalam Latsar CPNS yang diselenggarakan tahun 2021 guna melaksanakan tugas pokok jurnalis berdasarkan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) untuk mengumpulkan dan mengelolah data serta informasi sebagai bahan penyusunan artikel, maka diadakanlah pembagian bidang kajian isu editor naskah guna mengoptimalkan substansi naskah yang dihasilkan di TV Parlemen. Dalam hal ini perlu melakukan pengajuan gagasan kepada mentor sekaligus kasubbag program dan produksi televisi.

II. Kesimpulan/Keputusan

1. Kasubbag mendukung adanya gagasan Pembagian Bidang Kajian Isu Editor Naskah
2. Kasubbag mendukung diadakannya rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

III. Penutup

Rapat ini selesai pukul 11.00 WIB

Kasubbag Program dan Produksi Televisi,

Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI DENGAN TIM EDITOR NASKAH TV PARLEMEN**

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Mei 2020
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Meeting Bagian TVR Parlemen
Gedung Nusantara IV Lt.1

Acara :

1. Koordinasi gagasan Aktualisasi terkait Optimalisasi Substansi Naskah Berita di TV Parlemen
2. Koordinasi Gagasan Penyelesaian Isu dengan Membagi Bidang Kajian Isu Editor Naskah

1. Pendahuluan

Sehubungan dengan pelaksanaan program gagasan rancangan aktualisasi CPNS di TV Parlemen dan guna mendukung pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yakni mengumpulkan dan mengelolah data serta informasi sebagai bahan penyusunan artikel sebagaimana tertulis dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 10 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi guna membahas rancangan tersebut dengan tim editor dan tim reporter TV Parlemen.

2. Kesimpulan / Keputusan

Tim editor naskah TV Parlemen menyetujui gagasan terakit perlunya meningkatkan optimalisasi substansi naskah hasil editing di TV Parlemen

Tim editor naskah TV Parlemen menyetujui dilakukannya pembagian bidang kajian isu untuk tim editor naskah, guna mendukung optimalisasi substansi naskah di TV Parlemen

3. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 07 Mei 2021

Kepala Subbagian Progam dan Produksi Televisi

Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI

"Pembagian Bidang Kajian Isu Editor Naskah di TV Parlemen"

Tanggal : 07 Mei 2021

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Syahroni	Koordinator Berita Harian	
2.	Supriyanto Doni	Penyelia Berita Harian	HADIR VIRTUAL
3.	Citra Ananda	Penyelia Liputan Harian	
4.	M. Marlina Tampubolon	Editor Naskah	
5.	Farkhan Fajar	Editor Naskah	HADIR VIRTUAL
6.	Dwi Ayu Lestari	Editor Naskah	
7.	Elisa Gabriela Purba	CPNS/Jurnalis	
8.	Hendra Sunandar	Tim Reporter	
9.	Indah Ekawati	Tim Reporter	

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi TV


Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

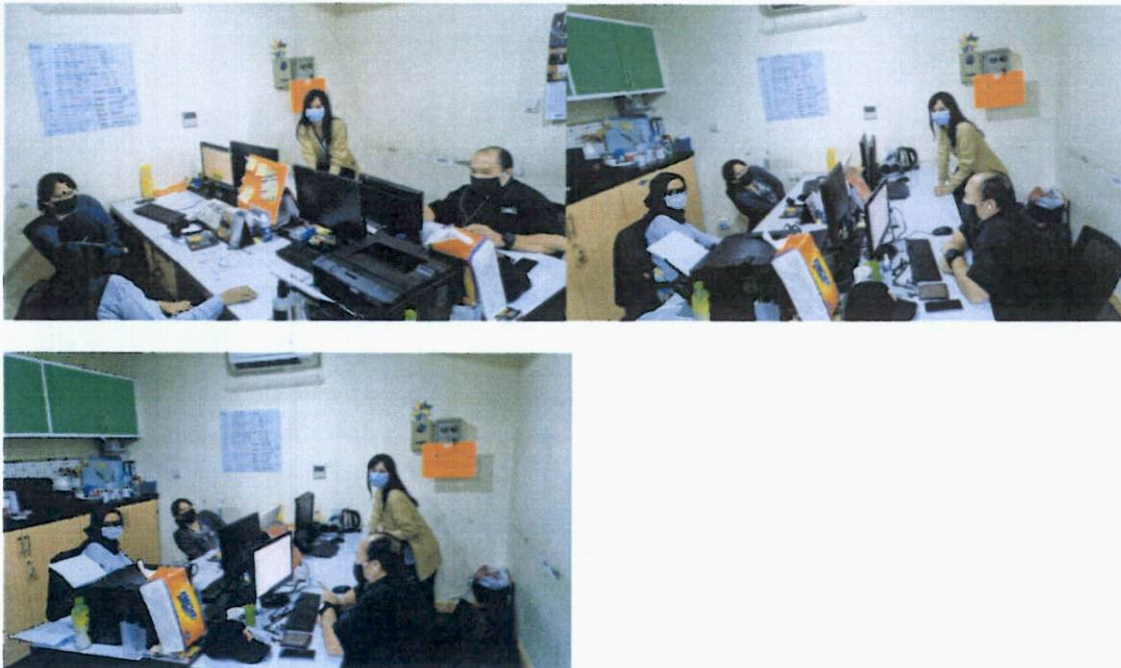
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN :www.dpr.go.id

Lampiran Foto

Koordinasi dengan Kasubbag :



Koordinasi dengan stakeholder (tim editor naskah TV Parlemen) :





**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-2

Nama : ELISA GABRIELA PURBA
NIP : 199601062020122006
Unit Kerja : TV Parlemen
Isu : Optimalisasi Substansi Naskah Berita TV Parlemen
Gagasan : Membagi Bidang Kajian Isu Editor Naskah

No.	Kegiatan	Evidence
1.	Melakukan koordinasi dengan Kasubbag untuk memploting tim editor ke dalam bidang kajian isu	Terlampir foto koordinasi, surat pemberitahuan, dan hasil plotingan bidang kajian isu editor naskah oleh kasubbag
2.	Melakukan sosialisasi terkait hasil plotingan bidang kajian isu kepada coordinator berita harian, penyelia liputan harian, tim editor naskah, dan perwakilan reporter.	Terlampir foto sosialisasi, undangan sosialisasi, lapsing, dan daftar hadir.

Jakarta, 27 Mei 2021

Coach

Agus Supriyono, S.S, M.A.P.

NIP. 196902082003121003

Mengetahui,

Mentor

Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Kepada :

1. **Pemimpin Redaksi**
2. **Koordinator Berita Harian**
3. **Penyelia Berita Harian**
4. **Penyelia Liputan Harian**
5. **PIC Rapat Redaksi**
6. **Tim Editor Redaksi**

SURAT PEMBERITAHUAN

Sehubungan dengan dilaksanakannya Program Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021, maka dengan ini kami sampaikan bahwa terhitung sejak masa sidang V (lima) tahun 2020/2021 (Mei 2021) dan seterusnya, akan diberlakukan **Pembagian Bidang Kajian Isu untuk Editor Naskah** di Subbagian Program dan Produksi Televisi, Bagian Televisi dan Radio Parlemen.

Hal ini sebagai bentuk penerapan gagasan Aktualisasi ELISA GABRIELA PURBA, S.I.Kom guna mengoptimalkan substansi naskah berita di TV Parlemen.

Mohon kerja sama dari rekan-rekan, agar penerapan aktualisasi ini dapat bermanfaat dan terlaksana dengan baik. Demikian surat pemberitahuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Mei 2021

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002

Lampiran :

DAFTAR PLOTINGAN BIDANG KAJIAN ISU EDITOR NASKAH

Periode	Bidang Kajian Isu				
	Korpolkam (I)	Korinbang (II)	Korkesra (III)	Korekku (IV)	Nasional (V)
Masa Sidang V tahun 2020/2021	Supriyanto Doni	M. Marlina Tampubolon	Farkhan Fajar	Citra Ananda	Syahroni, Dwi Ayu Lestari
Masa Sidang I tahun 2021/2022	Dwi Ayu Lestari	Supriyanto Doni	M. Marlina Tampubolon	Farkhan Fajar	Syahroni, Citra Ananda
Masa Sidang II tahun 2021/2022	Citra Ananda	Dwi Ayu Lestari	Supriyanto Doni	M. Marlina Tampubolon	Syahroni, Farkhan Fajar
Masa Sidang III tahun 2021/2022	Farkhan Fajar	Citra Ananda	Dwi Ayu Lestari	Supriyanto Doni	Syahroni, M. Marlina Tampubolon
Masa Sidang IV tahun 2021/2022	M. Marlina Tampubolon	Farkhan Fajar	Citra Ananda	Dwi Ayu Lestari	Syahroni, Supriyanto Doni
Masa Sidang V tahun 2021/2022	Supriyanto Doni	M. Marlina Tampubolon	Farkhan Fajar	Citra Ananda	Syahroni, Dwi Ayu Lestari

Ketentuan Lain :

1. Setiap editor naskah harus memperhatikan ketersediaan berita terkait desknya. Jika stok berita berkurang, editor naskah dapat berkoordinasi untuk meminta reporter melakukan peliputan isu sesuai bidang kajian masing-masing
2. Agenda per komisi serta *running issue* dibahas di Rapat Redaksi Pagi, guna pengarahan kepada reporter dan mendukung ketersediaan berita setiap desk.
3. Proses rolling bidang kajian akan dilakukan setelah satu masa sidang dan masa resesnya berakhir. Plottingan rolling mengikuti daftar yang terlampir.
4. Rincian bidang kajian isu :

Bidang Kajian Isu				
Korpolkam	Korinbang	Korkesra	Korekku	Nasional
Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi.	Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, dan Komisi VII.	Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Mahkamah Kehormatan Dewan.	Komisi XI, Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.	Kesetjenan dan Badan Keahlian, dan isu umum

Menyetujui

Kasubag Program dan Produksi Televisi



Bayu Setiadi, S.IP.

NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Jakarta, 22 Juni 2021

SURAT DUKUNGAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsi TV Parlemen dalam menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pemikiran, kebijakan, kegiatan dan keputusan-keputusan parlemen kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia luar, serta dalam menjalankan salah satu tugas dan fungsi jurnalis TV Parlemen dalam mengumpulkan dan mengolah data serta informasi sebagai bahan penyusunan artikel, dengan ini saya **MENDUKUNG** gagasan aktualisasi yang dijalankan oleh:

Nama	: Elisa Gabriela Purba
Jabatan	: Jurnalis
Unit Kerja/Bagian	: TV Parlemen / Subbagian Program dan Produksi TV
NIP	: 199601062020122006
Judul Aktualisasi	: Optimalisasi Substansi Naskah Berita TV Parlemen

Dengan dijalankannya aktualisasi ini, saya percaya gagasan ini dapat membuat perubahan lebih baik dan mengoptimalkan substansi berita di TV Parlemen.

Kasubbag Program dan Produksi Televisi,

Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Jakarta, 18 Mei 2021

Sifat : Dinas
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Sosialisasi Hasil Plotingan Editor Naskah per Bidang Kajian Isu

Yth :

- 1. Koordinator Berita Harian**
- 2. Penyelia Berita Harian**
- 3. Penyelia Liputan Harian**
- 4. Tim Editor Naskah**
- 5. Perwakilan Tim Reporter TV Parlemen**

Di Jakarta

Berkenaan dengan telah ditetapkannya bidang kajian isu untuk setiap editor naskah di tim redaksi TV Parlemen, sebagai bentuk pelaksanaan gagasan aktualisasi Optimalisasi Substansi Naskah Berita di TV Parlemen, maka kami mengundang saudara untuk menghadiri rapat sosialisasi pada:

Hari : Kamis, 20 Mei 2021
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat TV Parlemen, Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran saudara agar gagasan aktualisasi ini dapat tersosialisasikan dan bisa diterapkan dengan baik. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT SOSIALISASI HASIL PLOTING
BIDANG KAJIAN ISU TIM EDITOR NASKAH TV PARLEMEN**

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Mei 2020
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat TV Parlemen
Gedung Nusantara IV Lt.1, DPR RI
Acara : Sosialisasi hasil plotting bidang kajian isu editor naskah TV Parlemen

1. Pendahuluan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya bidang kajian isu per editor naskah oleh Kepala Sub Bagian Program dan Produksi TV, terkait dengan gagasan rancangan aktualisasi CPNS di TV Parlemen, maka dilakukan sosialisasi kepada koordinator berita harian, penyelia liputan harian, tim editor naskah dan perwakilan tim reporter TV Parlemen, guna tersosialisasikannya gagasan, terciptanya kesamaan makna, dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan gagasan.

2. Kesimpulan / Keputusan

- 1) Tim editor naskah TV Parlemen menerima hasil plotting dan bersedia menjalankan gagasan ini sesuai dengan arahan dari Kasubbag.
- 2) Tim reporter mengetahui adanya pembagian bidang kajian isu per editor naskah dan bersedia berkoordinasi dengan tim editor naskah, terkait ketersediaan berita per bidang kajian isu di tim redaksi.
- 3) Tim editor naskah TV Parlemen memberikan masukan, agar dalam penerapan gagasan ini tim editor dapat melakukan koordinasi untuk meminta tim reporter melakukan *doorstop running issue*, jika bidang kajian isu tertentu sedang kekurangan berita.

3. Penutup

Rapat sosialisasi ditutup pada pukul 11.00 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2021
Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

Bayu Setiadi, S.IP
NIP. 197903262005021002



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT SOSIALISASI

"Optimalisasi Substansi Naskah Berita dengan Membagi Bidang Kajian Isu Editor Naskah di TV Parlemen"

Tanggal : Mei 2021

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Dwi Ayu Lestari	Reporter - Editor Naskah	<i>Ayu</i>
2.	M Marlina Tampubolan	Reporter - Editor Naskah	<i>Mub</i>
3.	Citra Ananda	Jurnalis / Penyedia Liputan Harian	<i>Citra</i>
4.	Helmi Darmawan	Reporter	<i>Helmi</i>
5.	Hendra S	Reporter	<i>Hendra</i>
6.	Indah E.	Reporter	<i>Indah</i>
7.	Theresia Butar Butar	Jurnalis	<i>Theresia</i>
8.	Elisa Gabriela Purba	Jurnalis	<i>Elisa</i>
9.	Vinita P	Jurnalis	<i>Vinita</i>
10.	Syahroni	Koord. Berita Harian	<i>Syahroni</i>

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Program dan Produksi TV

Bayu Setiadi

Bayu Setiadi, S. IP



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Lampiran Foto

**Sosialisasi dengan Kasubbag, Koordinator Berita Harian, Penyelia Liputan Harian, Tim Editor
Naskah, dan Perwakilan tim Reporter TV Parlemen**





**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-3

Nama : ELISA GABRIELA PURBA
NIP : 199601062020122006
Unit Kerja : TV Parlemen
Isu : Optimalisasi Substansi Naskah Berita TV Parlemen
Gagasan : Membagi Bidang Kajian Isu Editor Naskah

No.	Kegiatan	Evidence
1.	Program berjalan (tahap uji coba). Editor naskah sudah diploting sesuai dengan bidang kajian isu yang ditetapkan.	a. Hasil capture email plotingan editor naskah b. naskah asli dan naskah final (hasil editing).
2.	Melakukan evaluasi tahap uji coba melalui rapat dengan tim editor naskah.	a. undangan rapat evaluasi b. Lapsing Evaluasi c. Foto rapat evaluasi d. Daftar hadir rapat evaluasi.
3.	Melakukan koordinasi dengan Kasubbag terkait hasil evaluasi tahapan uji coba	a. Foto koordinasi dengan kasubbag

Jakarta, 09 Juni 2021

Coach

Agus Supriyono, S.S, M.A.P.
NIP. 196902082003121003

Mengetahui,

Mentor

Bayu Setiadi, S.IP
NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Jakarta, 02 Juni 2021

Sifat : Dinas
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Evaluasi Tahap Uji Coba Pembagian Desk Editor Naskah

Yth :

1. Koordinator Berita Harian
2. Penyelia Berita Harian
3. Penyelia Liputan Harian
4. Tim Editor Naskah
5. Perwakilan Tim Reporter TV Parlemen

Di Jakarta

Berkenaan dengan telah dilakukannya tahap uji coba dalam penerapan pembagian desk atau bidang kajian isu untuk tim editor naskah di redaksi TV Parlemen, maka akan dilakukan proses evaluasi guna meningkatkan efektivitas serta kebermanfaatan program aktualisasi. Oleh sebab itu, kami mengundang saudara untuk menghadiri rapat evaluasi tahap uji coba pada:

Hari : Jumat, 04 Juni 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat TV Parlemen, Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran saudara agar penerapan gagasan aktualisasi ini dapat berjalan lancar dan baik. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

Bayu Setiadi, S.IP
NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT RAPAT EVALUASI TAHAPAN UJI COBA
PENERAPAN PEMBAGIAN DESK TIM EDITOR NASKAH TV PARLEMEN**

Hari/Tanggal : Jumat, 04 Juni 2020
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Meeting Bagian TVR Parlemen
Gedung Nusantara IV Lt.1
Acara : Evaluasi tahap uji coba penerapan pembagian desk tim editor naskah TV Parlemen

1. Pendahuluan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahap uji coba penerapan pembagian desk tim editor di TV Parlemen, sebagai bagian dari program Aktualisasi CPNS TV Parlemen, maka dilaksanakan Rapat evaluasi tahap uji coba guna meningkatkan efektivitas serta kebermanfaatan dari pelaksanaan gagasan tersebut.

2. Kesimpulan / Keputusan

Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh hasil serta saran sebagai berikut :

- a. Agar diadakan sosialisasi kepada tim Reporter terkait pembagian bidang kajian isu di tim editor naskah, agar ketika berita reporter di drop, dapat digantikan oleh reporter sesuai dengan bidang kajian isu editor naskah.
- b. Agar dilaksanakan rapat redaksi pagi secara rutin, guna mendukung ketersediaan berita di redaksi
- c. Tim editor naskah telah merasakan manfaat, seperti terbentuknya substansi naskah berita, kemudahan plotting berita, serta kemudahan mengedit naskah berita sesuai bidang kajian isu
- d. Masih dibutuhkan waktu untuk membentuk kontinuitas berita dikarenakan isu yang dibahas di DPR saat ini masih beragam

3. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 04 Juni 2021

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

Bayu Setiadi, S.IP

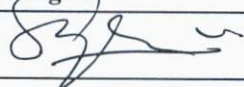
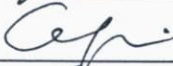

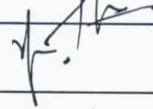


NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Lampiran Nama Peserta Rapat Evaluasi Tahap Uji Coba:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syahrani	Koord. Berita Harian	
2	Dwi Ayu .L	Reporter / Editor Nasional	
3	Supriyanto	Koordinator Berita	
4	Theresia O. Butar Butar	Jurnalis	
5	M. Marlina TP. Bolan	Editor Nasional	
6	Citra Ananda	Koord Liputan Harian / Editor	
7			
8			
9			
10			

Jakarta, 04 Juni 2021

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi



Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002

RAPAT REDAKSI 31 MEI 2021

Redaksi TVR Parlemen <redaksitvrparlemen@gmail.com>

Sen, 31 Mei 15.17 (2 hari yang lalu)

kepada Abdul, Alfat, andri, avi, Bayu, Bondan, Citra, Dwi, Dwi, saya, Farkhan, Ferdian, Fityan, Habibi, Helmi, Helmi, Hendra, Hery, Hilman, Ila, Indah, Mahir, Mario, Mu:

RAPAT REDAKSI 31 MEI TAYANG 3 JUNI 2021		
MAULANA FITYAN AUNILLAH	ALOKASI DAK HARUS SESUAI KEBUTUHAN DAERAH	CITRA ANANDA
ANDRI TRIANA	TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI MENCAPAI 7%	CITRA ANANDA
HILMAN HIDAYAT	KOMISI XI KE BALI 1	CITRA ANANDA
Vinita Pratijivanti	REFOCUSING ANGGARAN KEMENTERIAN PPPA	FARKHAN FAJAR
M. Alfat Nur Rizqi	DPR MINTA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA BANSOS	FARKHAN FAJAR
HILMAN HIDAYAT	KOMISI I TEGUHKAN KOMITMEN PENTINGNY RUU PDP	SUPRIYANTO
MAULANA FITYAN AUNILLAH	BALEG: RUU MINOL HARUS DIKENDALIKAN	SUPRIYANTO
HABIBI MAHABBAH	BURT INGIN PELAYANAN BANDARA HASANUDIN DIBENAH	SYAHRONI
SUPRIYANTO	BKSAP-SIDANG ASGP	SYAHRONI

Redaksi TVR Parlemen <redaksitvrparlemen@gmail.com>

15.16 (8 jam yang lalu)

kepada Abdul, Alfat, andri, avi, Bayu, Bondan, Citra, Dwi, Dwi, saya, Farkhan, Ferdian, Fityan, Habibi, Helmi, Helmi, Hendra, Hery, Hilman, Ila, Indah, Mahir, Mario, Mu:

RAPAT REDAKSI 02 JUNI TAYANG 04 JUNI 2021		
FERDIAN NUR RACHMAN	DPR RI DORONG KEBIJAKAN EKONOMI BARU	CITRA ANANDA
HILMAN HIDAYAT	KOMISI XI KE BALI 1	CITRA ANANDA
ANDRI TRIANA	BANGGAR RAKER DENGAN MENKEU, BI, BAPPENAS	CITRA ANANDA
SUPRIYANTO	BKSAP-SIDANG IPU	DWI AYU LESTARI
MARIO HASIROLAN	MPP PALEMBANG JADI ROLE MODEL	DWI AYU LESTARI
AVIAH AL JUFRI	BK DPR JALIN KERJA SAMA DENGAN UNS SURAKARTA	DWI AYU LESTARI
Elisa Gabriela Purba	KEMENDIKBUDISTEK DIMINTA BERPIHAK TERHADAP EKSISTENSI LPTK	FARKHAN FAJAR
MAHIR PRATAMA	KOMISI IX MINTA PEMERINTAH ANTISIPASI VARIAN VIRUS BARU	FARKHAN FAJAR
HELMY DARMAWAN	KOM X - TERKAIT PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	FARKHAN FAJAR
RIFQI MAKDUDI	PROGRES PEMBANGUNAN TANGGUL PENGENDALI BANJIR	M. MARLINA TAMPUBOLON
MARIO HASIROLAN	Kom V DUKUNG INFRASTRUKTUR DAERAH TERISOLASI	M. MARLINA TAMPUBOLON
ANDRI TRIANA	PERLU ADA BIMTEK DAN PERHATIAN UNTUK TAMAN MANUSULA DAN BANK SAMPAH	M. MARLINA TAMPUBOLON

Redaksi TVR Parlemen <redaksitvrparlemen@gmail.com>

Kam, 3 Jun 15.28 (3 hari yang lalu)

kepada Abdul, Alfat, andri, avi, Bayu, Bondan, Citra, Dwi, Dwi, saya, Farkhan, Ferdian, Fityan, Habibi, Helmi, Helmi, Hendra, Hery, Hilman, Ila, Indah, Mahir, Mario, Mu:

RAPAT REDAKSI 03 JUNI TAYANG 07 JUNI 2021		
HELMY DARMAWAN	PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN PERLU DITINGKATKAN	DWI AYU LESTARI
ANDRI TRIANA	KOMISI VIII TOLAK NOMENKLATUR BNPB	FARKHAN FAJAR
HELMY DARMAWAN	KESIAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA	FARKHAN FAJAR
HABIBI MAHABBAH	WAKSIN DALAM NEGERI SEGERA DIGUNAKAN MASYARAKAT LUAS	FARKHAN FAJAR
OKKY ZULINDRA	RUU PTUN	SUPRIYANTO
ZIKRI AMIN	PIMPINAN KOREKKU SOAL RENCANA PEMBELIAN ALUTSISTA	SUPRIYANTO
MARIO HASIROLAN	DARURAT NARKOTIKA KOMISI III DUKUNG PENAMBAHAN ANGGARAN BNN	SUPRIYANTO
ZIKRI AMIN	PIMPINAN KOREKKU SOAL HAJI	SYAHRONI
HELMY DARMAWAN	KOMISI V NILAI ANGGARAN PUPR PERLU DITINGKATKA	SYAHRONI
ANDRI TRIANA	PANSUS RUU OTSUS PAPUA RDP DENGAN PROFESOR UGM DAN LIPI	SYAHRONI

Hasil Ploting Editor Naskah ke Bidang Kajian Isu

RAPAT REDAKSI 21 MEI 2021

Redaksi TVR Parlemen <redaksitvrparlemen@gmail.com>

Min, 23 Mei 1

kepada Abdul, Alfath, andri, avi, Bayu, Bondan, Citra, Dwi, Dwi, saya, Farkhan, Ferdian, Fityan, Habibi, Helmi, Helmi, Hendra, Hery, Hilman, Ila, Indah, Mahir, Mario

RAPAT REDAKSI 21 MEI TAYANG 25 MEI 2021		
HILMAN HIDAYAT	ASUMSI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL 1	CITRA ANANDA
MAHIR PRATAMA	KETUA DPR - ANTISIPASI KETIDAKPASTIAN EKONOMI	CITRA ANANDA
Theresia Octaviana Butar	LANGKAH MENKEU TERKAIT TAX AMNESTY DIAPRESIASI	CITRA ANANDA
RIAN IDRAYANA	BURT JAJAKI RSUD BERKAH PANDEGLANG SEBAGAI RS PROVIDER	FARKHAN FAJAR
Indah Ekawati	EVALUASI KASUS PELAJAR HINA PALESTINA	FARKHAN FAJAR
Elisa Gabriela Purba	MUHAJIMIN DUKUNG PERFILMAN INDONESIA	FARKHAN FAJAR
DODY MUHARAM	IMIGRASI AWASI TURIS ASING DI BALI	SUPRIYANTO
AVIAH AL JUFRY	DUKUNGAN INDONESIA UNTUK PALESTINA ADALAH AMANAH UUD 1945	SUPRIYANTO
HELMY DARMAWAN	FIT AND PROPER TEST DEWAS LPP RRI	SUPRIYANTO

RAPAT REDAKSI 25 MEI 2021

Redaksi TVR Parlemen <redaksitvrparlemen@gmail.com>

Sel, 25 Mei 15.32 (12 hari yang

kepada Abdul, Alfath, andri, avi, Bayu, Bondan, Citra, Dwi, Dwi, saya, Farkhan, Ferdian, Fityan, Habibi, Helmi, Helmi, Hendra, Hery, Hilman, Ila, Indah, Mahir, Mario

RAPAT REDAKSI 25 MEI TAYANG 28 MEI 2021		
ZIKRI AMIN	DASCO - KEBOCORAN DATA	DWI AYU LESTARI
ANDRI TRIANA	KERJA SAMA PENYEDIAAN RUMAH PEGAWAI SETJEN	DWI AYU LESTARI
RIAN IDRAYANA	BURT JAJAKI RSUD BERKAH PANDEGLANG SEBAGAI RS PROVIDER	DWI AYU LESTARI
ZIKRI AMIN	DASCO - NOPOL ANGGOTA DPR RI	DWI AYU LESTARI
NUR FUAD	DORSTOP PEN SUDAH SESUAI TARGET 2	M. MARLINA TAMPUBOLON
M. Alfath Nur Rizqi	RESTRUKTURISASI PERTAMINA HARUS BUAT LEBIH MAJU	M. MARLINA TAMPUBOLON
OKKY ZULINDRA	MASALAH DISTRIBUSI GAS BERSUBSIDI	M. MARLINA TAMPUBOLON
Vinita Pratiyananti	PELAPORAN DAN EVALUASI FOOD ESTATE	M. MARLINA TAMPUBOLON

RAPAT REDAKSI 27 MEI 2021

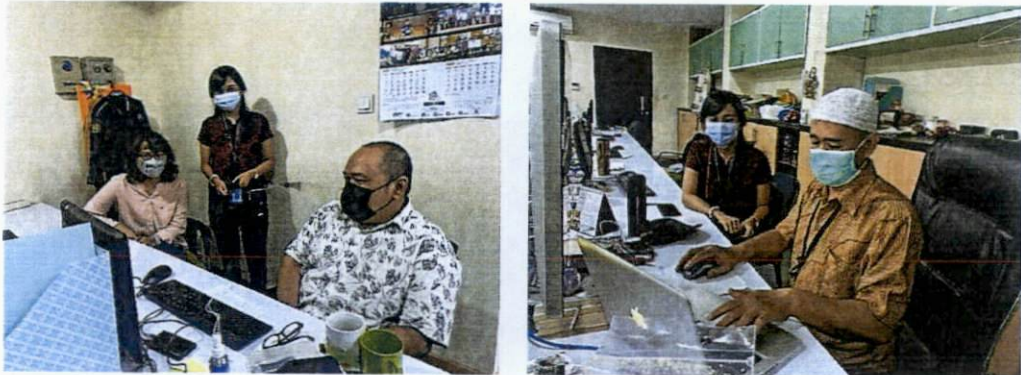
Redaksi TVR Parlemen <redaksitvrparlemen@gmail.com>

Kam, 27 Mei 15.19 (10 hari yang

kepada Abdul, Alfath, andri, avi, Bayu, Bondan, Citra, Dwi, Dwi, saya, Farkhan, Ferdian, Fityan, Habibi, Helmi, Helmi, Hendra, Hery, Hilman, Ila, Indah, Mahir, Mario

RAPAT REDAKSI 27 MEI TAYANG 31 MEI 2021		
OKKY ZULINDRA	MUSEUM DI MASA PANDEMI COVID-19	DWI AYU LESTARI
ABDUL AJIB	PELAYANAN BANDARA HUSEIN SASTRA NEGARA	DWI AYU LESTARI
HELMY DARMAWAN	SEMINAR PERPUSTAKAAN DPR RI (VIRTUAL)	DWI AYU LESTARI
ANDRI TRIANA	DUKUNGAN NEGARA NON MUSLIM UNTUK PALESTINA	SUPRIYANTO
FIRDAUS PANJI PRABOWO	POLEMIK ALIH STATUS ASN PEGAWAI KPK 2	SUPRIYANTO
NUR FUAD	KOM I PENETAPAN DEWAS LPP RRI	SUPRIYANTO
HILMAN HIDAYAT	SOAL SAWIT INDONESIA DI BANNED DI BELGIA	SYAHRONI
ANDRI TRIANA	MELONJAKNYA KASUS COVID	SYAHRONI
ZIKRI AMIN	DASCO - 97 RIBU ASN FIKTIF BERGAJI	SYAHRONI

Lampiran Foto Laporan Aktualisasi Minggu ketiga:



Gambar 3.1 Evaluasi Tahap Uji Coba dengan tim Editor Naskah TV Parlemen



Gambar 3.2 Koordinasi dengan Kasubbag terkait hasil evaluasi tahap uji coba



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Aktualisasi Minggu Ke-4

Nama : ELISA GABRIELA PURBA
NIP : 199601062020122006
Unit Kerja : TV Parlemen
Isu : Optimalisasi Substansi Naskah Berita TV Parlemen
Gagasan : Membagi Bidang Kajian Isu Editor Naskah

No.	Kegiatan	Evidence
1.	Melakukan sosialisasi lanjutan kepada tim reporter TV Parlemen terkait berjalannya pembagian desk atau bidang kajian isi editor naskah	a. undangan rapat sosialisasi b. Lapsing Sosialisasi c. Foto rapat sosialisasi d. Daftar hadir sosialisasi
2.	Program aktualisasi berjalan setelah adanya perbaikan pada tahap <i>trial and error</i>	terlampir
3.	Melakukan monitoring dan evaluasi akhir dari penerapan gagasan aktualisasi	terlampir

Jakarta, 18 Juni 2021

Coach

Agus Supriyono, S.S, M.A.P.
NIP. 196902082003121003

Mengetahui,

Mentor

Bayu Setiadi, S.IP
NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Jakarta, 07 Juni 2021

Sifat : Dinas
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Sosialisasi dengan Tim Reporter terkait Pembagian Desk Editor
Naskah

Yth :
Tim Reporter TV Parlemen

Di tempat

Berkenaan dengan telah dilakukannya pembagian desk tim editor naskah di redaksi TV Parlemen, maka akan dilakukan sosialisasi kepada tim reporter guna membangun kesamaan makna dan mendukung berjalannya program aktualisasi. Oleh sebab itu, kami mengundang saudara untuk menghadiri rapat sosialisasi tersebut pada:

Hari : Kamis, 10 Juni 2021
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat TV Parlemen, Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran saudara agar penerapan gagasan aktualisasi ini dapat berjalan lancar dan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT RAPAT SOSIALISASI DENGAN TIM REPORTER
TERKAIT PENERAPAN PEMBAGIAN DESK TIM EDITOR NASKAH TV PARLEMEN**

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juni 2020
Waktu : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Meeting Bagian TVR Parlemen
Gedung Nusantara IV Lt.1
Acara : Sosialisasi penerapan pembagian desk tim editor naskah kepada tim reporter

1. Pendahuluan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya evaluasi terkait pelaksanaan tahap uji coba penerapan pembagian desk tim editor naskah di TV Parlemen, masih ditemukan beberapa kendala. Sesuai dengan masukan dari tim editor naskah yakni, perlunya diadakan sosialisasi ulang terkait program ini, maka dilaksanakanlah rapat sosialisasi kepada tim reporter guna mendukung berjalannya program aktualisasi ini.

2. Kesimpulan / Keputusan

Berdasarkan hasil koordinasi dan diskusi dengan tim reporter, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Tim reporter mengetahui adanya pembagian desk di editor naskah
- b. Tim reporter bersedia untuk berkoordinasi dengan tim editor naskah jika ada berita yang di drop atau kekurangan isu desk tertentu
- c. Tim reporter bersedia untuk memperhatikan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang dipilih saat melisting naskah berita

3. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 09.10 WIB.

Jakarta, 10 Juni 2021

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5717 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Lampiran Nama Peserta Rapat Sosialisasi :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	AVIAH A. DUFRI	REPORTER	
2	HILMAN HIGAYAT	Reporter	
3	Mahir Pratama	Reporter	
4	NUR FUAD	REPORTER	
5	AMMYTA P	REPORTER	
6	ABDUL AJIB	Reporter	
7	Ferdian. Nur. Rachman	Reporter	
8	ILA RACHMAYATI	REPORTER	
9	Firdaus Puji Prabowo	Reporter.	
10	Habibi e Mahda	Reporter	
11	Theresia O. Butar Butar	Jurnalists	
12	Venita Pratsjivananti	Jurnalists	
13	SITI LATIFAH TRI UTAMNI	INAGJES	
14	Helda DWI Agustina	Artis	
15			

Jakarta, Juni 2021

Kepala Sub Bagian Program dan Produksi Televisi

Bayu Setiadi, S.IP

NIP. 197903262005021002

Lampiran Foto :




Gambar 4.1 Sosialisasi dengan Tim Reporter TV Parlemen


KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama : Elisa Gabriela Purba
 NIP : 199601062020122006
 Unit Kerja : Sub Bagian Program dan Produksi Televisi
 Jabatan : Jurnalis
 Isu : Optimalisasi Substansi Naskah Berita TV Parlemen
 Gagasan : Pembagian Bidang Kajian Isu Editor Naskah TV Parlemen


Kegiatan 1 : Perencanaan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<p>a) Tahapan Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Kasubbag terkait isu dan gagasan penyelesaian rancangan aktualisasi Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Editor selaku stakeholder terkait isu dan gagasan penyelesaian rancangan aktualisasi Memutuskan angle isu yang akan diangkat serta mengusulkan gagasan perbaikan dan berkoordinasi dengan tim editor <p>b) Output : Lapsing hasil koordinasi</p> <p>c) Keterkaitan substansi mata pelatihan : Penentuan isu dan gagasan melalui <i>brainstorming</i> merupakan bentuk penerapan sila keempat, yakni musyawarah untuk mencapai mufakat. Koordinasi dan melakukan perencanaan merupakan bentuk kerja tim dan menghargai setiap pihak yang terlibat sesuai jabatannya. (Nasionalisme, Etika Publik, Manajemen ASN)</p> <p>d) Penguatan Nilai Organisasi : merupakan penerapan nilai religius dan membentuk profesionalisme setiap ASN.</p>	<p>stap kan rancangan dan tindak lanjut koordinasi</p> 	<p>17/5/21</p> <p>Tatap muka</p>

Kegiatan 2 : Penerapan Gagasan/ Ploting Bidang Kajian Isu


Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<p>a) Tahapan Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merinci semua bidang kajian isu di DPR RI dan Setjen DPR RI Mengelompokkan ragam bidang kajian isu kedalam satu rumpun isu. Mendata jumlah SDM/ tim editor naskah di redaksi Melakukan koordinasi dengan Kasubbag untuk memploting tim editor ke dalam bidang kajian isu Melakukan sosialisasi terkait hasil plotingan bidang kajian isu kepada coordinator berita harian, penyelia liputan harian, tim editor naskah, dan perwakilan reporter. <p>b) Output : Hasil plotingan tiap editor ke bidang kajian isu masing-masing oleh Kasubbag</p> <p>c) Keterkaitan substansi mata pelatihan : Bekerja sesuai bidang dengan profesional juga merupakan bentuk manajemen ASN. Dengan adanya plotingan juga memudahkan untuk mengukur tingkat akuntabilitas anggota tim dari tercapainya naskah bersubstansi baik.</p> <p>d) Penguatan Nilai Organisasi : Memberikan inovasi dan perbaikan untuk organisasi akan membentuk ASN yang religious, akuntabel dan berintegritas.</p>	<p>sudah lengkap lanjutkan tahapan selanjutnya</p> 	<p>28/5/21</p> <p>Tatap Muka</p>

Kegiatan 3 : Sosialisasi Hasil Ploting

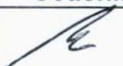
Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<p>a) Tahapan Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan kabag dan Kasubag terkait gagasan penyelesaian yang sudah dibentuk, yakni plotingan editor per bidang kajian isu. Menyusun undangan rapat untuk sosialisasi dan mengirimkannya kepada <i>stakeholders</i> Melakukan koordinasi ke tim editor selaku stakeholder yang akan mendapatkan pengklasifikasian bidang dalam aktualisasi ini <p>b) Output : Surat Pemberitahuan terkait pembagian Bidang Kajian isu tiap editor tertanda tangan kasubbag</p>	<p>sewaikan dan beri penjelasan evidence.</p> 	<p>28/5/21</p> <p>Tatap Muka</p>

<p>c) Keterkaitan substansi mata pelatihan : Sosialisasi dan koordinasi merupakan bentuk penerapan nilai <i>whole of government</i> dalam bekerja. Menghargai sesama rekan kerja dan memastikan informasi disampaikan dan diterima oleh setiap pihak juga menerapkan prinsip keadilan juga etika dalam bekerja.</p> <p>d) Penguatan Nilai Organisasi : penerapan nilai religius, profesional, dan integritas, dan mendukung visi misi Setjen DPR RI untuk mencapai visi DPR RI.</p>		
---	--	--

Kegiatan 4 : Program Berjalan (termasuk tahap uji coba)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<p>a) Tahapan Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIC mengakses daftar naskah hasil liputan reporter yang telah di <i>listing</i> • PIC memilih naskah berita yang akan ditayangkan berdasarkan tingkat urgensi dan pertimbangan lainnya • Naskah terpilih akan diploting oleh PIC ke setiap editor untuk di edit. Proses plotingan akan sesuai dengan bidang kajian isu masing-masing editor. • Daftar naskah yang harus diedit beserta nama editornya akan di <i>share</i> melalui email • Editor mengedit naskah sesuai bidang kajiannya masing-masing • Editor melakukan <i>Quality control</i> terhadap naskah final <p>b) Output : Email yang berisi plotingan naskah sesuai bidang kajian editor</p> <p>c) Keterkaitan substansi mata pelatihan : <i>Editing</i> naskah merupakan bentuk <i>quality control</i> sebelum berita final tayang ke publik. Dengan penetapan bidang kajian isu dan memastikan berita telah diedit oleh editor sesuai bidang kajiannya merupakan bentuk <i>double control</i> untuk menghasilkan berita yang layak, aktual, faktual, kepada publik. Hal ini merupakan penerapan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme, anti korupsi, dan pelayanan publik.</p> <p>d) Penguatan Nilai Organisasi : Menguatkan nilai profesionalisme dan akuntabilitas dengan menciptakan tanggung jawab atas pekerjaannya.</p>	<p>Naskah asli dan Naskah editing di dampingkan sy tabel.</p>	<p>9/6/21</p> <p>Tatap Muka</p> 


Kegiatan 5 : Evaluasi Pelaksanaan Program

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<p>a) Tahapan Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring terhadap keberlangsungan plottingan naskah • Melakukan rapat evaluasi setiap 2 minggu sekali untuk membahas kendala serta perbaikan yang sekiranya diperlukan. • Mengukur nilai substansi berita dengan penerapan <i>form checklist</i> • Membagikan kuesioner kepada editor melalui <i>google form</i> untuk mengetahui penilaian setiap editor terkait kebermanfaatan gagasan yang telah berjalan <p>b) Output : Catatan hasil rapat, hasil kuesioner di <i>google form</i></p> <p>c) Keterkaitan substansi mata pelatihan : Evaluasi berguna untuk mencari kekurangan yang perlu dibenahi dan kelebihan yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Hal ini merupakan substansi dari penerapan nilai komitmen mutu dan akuntabilitas.</p> <p>d) Penguatan Nilai Organisasi : Proses evaluasi memperlihatkan telah diterapkannya nilai religius, akuntabilitas, profesional, dan integritas.</p>	<p>Uji manfaat pelaksanaan aktualisasi dan buat testimoni .</p>	<p> 22/06/2021</p>

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Elisa Gabriela Purba
 NIP : 199601062020122006
 Unit Kerja : Sub Bagian Program dan Produksi Televisi
 Jabatan : Jurnalis
 Isu : Optimalisasi Substansi Naskah Berita TV Parlemen
 Gagasan : Pembagian Bidang Kajian Isu Editor Naskah TV Parlemen

Kegiatan 1 : Perencanaan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
a) Tahapan Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Kasubbag terkait isu dan gagasan penyelesaian rancangan aktualisasi Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Editor selaku stakeholder terkait isu dan gagasan penyelesaian rancangan aktualisasi Memutuskan angle isu yang akan diangkat serta mengusulkan gagasan perbaikan dan berkoordinasi dengan tim editor b) Output : Lapsing hasil koordinasi c) Keterkaitan substansi mata pelatihan : Penentuan isu dan gagasan melalui <i>brainstorming</i> merupakan bentuk penerapan sila keempat, yakni musyawarah untuk mencapai mufakat. Koordinasi dan melakukan perencanaan merupakan bentuk kerja tim dan menghargai setiap pihak yang terlibat sesuai jabatannya. (Nasionalisme, Etika Publik, Manajemen ASN) d) Penguatan Nilai Organisasi : merupakan penerapan nilai religius dan membentuk profesionalisme setiap ASN.	tindak lanjut rencana aksi yang dibuat	

Kegiatan 2 : Penerapan Gagasan/ Ploting Bidang Kajian Isu


Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
a) Tahapan Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> Merinci semua bidang kajian isu di DPR RI dan Setjen DPR RI Mengelompokkan ragam bidang kajian isu kedalam satu rumpun isu. 	Perhatikan latar belakang / konteks dari naskah	

<ul style="list-style-type: none"> • Mendata jumlah SDM/ tim editor naskah di redaksi • Melakukan koordinasi dengan Kasubbag untuk memploting tim editor ke dalam bidang kajian isu • Melakukan sosialisasi terkait hasil plotingan bidang kajian isu kepada coordinator berita harian, penyelia liputan harian, tim editor naskah, dan perwakilan reporter. <p>b) Output : Hasil plotingan tiap editor ke bidang kajian isu masing-masing oleh Kasubbag</p> <p>c) Keterkaitan substansi mata pelatihan : Bekerja sesuai bidang dengan profesional juga merupakan bentuk manajemen ASN. Dengan adanya plotingan juga memudahkan untuk mengukur tingkat akuntabilitas anggota tim dari tercapainya naskah bersubstansi baik.</p> <p>d) Penguatan Nilai Organisasi : Memberikan inovasi dan perbaikan untuk organisasi akan membentuk ASN yang religious, akuntabel dan berintegritas.</p>		
---	--	--


Kegiatan 3 : Sosialisasi Hasil Ploting

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>a) Tahapan Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan kabag dan Kasubag terkait gagasan penyelesaian yang sudah dibentuk, yakni plotingan editor per bidang kajian isu. • Menyusun undangan rapat untuk sosialisasi dan mengirimkannya kepada <i>stakeholders</i> • Melakukan koordinasi ke tim editor selaku stakeholder yang akan mendapatkan pengklasifikasian bidang dalam aktualisasi ini <p>b) Output : Surat Pemberitahuan terkait pembagian Bidang Kajian isu tiap editor tertanda tangan kasubbag</p> <p>c) Keterkaitan substansi mata pelatihan : Sosialisasi dan koordinasi merupakan bentuk penerapan nilai <i>whole of government</i> dalam bekerja. Menghargai sesama rekan kerja dan memastikan informasi disampaikan dan diterima oleh setiap pihak juga menerapkan prinsip keadilan juga etika dalam bekerja.</p> <p>d) Penguatan Nilai Organisasi : penerapan nilai religious, profesional, dan integritas, dan mendukung visi misi Setjen DPR RI untuk mencapai visi DPR RI.</p>	<p>Periapkan dan Pm usulan dag - melibatkan ke reporter di editor naskah</p>	<p>BS</p>

Kegiatan 4 : Program Berjalan (termasuk tahap uji coba)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>a) Tahapan Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PIC mengakses daftar naskah hasil liputan reporter yang telah di <i>listing</i> PIC memilih naskah berita yang akan ditayangkan berdasarkan tingkat urgensi dan pertimbangan lainnya Naskah terpilih akan diploting oleh PIC ke setiap editor untuk di edit. Proses plotingan akan sesuai dengan bidang kajian isu masing-masing editor. Daftar naskah yang harus diedit beserta nama editornya akan di <i>share</i> melalui email Editor mengedit naskah sesuai bidang kajiannya masing-masing Editor melakukan <i>Quality control</i> terhadap naskah final <p>b) Output : Email yang berisi plotingan naskah sesuai bidang kajian editor</p> <p>c) Keterkaitan substansi mata pelatihan : <i>Editing</i> naskah merupakan bentuk <i>quality control</i> sebelum berita final tayang ke publik. Dengan penetapan bidang kajian isu dan memastikan berita telah diedit oleh editor sesuai bidang kajiannya merupakan bentuk <i>double control</i> untuk menghasilkan berita yang layak, aktual, faktual, kepada publik. Hal ini merupakan penerapan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme, anti korupsi, dan pelayanan publik.</p> <p>d) Penguatan Nilai Organisasi : Memperkuat nilai profesionalisme dan akuntabilitas dengan menciptakan tanggung jawab atas pekerjaannya.</p>	<p>Evaluasi uji coba dan disebarkan jumlah naskah yang di uji coba ke. Perlu ada edit naskah yang di baca.</p>	

Kegiatan 5 : Evaluasi Pelaksanaan Program

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>a) Tahapan Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring terhadap keberlangsungan plotingan naskah Melakukan rapat evaluasi setiap 2 minggu sekali untuk membahas kendala serta perbaikan yang sekiranya diperlukan. Mengukur nilai substansi berita dengan penerapan <i>form checklist</i> Membagikan kuesioner kepada editor melalui <i>google form</i> untuk mengetahui penilaian setiap editor terkait kebermanfaatan gagasan yang telah berjalan 	<p>Lakukan aksi koreksi dan perbaikan</p>	

<p>b) Output : Catatan hasil rapat, hasil kuesioner di <i>google form</i></p> <p>c) Keterkaitan substansi mata pelatihan : Evaluasi berguna untuk mencari kekurangan yang perlu dibenahi dan kelebihan yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Hal ini merupakan substansi dari penerapan nilai komitmen mutu dan akuntabilitas.</p> <p>d) Penguatan Nilai Organisasi : Proses evaluasi memperlihatkan telah diterapkannya nilai religius, akuntabilitas, profesional, dan integritas.</p>		
--	--	--